

346.06626
JAH

p e1



**PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG
DIRUGIKAN DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN
TERBATAS**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH :

**JOKO SANTOSA, SH
NIM. B 4 A 099086**

PEMBIMBING :

PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

**PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG
DIRUGIKAN DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN
TERBATAS**


Disusun Oleh :


JOKO SANTOSA, SH
NIM. B 4 A 099086

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 3 Oktober 2002.

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,


Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP. 130.368.053

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum,

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arif, SH.
NIP. 130.350.519

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanna Wataala, atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Setelah mengalami beberapa kendala dalam membuat dan menyusun tesis ini, akhirnya tesis yang diberi judul “Penggabungan Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas” dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam memenuhi kehendak untuk menuliskan hal-hal yang ingin disampaikan ke dalam tesis ini, ternyata penulis bukanlah termasuk orang yang mudah menuliskan gagasan dan pikirannya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini dapat selesai karena tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Untuk itu adalah sangat tepat apabila penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pembimbing, yaitu Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, yang dengan sabar dan tulus hati bersedia untuk membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan tesis ini, sementara beliau disibukkan oleh tugas yang menyertainya.

Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih atas dorongan dan bantuan yang telah diberikan selama ini, sehingga sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc., Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Muladi, SH., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah mendorong usaha-usaha peningkatan SDM di Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, terutama semasa beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI.
4. Bapak Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH., Wakil Sekretaris Kabinet, yang telah merintis kerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang dalam rangka peningkatan SDM di Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, terutama semasa beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman RI.
5. Bapak Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH. LLM., Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, yang telah memberikan berbagai fasilitas untuk mendorong penyelesaian Program Pendidikan Pasca Sarjana, terutama semasa beliau menjabat sebagai Direktur

Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

6. Para pejabat di lingkungan Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, pejabat di lingkungan BKPM, KPPU, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Notaris yang telah bersedia memberikan data-data dan informasi serta wawancara yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
7. Orangtua yang penulis cintai, Ibu Surtiyah Fiorani yang selalu berdoa untuk kesuksesan penulis, dan Alm. Bapak Mispandi yang semasa hidupnya penuh semangat memberi dorongan untuk kemajuan penulis.
8. Isteri tercinta, Ny. Dra. Maemanah, dan anak-anak tersayang Deviyanti Aryani Mariam, Oktaviani Suci Lestari serta Rizka Maharani.
9. Dosen/Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. Karyawan dan Staf Administrasi Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
11. Semua sahabat dan rekan yang selama penulisan ini memberikan bantuan dan semangat.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi mereka yang memerlukannya.

Semarang, September 2002

P e n u l i s

RINGKASAN

Penggabungan Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk menychatkan Perseroan Terbatas. Pengaturan Peggabungan Perseroan Terbatas telah memasuki era kepastian hukum dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Peggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dimana peggabungan perusahaan mendapat pengaturan yang lebih komprehensif. Pelaksanaan peggabungan Perseroan Terbatas selain didasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut , juga berlaku ketentuan khusus "lex specialis" bagi Perseroan Terbatas dengan bidang usaha tertentu.

Penggabungan Perseroan Terbatas merupakan suatu alternatif bagi pengembangan perusahaan agar diperoleh peningkatan efisiensi, memperkuat daya saing, memperluas jalur distribusi dan memperoleh pangsa pasar yang lebih luas,tetapi pada sisi lain juga dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditur dan masyarakat.

Dalam peggabungan Perseroan Terbatas timbul permasalahan, yaitu bagaimanakah pelaksanaan peggabungan Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang ditimbulkan, bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan

dalam penggabungan Perseroan Terbatas serta bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu dalam melakukan perbuatan hukum Penggabungan Perseroan Terbatas harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak tersebut dengan memberikan perlindungan hukum.

ABSTRACT

A merger of Limited Liability Companies is one form of restructuring companies having the purpose to restructure Limited Liability Companies. The coordination of such merger has entered the of legal security by the issue of Law Number 1 Year 1995 regarding Limited Liability Companies and the Government's Regulation Number 27 Year 1998 regarding Merger, Consolidation, and Acquisition of Limited Liability Companies, whereby merger companies obtain more comprehensive coordination. The execution of a merger of Limited Liability Companies besides based on both aforementioned legal regulations, the special stipulation of "Lex specialis" for Limited Liability Companies, doing business in specific fiels, prevails.

A merger of Limited Liability Companies constitutes an alternatif for the company development to obtain an increase in efficiency, to strengthen the capacity for competitions, to widen the course of distribution and to obtain a broader market segment, however, on the other hand, it may also cause legal consequences inflicting prejudice to holders of minor shares, company's employees, creditors and the public.

Problem emerging from a merger of limited liability Companies are, namely, how the merger of the Limited Liability Companies is executed and what

legal consequences will appear from it; what legal protection is there in the Merger Limited Liability Company for the prejudiced parties and what obligation and responsibility from the Board of Directors and Commissioners can be expected in the framework of providing legal protection for the prejudiced parties in such Merger Limited Liability Company.

Therefore, in executing the legal action on the merger of Limited Liability Companies, attention shall be paid to the parties' interests by providing legal protection.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Permasalahan	10
D. Kerangka Teori	11
E. Tujuan Penelitian	20
F. Kontribusi Penelitian	20
G. Metode Penelitian	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENGgabUNgAN	
TERBATAS DAN PERLINDUNgAN HUKUMNYA	27
A. Penggabungan Perseroan Terbatas Pada Umumnya	27
1. Pengertian Penggabungan Perseroan Terbatas.....	27
2. Latar Belakang Penggabungan Perseroan Terbatas.....	34
1). Teori Efisiensi	34

2). Teori Diversifikasi	38
3). Teori Kekuatan Pasar.....	38
4). Teori Keuntungan Selisih Nilai Harta Kekayaan (Undervaluation)	39
5) Teori Mendapatkan Keuntungan Pajak	40
6) Teori Prestise	41
3. Sejarah Singkat Perkembangan Penggabungan Perseroan ... Terbatas	41
a. Sejarah Penggabungan Perusahaan di Amerika Serikat. .	41
1) Gelombang Pertama (1897-1904).....	41
2) Gelombang Kedua (1916-1929).....	43
3) Gelombang Ketiga (1965-1969)	43
4) Gelombang Keempat (1981-1989)	45
b. Sejarah Penggabungan Perusahaan di Indonesia.....	45
1) Periode sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	49
2) Periode Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	50
4. Bentuk-Bentuk Penggabungan Perseroan Terbatas	51
a. Bentuk-Bentuk Merger Ditinjau Dari Sudut Jenis Kegiatan Usaha Perusahaan-Perusahaan Yang Terlibat .	51
1) Merger Horizontal	51
2) Merger Vertikal	52
3) Merger Konglomerat	54
b. Bentuk-Bentuk Merger Ditinjau Dari Sudut Status Hukumnya	55

c. Bentuk-Bentuk Merger Ditinjau Berdasarkan Sikap Direksi Perusahaan Yang Akan Digabungkan	56
5. Tujuan Penggabungan Perseroan Terbatas	57
6. Dasar Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas	62
7. Persyaratan Penggabungan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan ... Terbatas	76
8. Tata Cara Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas...	84
a. Metode Statutory Merger.....	85
b. Metode Cash Merger	86
c. Metode Triangular Merger	86
d. Metode Reserve Triangular Merger	87
e. Metode Short-Form Merger	88
f. Metode Merger Menurut Prinsip Akuntansi	88
9. Penggabungan Perseroan Terbatas Sebagai Sarana Untuk ... Meningkatkan Daya Saing	89
10. Aspek Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas Dalam ... Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan	91
B. Akibat Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas	94
1. Keuntungan Dan Kerugian Penggabungan Perseroan Terbatas	94
a. Keuntungan Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Penggabungan Perseroan Terbatas	95
b. Keuntungan Dan Kerugian Penggabungan Perseroan ... Terbatas Bagi Perekonomian Secara Makro	99
2. Akibat Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas Menurut . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan .. Terbatas.....	104

a. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Yang Terlibat Penggabungan	107
b. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas ..	110
c. Akibat Hukum Terhadap Karyawan	112
d. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga	112
e. Akibat Hukum Terhadap Masyarakat	114
C. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas.....	115
1. Kepentingan Pihak-Pihak Yang Harus Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas	115
2. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas	119
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan ... Perseroan Terbatas	127
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PENGKABUNGAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN .. DALAM PENGKABUNGAN PERSEROAN TERBATAS	136
A. Hasil Penelitian	136
1. Pelaksanaan Pekkabungan Perseroan Terbatas dan Akibat .. Hukum Yang Ditimbulkan	136
2. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Pengkabungan Perseroan Terbatas.....	184
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Pekkabungan ... Perseroan Terbatas	218

B. Pembahasan	229
1. Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan	229
2. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas.....	253
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan ... Perseroan Terbatas	277
BAB IV : P E N U T U P.....	297
A. Kesimpulan.....	297
B. Saran.....	298
DAFTAR PUSTAKA	300
L A M P I R A N.	

DAFTAR TABEL

		Halaman
1. Tabel 1	Permohonan Pengesahan, Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Penggabungan Perseroan Terbatas Yang Masuk Di Sub Dit. Badan Hukum, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI.....	138
2. Tabel 2	Persetujuan Penggabungan Perseroan Terbatas Yang Dikeluarkan BKPM Tahun 1998	140
3. Tabel 3	Persetujuan Penggabungan Perseroan Terbatas Yang Dikeluarkan BKPM Tahun 1999	141
4. Tabel 4	Persetujuan Penggabungan Perseroan Terbatas Yang Dikeluarkan BKPM Tahun 2000	142
5. Tabel 5	Persetujuan Penggabungan Perseroan Terbatas Yang Dikeluarkan BKPM Tahun 2001	143
6. Tabel 6	Persetujuan Penggabungan Perseroan Terbatas Dengan Fasilitas PMA dan PMDN Tahun 1998-2001.....	144
7. Tabel 7	Waktu Penanganan Dan Penyelesaian Perkara oleh KPPU .	217

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini eksistensi dan peranan Perseroan Terbatas di dalam masyarakat sangat pesat. Keberadaan dan sumbangan Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dalam kehidupan masyarakat adalah sama besarnya dengan keberadaan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan.

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, diharapkan dapat menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang berazaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagaimana pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan kedudukan Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan keberadaan Perseroan Terbatas sebagai salah satu pelaku usaha ikut menggerakkan dan mengarahkan kegiatan di bidang ekonomi, sehingga perlu diupayakan terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehat dan efisien yang memungkinkan Perseroan Terbatas dapat tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis dengan perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang sangat cepat.

Untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi, Perseroan Terbatas sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha. Dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan Terbatas membutuhkan beberapa faktor, antara lain modal, manajemen yang baik dan teknologi. Dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan Terbatas dituntut agar perusahaan dikelola secara efisien sehingga dapat memperoleh keuntungan.

Dengan adanya tuntutan efisiensi dan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatan usahanya perlu melakukan suatu pengembangan perusahaan. Pengembangan perusahaan dapat ditempuh melalui (2) dua cara, yaitu:¹

- a. Ekspansi internal “*Internal expansion*”, pengembangan perusahaan dengan cara ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas hasil produksi serta distribusi hasil produksi yang sudah ada; atau
- b. Ekspansi eksternal “*External expansion*”, pengembangan perusahaan melalui cara ini dilakukan dengan cara penggabungan usaha “*merger*”, pengambilalihan “*acquisition*” dan peleburan usaha “*consolidation*”.

¹ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Restrukturisasi Perusahaan*, Seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam rangka Dies Natalis ke-41, Semarang, 28 Nopember 1998, hal 2..

Pengembangan perusahaan secara ekspansi internal dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas dengan cara diversifikasi dan ekstensifikasi usaha. Pengembangan perusahaan yang menggunakan cara diversifikasi dengan jalan mengadakan perbaikan-perbaikan atau melakukan inovasi pada produk-produk yang dihasilkan. Sedangkan pengembangan perusahaan dengan cara ekstensifikasi dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan atau menambah faktor-faktor produksi, misalnya dengan meningkatkan modal, memperbaiki manajemen, alih teknologi.

Selain pengembangan perusahaan melalui ekspansi internal, juga dapat dilakukan dengan jalan ekspansi eksternal dengan cara melakukan restrukturisasi perusahaan, misalnya penggabungan usaha, peleburan usaha dan pengambilalihan saham. Restrukturisasi perusahaan yang dilakukan dalam rangka pengembangan perusahaan selain bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, restrukturisasi perusahaan juga berfungsi untuk meningkatkan sinergi perusahaan.²

Dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan Terbatas selalu mengalami pasang surut. Pada umumnya Perseroan Terbatas yang sedang mengalami pasang naik tidak jarang melakukan beberapa tindakan untuk pengembangan lebih lanjut. Sebaliknya suatu Perseroan Terbatas yang sedang berada dalam keadaan sulit, juga perlu mengadakan tindakan untuk menyelamatkannya supaya Perseroan Terbatas itu

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 51.

tetap eksis. Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial.³

Pada dasarnya alasan atau latar belakang untuk melakukan restrukturisasi perusahaan adalah berdasarkan pemikiran yang bersifat ekonomis dan manajerial. Selain itu restrukturisasi juga berdasarkan pemikiran yang bersifat non yuridis, sehingga dalam restrukturisasi masalah hukum akan menjadi pertimbangan akhir sebagai pengaman, apakah restrukturisasi perusahaan itu cukup aman atau tidak dari sisi hukum dalam arti tidak melanggar ketentuan undang-undang dan tidak melanggar hak dan kepentingan pihak-pihak lain.

Mengingat pentingnya restrukturisasi perusahaan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, agar kegiatan perusahaan tetap eksis dan menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat, maka perangkat hukum yang mengatur mengenai restrukturisasi harus mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, yaitu untuk menjaga tetap terjaminnya keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat.

Restrukturisasi perusahaan dipandang dari aspek hukum hanya dapat dilaksanakan pada badan usaha dengan status badan hukum (dalam hal ini Perseroan

³ Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selecta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 39

Terbatas). Oleh karena itu perangkat peraturan restrukturisasi yang ada juga khusus ditujukan pada badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan peluang pada Perseroan Terbatas untuk melakukan restrukturisasi perusahaan, baik dengan cara penggabungan perusahaan, peleburan dan pengambilalihan saham. Hal ini terlihat pada pasal 102 sampai dengan pasal 109, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Penggabungan atau lebih dikenal dengan "*merger*" secara formal baru digunakan sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana pengertian penggabungan dapat kita jumpai pada Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”

Prof. Dr. Erman Rajagukguk, SH, LLM, berpendapat bahwa penggabungan perusahaan telah menjadi masalah bisnis dan hukum.⁴ Dari segi bisnis penggabungan perusahaan mempunyai tujuan tertentu antara lain untuk menjamin sumber bahan baku atau komponen (suku cadang), menguasai jalur distribusi, menambah jenis barang atau jasa yang dapat dijual "*diversifikasi*" usaha. Disamping itu penggabungan bertujuan untuk mengurangi ongkos produksi dan memperbaiki kualitas produk dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa penggabungan perusahaan dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut: ⁶

- a. Penggabungan horizontal;
- b. Penggabungan vertikal;
- c. Penggabungan konglomerat.

Penggabungan perusahaan horizontal terjadi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana semua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang bisnis "*line of business*" yang sama dan memproduksi atau menjual barang yang sama atau menjual barang substitusi yang paling mirip satu sama lain, sehingga dalam merger horizontal paling tidak ada karakteristik, yaitu bahwa perusahaan tersebut bergerak dalam bisnis

⁴ Erman Rajagukguk, *Merger, Akuisisi dan Konsolidasi*, Makalah pada seminar Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam era globalisasi diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta, 10-11 September 1997

⁵ A. Pantler and Robert P.O'Quinn, *Recent Empirical Evidence on Mergers and Acquisitions*, The Antitrust Bulletin, Winter 1993.

⁶ Munir Fuady, op. Cit, hal. 85.

yang sama, seperti misalnya penggabungan antara 2 (dua) perusahaan yang bergerak dalam bidang industri sepatu.

Penggabungan vertikal terjadi antara 2 (dua) pelaku usaha (perusahaan) atau lebih pada tingkat produksi yang berbeda, namun mempunyai saling keterkaitan. Penggabungan vertikal dapat dilakukan baik ke bawah maupun ke atas. Penggabungan vertikal yang dilakukan ke bawah, sebagai misal perusahaan yang bergerak dalam bidang industri sepatu melakukan penggabungan dengan distributornya. Sedangkan penggabungan yang dilakukan ke atas, misalnya perusahaan yang bergerak bidang industri sepatu melakukan penggabungan terhadap perusahaan yang memasok bahan baku dari produk yang dihasilkan.

Sedangkan penggabungan konglomerat terjadi antara dua perusahaan atau lebih yang sama sekali tidak punya keterkaitan bidang usaha satu dengan yang lain, misalnya pabrik rokok dengan pabrik kecap.

Dari ketiga jenis penggabungan di atas, terlihat bahwa penggabungan perusahaan mempunyai tujuan sebagai berikut: ⁷

- a. Memperbesar jumlah modal;
- b. Menyelamatkan kelangsungan produksi;
- c. Mengamankan jalur distribusi;

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 145.

- d. Memperbesar sinergi perusahaan; dan
- e. Mengurangi persaingan serta menuju kepada monopolistik

Penggabungan perusahaan dari segi ekonomi menimbulkan suatu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari penggabungan perusahaan dapat terlihat dari tujuan penggabungan sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan dampak negatif dari penggabungan perusahaan sering berpotensi merugikan pekerja atau karyawan, Direktur dan Komisaris, pemegang saham, serta pihak ketiga dalam hal ini kreditor atau masyarakat.

Dampak negatif dari penggabungan perusahaan yang berpotensi merugikan bagi pekerja atau karyawan, karena dengan adanya penggabungan perusahaan menyebabkan perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar atau dilikuidasi, maka dengan pembubaran atau likuidasi perusahaan dapat dipastikan adanya pengurangan atau rasionalisasi pekerja atau karyawan. Demikian juga bagi Direksi dan Komisaris perseroan yang menggabungkan diri dapat diberhentikan atau dihilangkan, karena manajemen perusahaan beralih pada perusahaan yang menerima penggabungan.

Pemegang saham pada perusahaan yang menggabungkan diri juga dapat terkena akibat dari penggabungan perusahaan, dimana pemegang saham dari perusahaan yang menggabungkan diri sebelum dilakukan penggabungan merupakan

pemegang saham mayoritas, dan setelah dilakukan penggabungan dapat menjadi pemegang saham minoritas, sehingga pemegang saham tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap manajemen perusahaan, apalagi pemegang saham minoritas pada perusahaan yang menggabungkan diri.

Penggabungan perusahaan dapat mengakibatkan kepentingan kreditur yang memiliki tagihan pada perseroan asal dan masyarakat menjadi dirugikan. Kepentingan kreditur terhadap tagihan pada perusahaan asal, dengan adanya penggabungan itu beralih ke perusahaan yang menerima penggabungan.

Sedangkan pengaruh penggabungan perusahaan bagi masyarakat adalah dengan adanya penggabungan itu menyebabkan adanya pemusatan penguasaan pasar pada satu perusahaan, sehingga berpotensi dapat terjadinya monopoli dan monopsoni yang akhirnya masyarakat secara tidak langsung dapat dirugikan dalam hal kenaikan harga suatu barang atau jasa.

Untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari penggabungan perusahaan, baik terhadap pekerja atau karyawan, Direksi dan Komisaris, kreditur atau masyarakat, Pemerintah telah memberi rambu-rambu bahwa perbuatan penggabungan perusahaan tidak boleh merugikan para pihak dan pihak ketiga, hal mana tercantum dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas, serta adanya keinginan agar penggabungan perusahaan menjadi ideal sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak serta mengingat luasnya materi, maka dalam penulisan ini perlu diadakan pembatasan masalah yang akan dibahas, yaitu pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas dan akibatnya terhadap pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, serta kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan perusahaan Perseroan Terbatas.

C. Permasalahan

Dari pembatasan masalah diatas, maka masalah yang dapat dikemukakan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang ditimbulkannya?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas?

3. Bagaimanakah kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas?

D. Kerangka Teori

Untuk memberikan arahan terhadap penelitian yang dilakukan disusunlah suatu kerangka teori. Kerangka teori atau teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan, antara lain :

- a) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b) Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
- c) Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar daripada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti;
- d) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang;
- e) Teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.⁸

Dalam penelitian ini kerangka teori disusun dengan menggunakan metode klasifikasi, yaitu dengan memilih ruang lingkup, pengumpulan istilah-istilah pokok dan kemudian menyusunnya secara sistematis.⁹

Arah penelitian dalam tesis ini dimulai dari pembahasan Perseroan Terbatas sebagai wadah kegiatan usaha, restrukturisasi, penggabungan usaha, dampak

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986, hal. 121

⁹ Ibid, hal. 129

dari penggabungan usaha serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan perusahaan.

Pengertian Perseroan Terbatas sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 angka 1, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian Perseroan Terbatas di atas, Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: ¹⁰

- a. Badan Hukum.
Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri secara terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian.
Artinya Perseroan Terbatas harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang bersepakat untuk mendirikan perseroan yang disusun dalam suatu anggaran dasar yang dibuat dengan akta Notaris.
- c. Melakukan Kegiatan Usaha.
Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, dagang, jasa) yang bertujuan untuk mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan.
- d. Modal dasar.
Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang terbagi dalam saham Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan serta pemegang saham.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, op. cit., hal. 67

e. Memenuhi persyaratan Undang-undang.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.

Dari unsur-unsur yang harus dimiliki Perseroan Terbatas tersebut, salah satu diantaranya Perseroan Terbatas harus melakukan kegiatan usaha. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas menjalankan kegiatan ekonomi dalam rangka mencari keuntungan atau laba, sehingga dengan demikian Perseroan Terbatas dari segi ekonomi merupakan suatu wadah kegiatan usaha.

Dalam melakukan kegiatan usaha, acapkali dijumpai suatu perseroan mengalami kesulitan, sehingga perlu adanya suatu penyelamatan terhadap perseroan tersebut agar tetap eksis. Salah satu alternatif untuk menyelamatkan perseroan yang mengalami kesulitan dilakukan dengan jalan restrukturisasi.

Secara sederhana restrukturisasi perusahaan "*corporate restructuring*" dapat diartikan sebagai pembenahan atau perombakan mendasar terhadap seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi. Perombakan terhadap perusahaan tidak hanya menyangkut aspek bisnis saja, tetapi juga menyangkut aspek organisasi manajemen, keuangan maupun aspek legal atau hukum.¹¹

¹¹ Akhmad Syakhroza dan Felix Jebarus, *Beberapa Alternatif Restrukturisasi Perusahaan: Tinjauan secara Konseptual*, Usahawan No. 09, Th. XXVII, September 1998, hal. 11

Restrukturisasi perusahaan dari aspek hukum hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, restrukturisasi perusahaan hanya dapat dilakukan dengan cara Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

Menurut Christianto Wibisono, penggabungan atau merger adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif berimbang kekuatannya sehingga terjadi kombinasi baru yang merupakan wadah bersama yang saling memperkuat.¹²

Penggabungan perusahaan atau merger, menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/1989 tentang Peleburan dan Penggabungan usaha Bank, diartikan sebagai berikut:

“Merger (penggabungan usaha Bank) adalah Penggabungan dari dua Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan menglikuidasi Bank-bank lainnya”.

Sedangkan pendapat dari Douglas Whitman dan John William Gergacz, Merger adalah: *“The joining together go to companies that previously operated as*

¹² Christianto Wibisono, *Merger dan Akuisisi di Indonesia*, Seminar Merger dan Akuisisi, Jakarta, 1991

*separate entities, where by one company absorbs the other and continues to exist, while the absorbed company ceases to exist as separate entity".*¹³

Penggabungan, konsolidasi atau akuisisi perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., mempunyai tujuan dan manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan barriers of market entry bagi calon pesaing yang akan muncul.
- b. Menyinkronkan perusahaan pesaing dengan menjadikan perusahaan pesaing itu sebagai sasaran merger, konsolidasi atau akuisisi.
- c. Membeli produk line atau lines untuk melengkapi product lines dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada product lines atau services lines yang ada pada saat ini.
- d. Untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi atau akuisisi.
- e. Memperoleh pasar dan atau pelanggan-pelanggan baru yang tidak dimilikinya namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi.
- f. Membeli kantor-kantor (manufacturing, distribution, sales, administrative offices) dan membeli fasilitas-fasilitas dan perlengkapan lain dari perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi untuk meningkatkan kapasitas.
- g. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dipunyainya oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi atau akuisisi.
- h. Memperoleh bisnis lain yang belum dipunyainya namun dipunyai oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi atau akuisisi agar business portfolio-nya makin beragam.
- i. Memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi atau akuisisi.
- j. Memperkuat kualitas atau keahlian, atau menambah jumlah sumber daya manusia dari perusahaan yang bersangkutan dengan sumberdaya manusia dari perusahaan lain yang menjadi sasaran merger, konsolidasi atau akuisisi.

¹³ Douglas Whitman dan John William Gergecz, *The Legal Environment of Business*, Second Edition, Random House, Business Division, New York, 1988, hal. 5-6

- k. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai (idle).¹⁴

Sedangkan sasaran umum yang dijadikan alasan dilakukannya suatu penggabungan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan konsentrasi pasar;
- b. Untuk meningkatkan efisiensi;
- c. Untuk mengembangkan inovasi baru;
- d. Sebagai alat investasi;
- e. Sebagai sarana alih teknologi;
- f. Mendapat akses internasional;
- g. Untuk meningkatkan daya saing;
- h. Memaksimalkan sumberdaya;
- i. Menjamin pasokan bahan baku.¹⁵

Meskipun penggabungan merupakan alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka pengembangan dan untuk mengatasi kesulitan perusahaan, namun pada sisi lain penggabungan perusahaan sering menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Upaya Penyehatan Perusahaan*, Makalah Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan oleh Badan Hukum Pembinaan Nasional – Departemen Kehakiman RI, Jakarta 10-11 September 1997.

¹⁵ Munir Fuady, op. cit., hal. 57

Dengan adanya tindakan penggabungan perusahaan, ada pihak-pihak tertentu yang tergolong lemah atau kecil yang kedudukannya menjadi riskan. Karena itu, adalah menjadi tugas dari sektor hukum untuk menjaga keadilan atau kesebandingan, dengan melindungi pihak yang lemah tersebut.

Pihak yang lemah yang kedudukannya krusial jika terjadi penggabungan perusahaan yang perlu mendapat perlindungan hukum digolongkan dalam 3 (tiga) katagori, yaitu lemah secara struktural, finansial dan lokalisasi.¹⁶

Pihak yang lemah secara struktural adalah kedudukan pihak tersebut dalam struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya, sebagai contoh kedudukan para pekerja di perusahaan lebih lemah dibandingkan kedudukan pihak lain seperti pemegang saham, Direksi atau Komisaris, karena pekerja sama sekali tidak dilibatkan dalam hal menentukan "*policy*" maupun operasional perusahaan, sehingga para pekerja dalam perusahaan yang melakukan penggabungan merupakan salah satu pihak yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum penggabungan dilakukan.

¹⁶ Munir Fuady, op. cit., hal. 127

Adapun pihak yang lemah secara finansial adalah pihak tersebut sebenarnya dalam struktur kedudukannya secara yuridis kuat, namun karena ikatan finansial yang lemah antara yang bersangkutan dengan perusahaan, karena yang bersangkutan sebagai pemegang saham minoritas, sehingga perlindungan terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas sangat penting dalam hukum merger, di samping pihak-pihak lainnya.

Sedangkan pihak yang lemah secara lokalisasi maksudnya, pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa:

- a. Hubungan kontraktual, misalnya antara kreditur dengan perusahaan yang bersangkutan;
- b. Hubungan non kontraktual, misalnya dengan pesaing secara tidak "*fair*".

Kedudukan kreditur sebagai salah satu pihak yang lemah secara lokalisasi merupakan salah satu "*dangerous party*" yang harus selalu waspada jika suatu perusahaan melakukan penggabungan. Pihak yang lemah secara lokalisasi lainnya adalah masyarakat pada umumnya, karena masyarakat akan menanggung kenaikan harga yang diakibatkan suatu penggabungan perusahaan yang mengarah pada penguasaan pasar. Oleh karena itu secara hukum pihak yang lemah secara lokalisasi semestinya juga mendapat perlindungan terhadap akibat penggabungan perusahaan.

Melihat dari adanya pihak-pihak yang lemah baik secara struktural, finansial maupun lokalisasi dalam penggabungan perusahaan, yang perlu mendapat perlindungan hukum, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memberikan rambu-rambu agar penggabungan perusahaan tidak merugikan atau paling tidak mengurangi kerugian bagi pihak-pihak tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 104 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1). Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan

harus memperhatikan :

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

(2). Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi

hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Ketentuan Pasal 104 menegaskan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau penggabungan, peleburan dan pengambilalihan itu merugikan pihak-pihak tertentu.

E. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimanakah penggabungan Perseroan Terbatas dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengkaji dan memperoleh penjelasan bagaimanakah pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang ditimbulkannya.
2. Memperoleh penjelasan mengenai bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas.
3. Memperoleh gambaran tentang bagaimanakah kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas.

F. Kontribusi Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan (restrukturisasi perusahaan).

2. Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyusunan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penggabungan perusahaan serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan perusahaan.
- b) Menjadikan bahan dan dasar penelitian serta kepustakaan di bidang hukum bisnis khususnya di bidang restrukturisasi perusahaan.
- c) Bermanfaat bagi perusahaan yang akan melakukan penggabungan, agar
 - penggabungan perusahaan tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak.
- d) Dapat menciptakan model penggabungan perusahaan yang ideal yang tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak.

G. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini yang berjudul “ Penggabungan Perseroan Terbatas dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas” membutuhkan data yang akurat yang dititikberatkan kepada data primer dari penelitian lapangan yang didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dianalisa, maka dalam penulisan ini digunakan metode sebagai berikut :

a) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris karena penulisan ini dimaksudkan untuk membahas secara teoritik mengenai penggabungan Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas.

Pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan yang meliputi penelitian yang berupa usaha penemuan hukum "*in concreto*".¹⁷ Untuk mengetahui sejauhmana peraturan perundang-undangan yang ada dapat diterapkan yaitu dengan menganalisa bahan pustaka yang merupakan data sekunder.¹⁸ Dalam penelitian normatif ini yang berlaku adalah teori-teori hukum normatif sebagai kerangka konseptualnya. Dalam penulisan ini digunakan penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dari peraturan-peraturan hukum tertulis.¹⁹

Taraf sinkronisasi vertikal yaitu sinkronisasi suatu peraturan berdasarkan hierarkies peraturan perundang-undangan, sedangkan sinkronisasi horizontal yaitu sinkronisasi suatu perundang-undangan lain dalam kaitannya dalam bidang-bidang lain yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik.

¹⁷ Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 12.

¹⁸ Ibid, hal 9.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui akibat hukum dari penggabungan Perseroan Terbatas dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dalam pendekatan yuridis empiris ini juga dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain,²⁰ oleh karena itu penelitian ini mempergunakan teori-teori sosial mengenai hukum atau teori sosial dan kerangka konseptualnya bersifat "*logico-empiris*".²¹

Penelitian yuridis empiris atau sosiologis dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau "data primer dengan cara melakukan pengamatan, studi lapangan dan wawancara.

b) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif dan analitis karena secara spesifik penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai penggabungan Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, sehingga dari analisis ini dapat diperoleh kesimpulan umum mengenai penggabungan Perseroan Terbatas yang paling ideal dan tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

¹⁹ Soerjono Soekanto, op cit, hal 50.

²⁰ Ronny Hanintijo Soemitro, op cit, hal 34.

c) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer atau data yang diperoleh langsung dari instansi terkait melalui penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi;
2. Bahan hukum sekunder, yakni: buku teks, laporan penelitian, artikel ilmiah, rancangan undang-undang, dan data statistik;
3. Bahan hukum tersier. Bahan ini dijadikan sebagai pedoman untuk mengkaji bahan primer dan sekunder, yang diperoleh dari kamus, bibliografi dan ensiklopedia.²²

d) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penulisan tesis ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, dengan mengkaji sejumlah literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku artikel, makalah, laporan hasil penelitian, majalah dan surat kabar yang berkenaan dengan penggabungan Perseroan Terbatas dan

²¹ Ibid, hal 36.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan III, Jakarta, Rajawali, 1990, hal. 14-15

perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

II. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, maka disusun suatu sistematika sebagai berikut :

Bab I. Berisi gambaran mengenai tesis yaitu latar belakang penulisan tesis pembahasan dan permasalahan, tujuan tesis, kontribusi yang diharapkan dalam penulisan tesis ini dan kerangka teori yang memberikan petunjuk dan pengarahannya penulisan tesis ini serta metodologi penelitian. Bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembaca agar lebih mudah memahami uraian-uraian pada bab-bab selanjutnya.

Bab II. Merupakan tinjauan pustaka terhadap substansi penggabungan Perseroan Terbatas dan perlindungan hukumnya. Pembahasan pada bab ini terdiri dari penggabungan Perseroan Terbatas, akibat hukum penggabungan Perseroan Terbatas serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas.

Bab III. Pada bab ini merupakan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan penggabungan

Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas, serta kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas. Setelah diuraikan hasil penelitian dari permasalahan tersebut di atas, pada bagian pembahasan akan dianalisis masing-masing permasalahan tersebut dengan teknik analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

Bab IV. Merupakan bagian penutup, pada bagian ini disajikan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan oleh penulis sebagai penyempurnaan kebijaksanaan dibidang ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. Penggabungan Perseroan Terbatas Pada Umumnya

1. Pengertian Penggabungan Perseroan Terbatas

Penggabungan perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah "*merger*" telah menjadi trend bagi suatu perusahaan yang ingin mengembangkan perusahaan dan memperluas jaringan.usahanya, terutama bagi kelompok usaha yang ingin berkembang secara cepat dalam waktu relatif singkat. Sebab dengan metode penggabungan perusahaan, suatu kelompok usaha tidak perlu membesarkan perusahaan dari kecil, tetapi cukup dengan menggabungkan diri dengan perusahaan yang sudah besar atau sedang berkembang.

Istilah merger berasal dari kata "*merge*" yang berarti menggabungkan atau memfusikan. Oleh karena itu merger lazim disebut penggabungan dan di lain pihak ada yang menyebutnya sebagai "*fusi*". Dan ada juga yang menyebutnya sebagai "*absorpsi*" (penyerapan). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah penggabungan.

Dalam literatur-literatur, meski istilah merger perumusannya beragam, namun secara substansi mempunyai kesamaan, yakni penggabungan dua atau lebih

perusahaan dan perusahaan yang digabungkan itu dibubarkan. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dari hal tersebut.

Pengertian penggabungan (merger) dalam "*Black's Law Dictionary*", dirumuskan sebagai "*The absorption of one company by another, latter retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchises, and powers of former, and absorbed company ceasing to exist as separate business entity*".¹

Sementara itu dalam "*Legal Terms*", merger didefinisikan sebagai: "*A combination of two or more firms or corporations, usually such that one is absorbed into the structure of the other(s) and loses its separate identity*".² Pengertian merger diberikan pula oleh Keith R. Abbot yang dirumuskan sebagai: "*This occurs when two companies join together under the name of one of them, or as a new formed for the purpose. A merger may also be called an amalgamation*".³

Merger dapat juga diartikan sebagai: "*A combination of two corporations in which only one corporation survives and the merged corporation goes out of existence. In a merger, the acquiring company assumes the assets and liabilities of the merged company. A merger differs from a consolidation, which is a business combination where by two or more companies join to form an entirely new*

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 1979, hal. 2.

² Butterworths Guides, *Legal Terms*, Butterworths Australia, 1998, hal. 63.

³ Keith R. Abbot, *Company Law*, 4th Edition, DP Publication Ltd, London, 1970, hal. 301.

*company. All of the combining companies are dissolved and only the new entity continues to operate.”*⁴

Sedangkan pendapat dari William McCarty dan John W. Bagby, tentang merger adalah: *“A merger brings together two indepent firm, of which one survives and the other is dissolved.”*⁵

Merger menurut Joseph M. Morris dalam bukunya *“Mergers and Acquisitions – Business Strategies for Accountants”* sebagaimana dikutip Gunawan Widjaja adalah, *“the absorption of one corporation into another corporation. Usually but not always the selling corporation’s shareholders receive stock in the buying corporation”*⁶

Beberapa ahli hukum dan ekonom Indonesia juga ikut menyumbangkan pendapatnya mengenai pengertian merger. Seperti misalnya, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H., Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang memberikan definisi pengertian merger sebagai berikut: *“merger adalah penggabungan sedemikian rupa dari dua perusahaan atau lebih (Perseroan Terbatas), sehingga dari segi ekonomi dapat dianggap sebagai suatu kesatuan.”*⁷

⁴ Patrick A. Caughan, *Mergers, Acquisitions and Corporate Structuring*, John Wiley & Son Inc, New York, 1996, hal. 7.

⁵ F. William McCarty dan John W. Babgy, *The Legal Environment of Business*, Irwin, Boston, hal. 520.

⁶ Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 46.

⁷ Sri Redjeki Hartono, *Penggabungan Perusahaan*, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Nomor 4, 1986, hal. 4.

Sementara itu A. Zen Umar Purba, mengemukakan bahwa: “merger berarti penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam salah satu dari mereka dan perusahaan yang bergabung membubarkan diri.”⁸

Sedangkan Drs. Marcel Go, MS mengartikan bahwa: “Merger adalah suatu penggabungan perseroan, dimana sebuah perseroan mengambil alih satu atau lebih perseroan yang lain. Setelah terjadi pengambilalihan tersebut, maka perseroan yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi, sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap. Dengan demikian kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perseroan yang mengambil alih.”⁹

Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*” memberikan definisi merger atau fusi sebagai berikut: “Fusi adalah bentuk kerja sama di antara perusahaan yang mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat penuh. Ini berarti bahwa pada perusahaan yang berfusi, kemandirian pihak-pihak yang berfusi tidak ada lagi ada melainkan perusahaan yang berfusi itu yang satu melebur pada yang lain. Pengertian fusi ditujukan kepada penggabungan perusahaan-perusahaan, sehingga dari sudut ekonomi mereka merupakan satu kesatuan”.¹⁰

⁸ A. Zen Umar Purba, *Merger dan Akuisisi Dan Kebutuhan Akan Pengaturan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Merger dan Akuisisi di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, 14 Desember 1991, hal. 1.

⁹ Marcel Go, *Akuisisi Bisnis, Analisis dan Pengelolaan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 76.

¹⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994, hal. 11.

Sedangkan Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H. mengemukakan bahwa yang dinamakan “merger adalah manakala ada dua PT atau lebih dimana yang satu atau lebih menggabungkan diri pada satu PT yang sudah ada tersebut.”¹¹

Kemudian Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perusahaan Indonesia*” mengartikan bahwa: “Penggabungan Perseroan merupakan pengembangan perusahaan yang sudah ada. Pengembangan ini terjadi karena ada beberapa (minimal dua) perusahaan yang bergabung, tetapi salah satunya tetap berdiri sedangkan yang lainnya bubar karena dilebur ke dalam perusahaan yang masih ada.”¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menggunakan istilah Penggabungan untuk merger. Pengaturan mengenai merger dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 terdapat pada Bab VII tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109. Walaupun telah menggunakan istilah Penggabungan, namun baik dalam Pasal 1 yang mengatur Ketentuan Umum maupun dalam penjelasan Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan istilah Penggabungan tersebut. Pengertian Penggabungan baru dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan

¹¹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 58.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 143-144.

Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, pengertian Penggabungan dapat ditemui pada Pasal 1 butir (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”

Dari berbagai definisi merger atau penggabungan perusahaan yang dikemukakan tersebut di atas terlihat adanya kesamaan di dalam unsur-unsur pengertian merger atau penggabungan perusahaan, yaitu :

1. Merger atau penggabungan perusahaan adalah salah satu tindakan hukum penyatuan perusahaan yang melibatkan dua pihak, yaitu satu perusahaan yang menerima penggabungan, dan satu atau lebih perusahaan yang menggabungkan diri.
2. Dalam merger atau penggabungan perusahaan, salah satu perusahaan eksistensinya tetap ada dan hidup, sedang yang lainnya lenyap menggabungkan diri dalam perusahaan yang eksis.

3. Perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima/mengambilalih seluruh saham, harta kekayaan, hak, kewajiban dan utang perusahaan yang menggabungkan diri.

Perlu dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan “perusahaan” adalah “Perseroan Terbatas” atau disingkat PT, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan pertimbangan bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang banyak dipergunakan oleh kalangan dunia usaha di Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal yang oleh hukum diberikan status sebagai badan hukum, dan karenanya merupakan “subyek hukum yang mandiri” (*persona standi in judicio*).
2. Keberadaan Perseroan Terbatas tidak tergantung pada keberadaan pemegang sahamnya, artinya eksistensi Perseroan Terbatas tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian pemegang saham.
3. Para pemegang saham Perseroan Terbatas bertanggung jawab secara terbatas (*limited liability*), artinya pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga.
4. Pemegang saham Perseroan Terbatas memiliki kebebasan untuk mengalihkan saham (saham) kepada pihak lain sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
5. Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang bersifat internasional. Banyak negara lain juga memiliki bentuk perusahaan seperti Perseroan Terbatas ini, meskipun namanya berlainan, seperti misalnya di Inggris dan negara-negara Anglo Saxon lainnya, dinamakan: '*Company Limited by Shares*' atau disingkat '*Co., Ltd.*', di Jerman, Swiss dan Austria dinamakan, '*Aktiengesellschaft*' atau disingkat '*A.G.*', di Belanda dinamakan '*Naamloze Vennootschap*' atau disingkat '*N.V.*' (nama ini juga pernah digunakan di Indonesia sampai dekade tahun 50'an sebelum diubah menjadi 'Perseroan Terbatas').

6. Khusus di Indonesia, bentuk Perseroan Terbatas seringkali dijadikan persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank atau untuk mendapatkan kesempatan usaha dari instansi-instansi resmi.¹³

2. Latar Belakang Penggabungan Perseroan Terbatas

Penggabungan Perseroan Terbatas berdasarkan tujuannya secara teoritis mempunyai berbagai macam motivasi. Menurut J. Fred Weston, Kwang S. Chung dan Susan E. Hoag dalam bukunya *"Mergers, Restructuring, and Corporate Control"*, bahwa ada 6 (enam) macam motivasi yang melatarbelakangi terjadinya penggabungan perusahaan, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1). Teori Efisiensi.

Menurut teori ini, suatu penggabungan perusahaan akan melahirkan "sinergi baru". Secara ekonomi dengan bertambahnya asset yang merupakan faktor-faktor komplementer dalam produksi, maka akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Teori efisiensi ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Sinergi Manajemen.

Apabila manajemen perusahaan yang satu kurang efisien dibandingkan perusahaan yang lain, maka penggabungan perusahaan dapat merupakan cara untuk meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu agar efisiensi dapat terlaksana dengan baik, maka perusahaan-perusahaan yang bergabung biasanya mempunyai kegiatan usaha

¹³ Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, PT. Nadhilah Ceria Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 14-15.

¹⁴ J. Fred Weston, Kwang S. Chung and Susan E. Hong, *Mergers, Restructuring, and Corporate Control*, Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall Inc, 1990, hal. 190-217.

yang sama, sehingga para manajer perusahaan tersebut mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang sama tentang kegiatan usaha yang dikelolanya.

Menurut IG.M. Mantera yang mengutip teori model organisasi Mac Kinsey, bahwa untuk mendapatkan sinergi baru dari dua organisasi yang digabungkan, maka harus memenuhi 7 (tujuh) langkah, yaitu sebagai berikut : ¹⁵

Pertama, Strategi. Strategi yang baik meliputi tiga hal, yaitu strategi memenangkan persaingan dan meningkatkan daya saing, strategi memuaskan para nasabah, dan strategi menyempurnakan manajemen ke dalam perusahaan. Penyempurnaan manajemen ini dapat ke dalam maupun ke luar. Ke dalam dengan menyempurnakan organisasi yang meliputi struktur organisasi dan sistem organisasi, sedangkan ke luar penyempurnaan diarahkan kepada marketing.

Kedua, Perencanaan. Perencanaan ini meliputi perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Suatu perencanaan yang baik, jangka pendeknya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat mendesak untuk segera dilaksanakan, sedangkan jangka panjangnya merupakan perencanaan pengembangannya.

Ketiga, pengembangan sumber daya manusia, hal ini berkaitan dengan pengelolaan proses-proses kerja dengan selalu berorientasi kepada pencapaian keuntungan.

¹⁵ Majalah Info Bank, No. 212, Jakarta, Juli 1997, hal. 33.

Keempat, gaya manajemen. Mengenai gaya manajemen, tampak sangat beragam tergantung dari budaya yang berkembang di masyarakat. Di Indonesia, gaya manajemen ini biasanya hanya dua, yaitu gaya manajemen yang birokratis dan gaya manajemen yang berorientasi kepada pelayanan.

Kelima, jumlah karyawan yang diperlukan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tidak setiap penggabungan perusahaan selalu diikuti oleh rasionalisasi karyawan. Pendapat ini tidak seluruhnya benar, karena sangat tergantung dari motivasi para pihak yang terlibat dalam penggabungan perusahaan. Akan tetapi bila motivasinya untuk efisiensi, maka rasionalisasi karyawan ini tidak bisa dihindarkan, karena jumlah karyawan yang bertambah tersebut akan disesuaikan dengan jabatan yang ada dalam perusahaan.

Keenam, keterampilan (skill), dengan adanya penggabungan perusahaan yang mengarah kepada diversifikasi usaha, maka akan selalu diikuti oleh peningkatan keterampilan karyawan untuk merebut pasar pada usahanya yang baru.

Ketujuh, budaya kerja (set value), dengan adanya penggabungan perusahaan, akan ada budaya kerja, yaitu budaya kerja perusahaan yang menggabungkan diri dan budaya kerja perusahaan yang menerima penggabungan. Masalahnya budaya kerja perusahaan mana yang akan dipertahankan untuk dapat memenangkan persaingan, atau kalau mungkin diadakan peleburan atas kedua budaya kerja tersebut.

b. Sinergi Operasi.

Penggabungan perusahaan yang bermotivasikan terciptanya sinergi operasi ini adalah upaya menggabungkan unsur-unsur potensial yang berasal dari kedua perusahaan tersebut. Apabila perusahaan yang satu unggul di bidang penelitian dan pengembangan bergabung dengan perusahaan yang lain yang unggul di bidang pemasaran, maka penggabungan tersebut akan melahirkan sinergi baru di bidang operasional perusahaan. Penggabungan perusahaan ini dapat terjadi atas perusahaan yang mempunyai bisnis yang sama, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan kedua perusahaan tersebut berbeda sama sekali kegiatan bisnisnya.

c. Sinergi Keuangan.

Penggabungan perusahaan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan penerima penggabungan, baik melalui pinjaman/kredit bank, atau melalui penerbitan saham-saham baru. Hal ini kemudian akan mendorong naiknya perusahaan tersebut untuk mengembangkan usahanya

Dengan kekuatan modal tersebut perusahaan dapat memperkuat usaha tertentu untuk memenangkan persaingan karena perusahaan dapat mengefisienkan biaya promosi sehingga dapat menguasai pangsa pasar dan tercipta kekuatan pasar untuk jenis bidang usaha tertentu. Selain itu, penggabungan perusahaan dengan motif menciptakan sinergi keuangan ini dapat juga menguntungkan perusahaan penerima penggabungan dalam bidang perpajakan, yang mana apabila kebetulan perusahaan yang menggabungkan diri tersebut mempunyai fasilitas pajak tertentu, maka dengan

adanya penggabungan tersebut, fasilitas dimaksud dapat dapat diperoleh oleh perusahaan penerima penggabungan.

2). Teori Diversifikasi

Penggabungan perusahaan menurut teori ini merupakan tindak lanjut dari tercapainya sinergi keuangan. Dengan kemampuan modal yang semakin kuat, perusahaan akan dapat melakukan penganeka-ragaman bidang usaha. Dengan memiliki keanekaragaman usaha, maka diharapkan suatu perusahaan akan dapat menjaga stabilitas pendapatan (income). Untuk jelasnya dapat diberikan suatu contoh pada saat sekarang usaha divisi distributor kendaraan bermotor mengalami penurunan omset penjualan, namun pada saat yang sama pada divisi yang lain yaitu divisi penyediaan suku cadang atau spare parts dan perbengkelan mengalami peningkatan pendapatan, sehingga secara keseluruhan dari 2 (dua) divisi tersebut income atau pendapatan perusahaan dapat tetap terjadi sesuai dengan target yang direncanakan.

3). Teori Kekuatan Pasar

Suatu persaingan antara perusahaan yang memproduksi barang sejenis, cenderung mendorong perusahaan yang bersaing tersebut untuk saling meningkatkan penguasaan pasar. Apabila pada keadaan tertentu peningkatan penguasaan pasar tersebut tidak dapat dilakukan lagi, maka penggabungan perusahaan merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan penguasaan pangsa pasar. Dengan adanya

penggabungan tersebut, maka penguasaan pasar akan semakin luas, dan hal ini sudah tentu akan meningkatkan daya saing dan terjaganya kekuatan pasar.

Penggabungan perusahaan dengan keinginan untuk perluasan pasar ini, akan mengurangi biaya promosi dan biaya pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan yang baru. Selanjutnya biaya-biaya tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan meningkatkan mutu produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing.

Penggabungan perusahaan dengan motivasi untuk memperbesar penguasaan pasar ini biasanya dilakukan oleh konglomerat, dengan bentuk penggabungan horizontal atau vertikal, yaitu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.

4). Teori Keuntungan Selisih Nilai Harta Kekayaan (Undervaluation)

Penggabungan perusahaan dengan motivasi keuntungan selisih nilai harta kekayaan ini merupakan suatu akibat adanya penilaian harta kekayaan perusahaan yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya sehingga perusahaan penerima penggabungan akan menerima keuntungan dari selisih penilaian harta kekayaan perusahaan yang menggabungkan diri tersebut. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu **Pertama**, manajemen perusahaan yang menggabungkan diri tidak mampu menjalankan perusahaan secara maksimal sehingga kinerja perusahaan menjadi perusahaan menjadi rendah dan mengakibatkan harga sahamnya pun menjadi

rendah. **Kedua**, manajemen perusahaan yang menggabungkan diri kurang jeli melihat peluang pasar dan karena itu bidang usaha yang dijalankan kurang diminati investor sehingga harga saham menjadi turun. **Ketiga**, kebijaksanaan perusahaan yang menggabungkan diri dalam melakukan pembagian laba perusahaan (dividen) terbatas sehingga kurang diminati oleh investor dan akibatnya harga saham perusahaan menjadi turun.

5). Teori Mendapatkan Keuntungan Pajak

Penggabungan perusahaan yang didasarkan pada keinginan untuk memperoleh keuntungan di bidang perpajakan ini, biasanya dilakukan oleh konglomerat atau biasa terjadi antara perusahaan induk dengan anak perusahaan baik secara vertikal maupun horizontal antara perusahaan sejenis. Misalnya perusahaan A adalah perusahaan yang senantiasa memperoleh keuntungan yang besar, sehingga kewajiban pembayaran pajaknya pun besar, sedangkan perusahaan B baru meraih keuntungan kecil setelah sekian tahun mengalami kerugian, sehingga perusahaan B masih memiliki fasilitas pembebasan pajak akibat akumulasi kerugiannya itu. Dengan melakukan penggabungan perusahaan B ke dalam perusahaan A, maka keuntungan di bidang perpajakan diperoleh melalui pengurangan kewajiban pembayaran pajak oleh perusahaan penerima penggabungan oleh karena adanya fasilitas pembebasan pajak yang dimiliki oleh perusahaan yang menggabungkan diri. Selain itu ada kemungkinan penggabungan perusahaan tersebut didasarkan pada keinginan untuk menghindarkan diri dari penarikan pajak ganda.

6). Teori Prestise.

Penggabungan perusahaan jenis ini tidak semata-mata karena faktor ekonomis, melainkan karena motivasi ingin meningkatkan prestise. Dengan melakukan penggabungan perusahaan, maka perusahaan yang menerima penggabungan akan bertambah besar dan hal ini akan meningkatkan prestise Direksi perusahaan yang bersangkutan.

3. Sejarah Singkat Perkembangan Penggabungan Perseroan Terbatas

a. Sejarah Penggabungan Perusahaan di Amerika Serikat

Perkembangan penggabungan perusahaan sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan diawali di Amerika Serikat, yang kemudian diikuti di negara-negara lainnya, termasuk di Indonesia. Secara historis pelaksanaan penggabungan perusahaan atau merger di Amerika Serikat tersebut dikategorikan ke dalam berbagai periode, yang masing-masing periode menunjukkan karakteristik tersendiri dari merger tersebut. Secara historis perkembangan praktek merger dalam lintasan sejarah hukum di Amerika Serikat ini dapat dibagi dalam beberapa periode, yang dikenal dengan gelombang merger (merger wave), yaitu:¹⁶

1) Gelombang Pertama (1897-1904)

Gelombang pertama merger muncul pertama kali setelah masa depresi tahun 1883, mencapai puncaknya antara tahun 1898 dan 1902, serta berakhir pada

¹⁶ Patrick A. Caughan, op. cit, hal. 18.

tahun 1904. Meskipun merger yang terjadi pada periode ini sebagian besar didominasi oleh industri pertambangan dan manufaktur, tetapi juga ada beberapa industri lain, seperti *metals*, produk makanan dan perminyakan. Gelombang pertama merger ini menjadikan merger horizontal sebagai ciri utamanya, dan pada gelombang ini telah melahirkan perusahaan-perusahaan raksasa yang beraset lebih dari US \$ 1 miliar, yakni US Steel, American Tobacco, dan Eastman Kodak.

Pada masa ini para raksasa dunia bisnis di Amerika Serikat membentuk *trust* secara besar-besaran dengan jalan menyatukan atau menggabungkan perusahaan-perusahaan saingannya, sehingga kemudian mereka dapat menguasai pasar. Salah satu contohnya adalah *trust* di bidang perminyakan yaitu Standard Oil milik Rockefeller yang dibentuk melalui merger horizontal, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dan bersaing dalam kegiatan usaha yang sama. Dan sebagai hasilnya Standard Oil berkembang menjadi besar dengan lingkup kegiatan mulai dari hulu hingga ke hilir, dan karenanya kemudian Standard Oil mampu menguasai 80 persen pangsa pasar eksplorasi, eksploitasi, pengilangan, pengangkutan, dan pemasaran minyak.¹⁷

Merger gelombang pertama ini kemudian mencapai antiklimaks pada tahun 1911 ketika Mahkamah Federal Amerika Serikat memvonis Rockefeller untuk membubarkan dan memecah Standard Oil menjadi beberapa perusahaan. Dalam periode gelombang ini, perangkat undang-undang antimonopoli, berupa *the Sherman*

¹⁷ Muchyar Yara, op. cit, hal. 15.

Act dikeluarkan pada tahun 1911 dan kemudian diperkuat dengan lahirnya *Clayton Act* dan *Federal Trade Commission (FTC) Act* pada tahun 1914.¹⁸

2) Gelombang Kedua (1916-1929)

Perbedaan utama antara merger gelombang pertama dan merger gelombang kedua, menurut pendapat George Stigler, pemenang Nobel di bidang ekonomi adalah sebagai "*merging for monopoly versus merging for oligopoly*".¹⁹

Pada merger gelombang kedua ini ditandai dengan menjamurnya praktek merger vertikal, yaitu penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam bidang barang atau jasa yang sama, tetapi berbeda dalam jenis atau tingkatan operasinya.

Tujuan praktis dari merger vertikal ini adalah untuk menjamin stabilitas pengadaan bahan-bahan yang diperlukan bagi kegiatan produksi, atau untuk meningkatkan kelancaran pemasokan barang dan jasa kepada konsumen.²⁰

3) Gelombang Ketiga (1965-1969)

Sebelum merger gelombang ketiga, sebenarnya pada tahun 1940-an peristiwa merger yang terjadi adalah sebagian perusahaan-perusahaan besar

¹⁸ Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), *Mergers & Acquisitions in Indonesia*, PDBI, Jakarta, 1996, hal. 24.

¹⁹ Patrick A. Caughan, op. cit, hal. 23.

²⁰ Muchyar Yara, op. cit, hal. 17.

mengambil alih atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil dengan alasan untuk kepentingan perpajakan (tax relief).²¹

Merger gelombang ketiga, dilakukan bukan dengan cara horizontal ataupun vertikal, tetapi merger yang dilakukan dalam bentuk diversifikasi usaha dan akuisisi perusahaan ke segala arah.²² Contoh yang konkrit ialah perusahaan ITT yang bergerak di bidang telekomunikasi kemudian melakukan diversifikasi usaha ke bidang perhotelan, asuransi dan sebagainya yang semula bukan merupakan bisnis intinya.

Pada masa ini mulai dipraktekkan merger konglomerat, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tidak ada hubungan atau kesamaan dan kegiatan usahanya masing-masing.²³

Adapun tujuan dilaksanakan merger ini adalah untuk mendorong perluasan perusahaan melalui diversifikasi usaha dan resiko, dimana diharapkan bilamana salah satu kegiatan usaha menurun dan kegiatan usaha lainnya justru menanjak, maka secara keseluruhan kinerja perusahaan yang bersangkutan tetap stabil.

²¹ Patrick A. Caughan, op. cit, hal. 26.

²² Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), op. cit, hal. 25.

²³ Muchyar Yara, op. cit, hal. 17.

4) Gelombang Keempat (1981-1989)

Karakteristik yang khusus melanda merger gelombang keempat ini adalah *hostile merger* atau juga *hostile takeover*. Pada periode ini sebenarnya sedang berlangsung dekonglomerasi karena konglomerat yang terlalu gegabah dalam melakukan ekspansi ke segala arah telah mengalami kesulitan dan kemudian sebagian besar kembali berspesialisasi kepada *core business*-nya.²⁴

Dalam pada itu, selama satu dekade terakhir ini di Amerika Serikat, jumlah dan skala merger, khususnya bank meningkat pesat, sebagai respons terhadap regulasi di bidang perbankan sejak awal tahun 1980-an. Selama tahun 1980-1984, di Amerika Serikat telah terjadi 6.347 peristiwa merger antar bank, termasuk beberapa mega merger (merger besar beraset di atas 1 miliar dollar Amerika Serikat). Pelaksanaan merger yang terbesar adalah yang terjadi antara *Chemical Corp.-Manufacturers Hanovers* dan *Bank America – Security Pacific*.²⁵

b. Sejarah Penggabungan Perusahaan di Indonesia

Sebenarnya praktek restrukturisasi perusahaan dalam berbagai bentuk sudah cukup dikenal lama di Indonesia meskipun tidak ada data yang dapat mengungkapkan secara tepat sejak kapan hal tersebut mulai dilaksanakan. Hanya saja dapat diketahui bahwa seiring dengan tindakan Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda pada akhir dasawarsa tahun 1950-an, maka

²⁴ Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), op. cit, hal. 26.

²⁵ Muhammad Ikhsan, *Bank Pemerintah*, Gatra, 10 Januari 1998, Jakarta, hal. 31.

Pemerintah Indonesia melakukan langkah “bongkar-pasang” atas semua perusahaan milik negara yang semula tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan.²⁶

Praktek bongkar pasang ini, sebagaimana dikemukakan oleh Christianto Wibisono dari Pusat Data Bisnis Indonesia, adalah pada zaman Manipol-dulu yang sering dibongkar pasang ialah perusahaan negara yang bergerak di bidang perdagangan dan perkebunan. Oleh karena proses nasionalisasi yang mendadak atas perusahaan Belanda di akhir tahun 1950-an, Pemerintah Indonesia yang berkiblat kepada sistem ekonomi sosialis menganut pola sektoral. Perusahaan negara dikelompokkan menurut sektor dan produk barang serta jasa yang dihasilkannya.²⁷

Kebijakan perekonomian di atas telah mengakibatkan pemerintah melakukan restrukturisasi perusahaan, baik dengan cara nasionalisasi, peleburan atau dengan memisah-misahkan dari perusahaan-perusahaan tersebut menjadi perusahaan-perusahaan negara yang berdiri sendiri-sendiri berdasarkan sektor usahanya, seperti The Big Five Trading Houses milik Belanda, yaitu Borsumij, Geo Wehry, Internatio, Jacoberg dan Lindeteves, dipisah-pisahkan unsur perkebunan dan industrinya untuk kemudian digabungkan menjadi perusahaan negara perkebunan dan perusahaan negara industri yang berdiri sendiri-sendiri.

Merger sebagai salah satu cara penyatuan perusahaan, baru mulai dipraktekkan di Indonesia pada awal dasawarsa tahun 1970-an, yaitu sejak

²⁶ Christianto Wibisono, *Masalah Merger dan Akuisisi di Indonesia*, Bisnis Indonesia, 19 Desember 1991.

²⁷ Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), loc. cit.

dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.614/MK/II/8/1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Kepada Bank-Bank Swasta Nasional yang melakukan Penggabungan (Merger). Ketentuan ini mengakibatkan banyak bank swasta nasional yang melakukan merger. Tujuan merger bank pada saat itu adalah untuk menghasilkan peningkatan modal, perencanaan, dan pengawasan finansial yang lebih baik serta aplikasi teknologi dan manajemen perbankan yang lebih profesional.²⁸

Meningkatnya praktek merger di Indonesia pada saat itu belum diimbangi oleh kemajuan hukum di bidang ekonomi, hal tersebut diketahui dari belum adanya peraturan hukum tentang merger yang berlaku umum dan secara relatif lengkap di Indonesia.²⁹

Kalaupun ada ketentuan hukum yang mengatur tentang merger, maka hanya terbatas berkenaan dengan merger di kalangan dunia perbankan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 278/KMK.01/1989 tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/15/BPPP perihal Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat, keduanya tertanggal 25 Maret 1989.³⁰

²⁸ Muchyar Yara, op. cit, hal. 18.

²⁹ Harmanto Edy Djatmiko dan Gde Suardhika, *Kasus Merger: Yang Membesar dan Makin Kokoh*, Swasembada VII, Jakarta, Agustus 1991, hal. 28-30.

³⁰ A. Zen Umar Purba, *Merger dan Akuisisi: Praktek dan Kebutuhan Akan Pengaturan*, Hukum dan Pembangunan Nomor 1, Tahun XXII, Februari 1992, hal. 33-34.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 278/KMK.01/1989 tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha Bank tersebut di atas, kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, secara hukum Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, maka pelaksanaan merger bank, baik yang menyangkut persyaratan maupun tata caranya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.

Sedangkan merger yang dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha non bank sepenuhnya berdasarkan praktek hukum yang tumbuh sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, yang dilandasi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³¹

Menyadari bahwa selama ini praktek merger belum diatur secara memadai, maka Pemerintah kemudian memasukkan peraturan tentang merger yang bersifat umum, sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan mencantumkan pada Bab VII dengan judul

³¹ Muchyar Yara, op. cit, hal. 20.

“Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan” mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan tonggak sejarah tentang hukum merger, karena Undang-Undang tersebut mulai mengatur merger secara cukup komprehensif dalam tingkat undang-undang.

Dilihat dari sejarah perkembangan penggabungan perusahaan di Indonesia, dapat dibagi dalam 2 periode sebagai berikut :

1) Periode sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Sejarah perkembangan hukum penggabungan perusahaan di Indonesia masih terbilang baru. Dalam tingkat undang-undang pengaturan merger di Indonesia baru dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perseroan Terbatas, namun demikian tidak berarti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut merger tidak pernah dilakukan di Indonesia, sebab dalam kenyataannya praktek merger di Indonesia sudah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang mana hal tersebut dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

³² Ibid, hal. 21.

2) Periode Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Berbeda dengan pengaturan merger sebelumnya yang masih bersifat sektoral dan pada tingkat dibawah Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur merger relatif komprehensif. Praktek merger pada era setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dapat dicatat dalam sejarah hukum bisnis sebagai era kepastian hukum bagi tindakan merger.³³

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam pasal-pasal tentang Perseroan Terbatas tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai merger, akuisisi dan konsolidasi, dan baru pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai hal tersebut diatur, yaitu mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 dan Pasal 76 yang mengatur mengenai qourum dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk merger, akuisisi dan konsolidasi.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menggunakan istilah “Penggabungan” untuk merger, “Pengambilalihan” untuk akuisisi, dan istilah “Peleburan” untuk konsolidasi.

Pengaturan mengenai merger dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut memang belum cukup lengkap mengatur seluruh aspek yang berkaitan

³³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.

dengan merger. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 108, kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur secara lengkap dan rinci mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan penggabungan (merger), baik yang menyangkut persyaratan, tatacara, maupun saat berlakunya sampai dengan pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan penggabungan (merger) Perseroan Terbatas.

4. Bentuk-Bentuk Penggabungan Perseroan Terbatas.

Ditinjau dari bentuknya, merger dapat dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu merger berdasarkan jenis kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, merger berdasarkan status hukumnya, dan merger berdasarkan sikap direksi dari perusahaan yang akan digabungkan.

a. Bentuk-Bentuk Merger Ditinjau Dari Sudut Jenis Kegiatan Usaha Perusahaan-perusahaan yang Terlibat

Bentuk merger dalam kelompok yang pertama ini dapat dibagi atas:

1) Merger Horizontal

Merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai jenis dan tingkat kegiatan usaha yang sama, dan

sebelumnya justru saling bersaing di dalam memproduksi barang/jasa yang sama atau menjual/memasarkan barang atau jasa yang sama dalam suatu wilayah pemasaran.³⁴

Contoh dari merger horizontal ini adalah antara lain merger antara Bank Abadi Jaya yang bergabung ke dalam Bank Panin, atau antara American Motors yang bergabung ke dalam Chrysler pada tahun 1987.³⁵

Dalam merger horizontal terjadi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam bidang bisnis "*line of business*" yang sama dan memproduksi atau menjual barang yang sama atau menjual barang substitusi yang paling mirip satu sama lain, sehingga dalam merger horizontal paling tidak ada karakteristik, yaitu bahwa perusahaan tersebut bergerak dalam bisnis yang sama, seperti misalnya penggabungan antara 2 (dua) perusahaan yang bergerak dalam bidang industri mie instant.

Tujuan utama dari merger horizontal ini adalah untuk mewujudkan efisiensi dalam produksi, promosi dan memasuki pasar yang sudah mapan.

2) Merger Vertikal

Merger vertikal yaitu merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda tingkat operasinya, tetapi bergerak di dalam bidang atau jenis usaha yang sejenis.³⁶

³⁴ Henry Campbell Black, op. cit, hal. 892.

³⁵ Muchyar Yara, op. cit, hal. 30.

³⁶ Ibid, hal. 30.

Sedangkan Black's Law Dictionary mengartikan merger vertikal sebagai *"Merger between two firm that have a buyer-seller relationship that is, one produce a product that is then sold to the other"*.³⁷

McCarty dan Bagby merumuskan bahwa merger vertikal adalah sebagai *"combine firms that stand in a supplier-customer relationship along the same chain of distribution"*.³⁸

Dalam merger vertikal terjadi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan pada tingkat produksi yang berbeda, namun mempunyai saling keterkaitan. Merger vertikal dapat dilakukan baik ke bawah maupun ke atas. Merger vertikal yang dilakukan ke bawah, sebagai misal perusahaan yang bergerak dalam bidang industri sepatu melakukan merger dengan distributornya. Sedangkan merger yang dilakukan ke atas, misalnya perusahaan yang bergerak bidang industri sepatu melakukan merger terhadap perusahaan yang memasok bahan baku dari produk yang dihasilkan. Sehingga hubungan perusahaan yang melakukan merger merupakan hubungan produser-supplier atau hubungan dari hulu ke hilir.

Dengan demikian merger vertikal dilatarbelakangi tujuan untuk menjamin pengadaan yang berkesinambungan atas bahan baku yang dibutuhkan bagi kegiatan produksi, atau menjamin jalur pemasaran atas barang dan jasa, atau juga untuk menekan biaya produksi dan pemasaran.

³⁷ Henry Champbell Black, op. cit, hal. 1401.

³⁸ F. William McCarty dan John W. Bagby, op. cit, hal. 521.

3) Merger Konglomerat

Merger konglomerat adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai hubungan, baik dalam arti horizontal (jenis usaha dan tingkat operasi kegiatan yang sama) maupun dalam arti yang vertikal (jenis usaha yang sama tetapi berbeda dalam tingkat operasi kegiatan).³⁹

Merger konglomerat ini mempunyai tujuan untuk memperkecil resiko karena keharusan diversifikasi dan memperkecil ketergantungan perusahaan terhadap satu atau beberapa bidang produksi. Sebagai contoh dari merger konglomerat adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri rokok melakukan merger dengan perusahaan bank. Maksudnya jika ada kemunduran usaha di bidang jenis perusahaan tertentu masih ada usaha lain yang masih tetap sehat.

Merger konglomerat ini dibedakan dalam 3 (tiga) jenis⁴⁰, yaitu Merger Perluasan Pasar Geografis (*geographic market-extention mergers*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai kaitan satu dengan lainnya baik horizontal maupun vertikal, tetapi masing-masing perusahaan mempunyai jaringan pemasaran di daerah yang berbeda guna memperluas pangsa pasar. Merger Perluasan Produk (*product extention mergers*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai kaitan satu dengan lainnya baik horizontal maupun vertikal, tetapi masing-masing perusahaan bergerak di bidang produksi

³⁹ Muchyar Yara, op. cit, hal. 30.

⁴⁰ Ibid, op. cit, hal. 31-32.

barang/jasa yang berbeda. Sedangkan jenis yang ketiga adalah Merger Konglomerat Murni (Pure Conglomerat Mergers) yaitu merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dimana perusahaan yang bergabung tersebut tidak mempunyai kaitan satu dengan lainnya dan dilaksanakan semata-mata untuk tujuan perluasan usaha perusahaan penerima penggabungan tanpa memperhatikan hal-hal khusus yang melekat pada perusahaan yang digabungkan.

b. Bentuk-Bentuk Merger Ditinjau Dari Sudut Status Hukumnya

Bentuk merger ditinjau dari sudut hukumnya dapat dibedakan atas "*Statutory Mergers*" yaitu merger yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih secara sah dan tuntas berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang maupun berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan "*De-facto mergers*" yaitu merger yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih tanpa didukung oleh peraturan hukum yang berlaku di tempat perusahaan-perusahaan yang terlibat merger tersebut berdomisili.⁴¹

Pada bentuk "*Statutory Mergers*", salah satu perusahaan penerima penggabungan (*absorbing company*) tetap hidup dan melanjutkan aktivitasnya secara sah menurut hukum yang berlaku di tempat perusahaan-perusahaan yang terlibat merger itu berdomisili dan secara otomatis berhak atas segala asset, kewajiban dan utang dari perusahaan-perusahaan yang digabungkan (*absorbed company*) yang

⁴¹ Ibid, op. cit, hal. 33.

menjadi hilang status dan identitasnya sebagai perusahaan, sedangkan pada bentuk "*De-facto Mergers*" meskipun perusahaan penerima penggabungan (*absorbing company*) telah menguasai sebagian besar asset, hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan yang digabungkan (*absorbed company*), namun perusahaan yang digabungkan secara hukum tetap dianggap masih hidup dan mempunyai kedudukan yang penuh sebagai perusahaan yang mandiri. Bentuk merger ini dapat diartikan sebagai "Akuisisi Asset".

c. Bentuk-Bentuk Merger Ditinjau Berdasarkan Sikap Direksi Perusahaan Yang Akan Digabungkan

Bentuk merger dalam kelompok ini dapat dibagi atas "*Agreed Merger*" dimana direksi perusahaan yang akan digabungkan sejak awal menyetujui dilakukan merger, bahkan adakalanya direksi perusahaan tersebut mengusulkan dan mendorong agar perusahaan yang akan menerima penggabungan tertarik untuk melakukan merger. "*Unopposed Merger*" yaitu dimana direksi perusahaan yang akan digabungkan tidak menolak rencana penggabungan perusahaan, tetapi juga tidak berinisiatif mendorong perusahaan yang menerima penggabungan untuk melakukan merger. Sedangkan bentuk yang ketiga dari merger kelompok ini adalah "*Defended Merger*" yaitu direksi perusahaan yang akan digabungkan sejak awal menolak rencana merger, bahkan berusaha mencegah terjadinya merger, dan bentuk yang keempat dari merger kelompok ini adalah "*Competitive Merger*" yaitu dimana direksi perusahaan yang akan digabungkan menghadapi lebih dari satu tawaran untuk

melakukan penggabungan dari dua atau lebih perusahaan yang akan menerima penggabungan, sehingga direksi mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan yang paling menguntungkan.⁴²

5. Tujuan Penggabungan Perseroan Terbatas

Dalam menghadapi persaingan yang makin lama makin tajam di dunia bisnis, terlebih lagi dalam era globalisasi dewasa ini, perusahaan-perusahaan berupaya mencari jalan untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerjanya sehingga tercipta suatu iklim berusaha yang kondusif, sehat dan efisien.

Iklim usaha yang kondusif, sehat dan efisien memungkinkan Perseroan Terbatas sebagai salah satu pelaku usaha dalam menggerakkan dan mengarahkan kegiatan di bidang ekonomi dapat tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis dengan perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang sangat cepat. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Perseroan Terbatas dalam pengembangan usahanya adalah dengan melakukan merger.

Tujuan utama suatu Perseroan Terbatas melakukan merger adalah untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Dengan adanya tambahan sinergi perusahaan yang diperoleh dari merger tersebut, maka diharapkan dapat menyembuhkan perusahaan yang sedang sakit dalam waktu relatif singkat, sehingga dengan alasan itu pula perusahaan yang memerlukan penyembuhan segera, seperti bank misalnya dianjurkan untuk melakukan merger.

⁴² Ibid, op. cit, hal. 34.

Tambahan sinergi bagi Perseroan Terbatas yang melakukan merger, menurut Munir Fuady, berasal dari adanya beberapa keuntungan yang diperoleh dari merger tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Perkembangan Pasar.

Dengan merger dan akuisisi dimaksud untuk memperluas pangsa pasar. Dalam hal ini, baik untuk menghasilkan mata rantai produksi yang lengkap, maupun untuk memperluas distribusi produk dalam satu area, atau memperluas area distribusi.

b. Penghematan Distribusi

Sistem distribusi tunggal, termasuk tetapi tidak terbatas pada salesman, dealers, retail outlets dan transportation facilities, seringkali dapat menangani dua produk yang mempunyai metode distribusi/market yang serupa, dengan menghemat biaya daripada mereka hanya menangani produk tunggal.

c. Diversifikasi

Hal ini dimaksudkan untuk mengelak dari risiko penempatan semua telur ayam dalam satu keranjang, dimana bisa jadi telur atau pecah semua. Karena itu, diadakanlah penganeekaragaman jenis usaha untuk meminimalkan risiko terhadap pasar tertentu dan/atau untuk dapat berpartisipasi pada bidang-bidang yang baru tumbuh.

d. Keuntungan Manufaktur

Banyak keuntungan dapat dipetik dengan menggabungkan dua unit manufaktur atau lebih. Biasanya segi-segi kelemahan dapat diperkuat, overcapacity dapat dihilangkan, dan overhead dapat dikurangi. Dan problem-problem yang bersifat temporer karenanya dapat dipecahkan.

e. Riset and Development (R & D)

Biaya-biaya R & D dapat dikurangi dengan terbukanya kesempatan untuk menggunakan laboratorium bersama, pendidikan bersama, dan sebagainya.

f. Pertimbangan Finansial

Dalam hal ini, untuk meningkatkan earning per share dan memperbaiki image di pasar dan mencapai stabilitas dan sekuriti finansial.

g. Pemanfaatan Excess Capital

Excess capital masing-masing perusahaan dapat saling dimanfaatkan.

h. Pertimbangan Sumber Daya Manusia

Bagi perusahaan yang kekurangan/mempunyai kelemahan di bidang SDM dapat dibantu oleh perusahaan lain yang SDM nya lebih baik.

i. Kecanggihan dan Otomatisasi

Perkembangan bisnis menuju kepada penggunaan sarana yang semakin canggih dan otomatisasi. Untuk itu diperlukan biaya tinggi dan kemampuan SDM yang tangguh. Perusahaan-perusahaan kecil akan sulit mengikuti perkembangan ini kecuali dengan membesarkan diri, antara lain dilakukan dengan merger dan akuisisi.⁴³

Dengan melihat keuntungan-keuntungan yang diperoleh apabila suatu Perseroan Terbatas melakukan merger dengan Perseroan lainnya, selain memperoleh tambahan sinergi, Perseroan Terbatas yang melakukan merger mempunyai sasaran lain, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

a. Untuk Meningkatkan Konsentrasi Pasar

Apabila perusahaan besar yang melakukan merger dengan perusahaan sejenis atau dengan perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, maka pasar cenderung lebih terkonsentrasi. Untuk itu, rambu-rambu hukum anti monopoli mesti diwaspadai. Akan tetapi apabila merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil, menyebabkan perusahaan tersebut menjadi lebih besar, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang memang sudah duluan besar. Hal ini akan mengurangi konsentrasi pasar oleh satu atau lebih perusahaan besar saja.

b. Untuk Meningkatkan Efisiensi

Merger dua atau lebih perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, efisiensi dalam produksi atau efisiensi dalam pemasaran, dan penghematan *overhead cost*. Banyak biaya dapat dipotong, atau bahkan banyak tenaga kerja dapat dikeluarkan dalam memproduksi produk yang sama dengan sebelum merger dilakukan. Akan tetapi, dengan merger, dimana perusahaan menjadi semakin besar dan pesaing di pasar semakin berkurang, dapat menyebabkan pola persaingan pasar menjadi tidak tajam. Hal ini dapat juga mengarah kepada tidak efisiennya perusahaan yang bersangkutan.

⁴³ Munir Fuady, op. cit, hal. 54-55.

⁴⁴ Ibid, hal. 57-59.

c. Untuk Mengembangkan Inovasi Baru

Memang dengan dilakukan merger, perusahaan menjadi besar sehingga riset dan pengembangan dapat dikembangkan secara cangguh. Hal tersebut dapat mendorong untuk timbulnya inovasi baru dalam menghasilkan produk-produk dari perusahaan yang bersangkutan. Akan tetapi apabila perusahaan sudah terlalu besar dan tidak atau kurang persaingannya di pasar, bisa juga menyebabkan perusahaan tersebut akan tetap mempertahankan produk yang sudah ada apa adanya, sehingga mengurangi semangat untuk mendapatkan inovasi baru.

d. Sebagai Alat Investasi

Terutama bagi merger yang memerlukan pembayaran sejumlah dana merupakan alat untuk investasi bagi perusahaan yang menggabungkan diri tersebut. Apabila perusahaan yang menggabungkan diri tersebut merupakan perusahaan asing atau perusahaan campuran asing, maka investasi tersebut dapat dipandang sebagai suatu investasi asing. Dan jika nanti investasi tersebut dapat kembali (divestasi), maka diharapkan akan didapat banyak *capital gain* dari merger tersebut.

e. Sebagai Sarana Alih Teknologi

Jika terjadi merger, perusahaan yang satu dapat menimba pengalaman dan teknologi dari perusahaan yang lain. Dengan demikian merger dapat merupakan sarana pengalihan teknologi.

f. Untuk Mendapatkan Akses Internasional

Biasanya tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk sampai mendapatkan akses ke pasar internasional. Untuk itu dapat ditempuh dengan merger dengan suatu perusahaan asing sehingga pasar dari perusahaan asing tersebut dapat diakses.

g. Untuk Meningkatkan Daya Saing

Telah disebutkan bahwa merger suatu perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan melakukan inovasi-inovasi. Hal tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan daya saingnya, misalnya daya saing ekspor maupun impor.

h. Untuk Memaksimalkan Sumber Daya

Dengan merger, maka sumber daya yang ada di dua atau lebih perusahaan yang bergabung dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di samping itu, dapat pula dilakukan pengurangan duplikasi dan memaksimalkan penggunaan aktiva yang menganggur, sehingga produksinya dapat didorong secara maksimal.

i. Untuk Menjamin Pasokan Bahan Baku

Khususnya terhadap merger vertikal, yakni merger antara perusahaan hulu dengan hilir, maka merger seperti ini dapat menjamin tersedianya bahan baku karena mempunyai perusahaan pemasok bahan bakunya sendiri.

Sedangkan menurut Joseph Krallinger dalam bukunya "*Merger & Acquisition: Managing The Transaction*" sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, adalah merger, konsolidasi dan akuisisi Perseroan Terbatas dilakukan untuk tujuan-tujuan dan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan *barriers of market entry* bagi calon pesaing yang akan muncul.
- b. Menyingkirkan perusahaan pesaing dengan menjadikan perusahaan pesaing itu sebagai sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi.
- c. Membeli *product line* atau *lines* untuk melengkapi product lines dari perusahaan yang akan mengambilalih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada product lines atau service lines yang ada pada saat itu.
- d. Untuk memperoleh akses pada teknologi baru teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi.
- e. Memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang tidak dimilikinya namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi.
- f. Membeli kantor-kantor (manufacturing, distribution, sales, administrative offices) dan membeli fasilitas dan perlengkapan lain dari perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi untuk meningkatkan kapasitas.
- g. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dipunyai oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi.
- h. Memperoleh bisnis yang belum dipunyai namun dipunyai oleh perusahaan yang sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi.
- i. Memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi.

- j. Memperkuat kualitas dan keahlian atau menambah jumlah sumber daya manusia dari perusahaan yang bersangkutan dengan sumber daya manusia dari perusahaan lain yang menjadi sasaran merger, konsolidasi dan akuisisi.
- k. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak dipakai (idle).⁴⁵

Sementara itu A. Zen Umar Purba berpendapat bahwa tujuan penggabungan Perseroan Terbatas adalah untuk :⁴⁶

- a. Memperbaiki manajemen perusahaan sehingga dapat meningkatkan profitability perseroan yang bergabung.
- b. Menghambat persaingan, yaitu jumlah perseroan yang bersaing berkurang sehingga kebijaksanaan dipegang oleh suatu kelompok tertentu yaitu perseroan yang mengambil alih.
- c. Mempertahankan kesinambungan usaha.
- d. Memperbesar bagian pangsa pasar sekelompok perseroan.
- e. Memperkuat sumber pemasukan barang.

6. Dasar Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas

Dalam negara hukum, setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan haruslah mempunyai dasar hukum. Demikian juga perbuatan hukum berupa penggabungan perusahaan yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum perusahaan tersebut. Secara yuridis yang merupakan dasar hukum bagi tindakan merger tersebut adalah sebagai berikut :

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Upaya Penyehatan Perusahaan*, Makalah Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Tanggal 10-11 September 1997.

⁴⁶ A. Zen Umar Purba, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat Dalam Bisnis*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun XXV, Nomor 1, Februari 1995, FH-UI, Jakarta, hal. 9.

a. Dasar Hukum Utama

Yang menjadi dasar hukum utama bagi suatu merger Perseroan terbatas adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 dan Pasal 76 mengenai quorum Rapat Umum Pemegang Saham untuk penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Selain pasal-pasal tersebut, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, pemerintah pada tanggal 24 pebruari 1998 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, namun dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya khusus mengatur penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bagi perusahaan tanpa dilakukan tindakan likuidasi terlebih dahulu.

b. Dasar Hukum Merger Di bidang Perbankan

Usaha perbankan pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, maka tindakan merger, konsolidasi dan akuisisi bank selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksananya sebagai "*Lex generalis*", juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan serta berbagai Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Perbankan, baik yang mencakup dalam paket kebijakan maupun tidak.

Sebagaimana disinggung di atas, maka dapat diuraikan dasar hukum penggabungan usaha di bidang perbankan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Bab VII, Pasal 102 sampai dengan Pasal 109)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (bagi Bank yang sudah go public)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Bab II, Pasal 15 sampai dengan Pasal 20).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- 7) Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- 8) Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.

c. Dasar Hukum Kontraktual

Sebagaimana diketahui bahwa tindakan penggabungan Perseroan Terbatas sebenarnya tidak lain adalah merupakan suatu “perjanjian”, oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum tentang perjanjian atau ketentuan-ketentuan tentang perikatan sebagaimana terdapat dalam Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap penggabungan perusahaan.

Dalam Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua macam ketentuan yang berlaku terhadap suatu penggabungan perusahaan, yaitu sebagai berikut: ⁴⁷

1) Ketentuan Tentang Perikatan Pada Umumnya

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian penggabungan perusahaan atau dengan kata lain tidak ada satu pasalpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbicara tentang perjanjian penggabungan, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku ke-III terdapat ketentuan umum tentang perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jenis perjanjian, termasuk perjanjian penggabungan perusahaan. Ketentuan umum mengenai perikatan ini diatur mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, misalnya mengenai syarat sahnya perjanjian, kekuatan berlakunya perjanjian, akibat hukum dari

⁴⁷ Munir Fuady, op. cit, hal. 74..

perjanjian, macam-macam perjanjian, hapusnya perikatan semuanya berlaku juga untuk suatu perjanjian penggabungan perusahaan.

2) Ketentuan Tentang Perjanjian Jual Beli

Dalam perjanjian penggabungan perusahaan seringkali dijumpai adanya jual beli saham. Dalam perjanjian jual beli saham tersebut disamping berlaku ketentuan umum tentang perikatan sebagaimana tercantum dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku juga ketentuan khusus mengenai jual beli yang tercantum mulai dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pelaksanaan penggabungan antara dua perusahaan atau lebih selain sering dijumpai adanya jual beli saham, sering pula ditemui adanya inbreng saham bersama-sama dengan atau sebagai gantinya jual beli saham sehingga dalam penggabungan perusahaan sering ditemukan adanya perjanjian inbreng.

d. Dasar Hukum Merger Sehubungan Dengan Status Perusahaan

Dasar hukum penggabungan bagi perusahaan yang mempunyai status khusus, misalnya Perseroan Terbatas dengan status terbuka atau "*go public*", Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing serta Perseroan Terbatas yang berupa perusahaan Badan Usaha Milik Negara, selain didasarkan pada dasar hukum utama dan dasar hukum kontraktual juga berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan status perusahaan tersebut.

1) Peraturan di Bidang Pasar Modal

Jika salah satu atau lebih dari Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan perusahaan merupakan perusahaan terbuka, maka untuk melaksanakan penggabungan perusahaan tersebut perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi perusahaan terbuka yang akan melakukan penggabungan adalah sebagai berikut:⁴⁸

(a). Prosedur

Jika penggabungan Perseroan Terbatas terlibat satu atau lebih perusahaan terbuka, maka diperlukan prosedur khusus untuk itu yang agak berbeda dengan prosedur penggabungan untuk perusahaan biasa maupun perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, karena untuk penggabungan perseroan terbuka banyak instansi yang terlibat, mulai dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal atau Bank Indonesia. Di antara prosedur khusus yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan penggabungan dimana salah satu atau lebih diantaranya adalah perseroan terbuka adalah jika ada pengisuan saham baru, tidak perlu dilakukan prosedur biasa lewat "*right issue*". Di samping itu jika salah satu atau lebih di antara perusahaan yang akan penggabungan merupakan perusahaan terbuka

⁴⁸ Munir Fuady, op. cit, hal. 76-78.

maka yang mesti hidup adalah perusahaan terbuka tersebut, tetapi jika yang hidup bukan perusahaan terbuka, maka perlu dilakukan proses "*going private*".

(b). Keterbukaan Informasi

Sebagaimana diketahui bahwa bagi perusahaan terbuka, keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat penting dan merupakan faktor yang dominan dalam pengaturan hukum mengenai pasar modal. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi perseroan terbuka yang menjalankan usaha dalam bidang perbankan ketika akan melakukan penggabungan perusahaan. Keterbukaan informasi pada perseroan terbuka yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-86/PM/1996, yang mana dalam keputusan tersebut juga mewajibkan adanya keterbukaan informasi bagi suatu perseroan terbuka melakukan penggabungan, dalam hal-hal sebagai berikut :

- (1). Merger harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal).
- (2). Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan lewat 2 (dua) surat Kabar (ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal).

- (3). Rancangan merger wajib diumumkan lewat 2 (dua) surat kabar paling lambat 14 hari sebelum Rapat umum Pemegang Saham (ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas).
- (4). Direksi hasil merger wajib mengumumkan hasil merger lewat 2 (dua) surat kabar paling lambat 30 hari setelah merger selesai dilakukan (ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas).
- (5). Karena tindakan merger termasuk informasi atau tindakan material menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Pasar Modal, maka ada kewajiban bagi emiten untuk segera melaporkan kepada Bappepam dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau diperolehnya informasi atau fakta material.

Ketentuan adanya keterbukaan informasi dimaksudkan untuk melindungi pemodal dari praktek yang merugikan pemodal dari tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, termasuk penyertaan yang melibatkan emiten atau perusahaan publik.

(c). Aspek Saham dan Pasar Sekunder

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan merger bagi perusahaan terbuka adalah aspek saham dan jual beli saham di pasar sekunder. Banyak yang harus dilakukan dalam hubungan dengan saham itu sendiri, misalnya melakukan penukaran saham dengan saham dari perusahaan yang masih eksis, pemusnahan

saham lama dan lain-lain masalah teknis yang berlaku di Bursa Efek dimana saham tersebut diperdagangkan.

(d). Aspek perlindungan Pemegang Saham Publik

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan suatu rambu-rambu agar dalam melakukan penggabungan perusahaan tidak boleh sampai merugikan pihak pemegang saham publik yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dalam perusahaan yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal banyak yang mengatur mengenai perlindungan kepada pemegang saham minoritas atau pemegang saham publik, antara lain sebagai berikut :

- (1).Keharusan keterbukaan.
- (2).Keharusan pemberlakuan asas “super majority” untuk Rapat umum Pemegang Saham yang menyetujui penggabungan (ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas).
- (3).Hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang layak (ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas).
- (4).Rapat Umum Pemegang Saham independen juga terjadi benturan kepentingan, misalnya terhadap merger dalam satu group perusahaan (ketentuan Undang-Undang tentang Pasar Modal).

- (5). Jika dengan merger terjadi penyertaan oleh perusahaan terbuka, maka saham dan aset perusahaan target harus diaudit dan dinilai secara profesional oleh penilai independen (ketentuan Undang-Undang tentang Pasar Modal).
- (6). Tindakan merger harus diumumkan kepada publik (ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas).

Ketentuan penggabungan bagi perusahaan publik atau emiten diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, dengan lampirannya yang dikenal peraturan Nomor IX.G.1. Prinsip-prinsip yang diatur dalam kedua peraturan tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

2) Peraturan Di bidang Penanaman Modal Asing Atau Penanaman Modal Dalam Negeri

Penggabungan perusahaan yang dilakukan oleh satu atau lebih dari perusahaan dimana satu atau lebih perusahaan yang melakukan penggabungan tersebut adalah perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, maka pelaksanaan penggabungan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.

Penggabungan perusahaan yang melibatkan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diperlukan ijin atau laporan dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan atau Presiden, jika akibat dari penggabungan tersebut salah satu atau lebih dari perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri:⁴⁹

- a) Berubah statusnya menjadi perusahaan penanaman modal asing/perusahaan penanaman modal dalam negeri atau perusahaan non fasilitas (non PMA/PMDN).
- b) Karena penggabungan, perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri dibubarkan atau dilikuidasi.
- c) Karena penggabungan, dalam perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri terjadi perubahan susunan pemegang saham, perubahan susunan direksi atau komisaris, penambahan atau pengurangan Direksi/Komisaris atau pekerja asing.
- d) Karena penggabungan terjadi perubahan lainnya dalam perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri seperti perubahan maksud dan tujuan atau perubahan anggaran dasar lainnya.

⁴⁹ Munir Fuady, op. cit, hal. 79

3) Peraturan Yang Berkenaan Dengan Badan Usaha Milik Negara

Penggabungan perusahaan yang apabila salah satu atau lebih perusahaan melakukan penggabungan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang akan melakukan merger adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a) Apakah penggabungan diperbolehkan untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang yang bersangkutan.
- b) Apakah boleh dilakukan penggabungan dengan perusahaan yang bergerak dibidang yang bersangkutan.
- c) Apakah penggabungan tersebut sesuai dengan policy dibidang swastanisasi BUMN dibidang yang bersangkutan.
- d) Perlu diperhatikan adanya perijinan atau pelaporan bagi tindakan penggabungan tersebut dari instansi terkait dalam hal ini Departemen Keuangan atau Presiden Republik Indonesia.

e. Peraturan Khusus Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penggabungan Perusahaan

Seperti diketahui bahwa penggabungan Perseroan Terbatas tidak hanya melibatkan sektor hukum perusahaan saja tetapi juga melibatkan beberapa sektor

hukum lainnya sebagai konsekuensinya. Sektor hukum yang terlibat dalam penggabungan perusahaan, antara lain sektor hukum ketenagakerjaan, sektor hukum pertanahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang subrogasi, novasi dan cessie, ketentuan hukum yang berhubungan dengan likuidasi perusahaan serta hukum anti monopoli atau persaingan usaha.

Sektor hukum ketenagakerjaan terlibat sebagai konsekuensi dari penggabungan Perseroan Terbatas, karena dalam pelaksanaan penggabungan, perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar dan perusahaan yang menerima penggabungan tetap eksis. Bubarnya Perseroan Terbatas yang menjadi target dari penggabungan perusahaan tersebut seringkali menyebabkan adanya rasionalisasi terhadap pekerja, Direksi atau bahkan Komisaris. Oleh karena itu penggabungan perusahaan akan melibatkan hukum ketenagakerjaan.

Selain melibatkan masalah ketenagakerjaan, dalam penggabungan Perseroan Terbatas seringkali melibatkan hukum pertanahan, karena dalam pelaksanaan penggabungan terjadi peralihan aset-aset dari perusahaan yang telah bubar kepada perusahaan yang tetap eksis. Salah satu pengalihan aset perusahaan yang paling krusial adalah pengalihan aset yang berupa barang tidak bergerak (misalnya tanah), karena dalam pengalihan tanah diperlukan adanya balik nama dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

⁵⁰ Munir Fuady, op. cit, hal. 79-80.

Bidang hukum lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas adalah ketentuan mengenai subrogasi, novasi dan cessie. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 613 (untuk cessie), Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1403 (untuk subrogasi) dan Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 (untuk novasi). Tindakan-tindakan hukum subrogasi, novasi dan cessie kemungkinan harus dilakukan dalam penggabungan perusahaan, karena penggabungan perusahaan yang tidak didahului oleh likuidasi (pengambilalihan) menurut ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, seluruh aktiva, pasiva dan pemegang saham dari perusahaan yang tidak eksis beralih demi hukum kepada perusahaan yang tetap eksis, tetapi jika dalam pelaksanaan penggabungan perusahaan terlebih dahulu dilakukan likuidasi, maka aktiva dan pasiva dari perusahaan yang tidak eksis tidak secara otomatis beralih kepada perusahaan yang masih eksis tersebut. Untuk mengalihkan tagihan dan kewajiban tertentu kepada pihak ketiga, perlu dilakukan tindakan hukum subrogasi, novasi atau cessie tersebut.

Penggabungan Perseroan Terbatas selain berhubungan dengan masalah-masalah tersebut di atas, tindakan penggabungan perusahaan sangat riskan terhadap terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini adalah wajar karena salah satu tujuan penggabungan Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan konsentrasi pasar. Dalam melaksanakan tujuan penguasaan pasar dapat menimbulkan praktek monopoli, maka dalam tindakan penggabungan Perseroan Terbatas perlu

adanya rambu-rambu untuk mencegah terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi serta kekuatan pasar "*market power*" menjadi semakin besar yang dapat mengancam pelaku usaha yang lebih kecil. Rambu-rambu sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam sebuah Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

7. Persyaratan Penggabungan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 merupakan tonggak baru tentang hukum penggabungan Perseroan Terbatas, dimana dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur penggabungan perusahaan secara cukup komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, meskipun sebelumnya secara sektoral sudah ada ketentuan tentang penggabungan ini dan pengaturannya masih di bawah Undang-Undang, misalnya tentang penggabungan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan.

Pengaturan mengenai penggabungan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Bab VII mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 dan Pasal 76 mengenai quorum rapat umum pemegang saham untuk penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pengaturan penggabungan Perseroan Terbatas di dalam pasal-pasal tersebut memang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan penggabungan perusahaan, akan tetapi baru mengatur hal-hal yang pokok saja, antara lain batasan pengertian penggabungan, rencana dan rancangan penggabungan, syarat-syarat penggabungan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rancangan penggabungan.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada. Rencana penggabungan dituangkan dalam rancangan penggabungan yang disusun bersama oleh Direksi masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan yang isinya memuat sekurang-kurangnya:

- a Nama perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- b Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan syarat-syarat penggabungan;
- c Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan;
- d Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan apabila ada;

- e Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- f Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

Penggabungan Perseroan Terbatas tersebut hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

Persetujuan atas rancangan penggabungan Perseroan Terbatas tersebut diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menentukan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Selain beberapa persyaratan tersebut di atas, penggabungan Perseroan Terbatas harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, dan jika pemegang saham minoritas menolak rencana penggabungan, pemegang saham minoritas diberikan hak untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar (Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

Selanjutnya rancangan penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dilampirkan pada permohonan perubahan anggaran dasar persetujuan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan apabila rancangan penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut disertai perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan anggaran dasar perseroan tersebut cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum, demikian pula dalam tindakan penggabungan Perseroan Terbatas akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari tindakan penggabungan Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menentukan bahwa dalam hal terjadi penggabungan, maka perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pembubaran tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.

Pembubaran perseroan akibat penggabungan Perseroan Terbatas apabila tidak didahului dengan likuidasi, maka sesuai ketentuan Pasal 107 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a Aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan; dan
- b Pemegang saham dari perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan.

Setelah proses penggabungan Perseroan Terbatas selesai dilaksanakan, menurut Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Direksi perseroan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah pada tanggal 24 Pebruari 1998 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas pada prinsipnya mengatur persyaratan dan tata cara proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut hanya

husus mengatur mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bagi perusahaan dimana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak dilakukan tindakan likuidasi terlebih dahulu, sebab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi.⁵¹

Syarat-syarat dari penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 pada prinsipnya sama seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Syarat-syarat tersebut terdapat pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4.

- (1). Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan;
 - b kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

⁵¹ Munir Fuady, op. cit, hal. 124-125..

- (2). Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- (3). Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan, peleburan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- (4). Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Pasal 5

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor.

Pasal 6

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

- (3) Bagi perseroan terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai syarat kehadiran dan pengambil keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas tersebut di atas sebagai ketentuan umum "*Lex Generalis*" dari perbuatan hukum penggabungan Perseroan Terbatas, maka tata cara dan persyaratan penggabungan Perseroan Terbatas harus mengacu kepada ketentuan umum tersebut. Meskipun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 pada Pasal 36 memberikan kemungkinan berlakunya tata cara dan persyaratan khusus penggabungan Perseroan Terbatas yang berbeda dengan ketentuan umum tersebut. Ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

"Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-

undangan lainnya yang mengatur secara khusus penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan”

Dari ketentuan Pasal 36 tersebut di atas, membuka peluang adanya peraturan-peraturan yang mengatur penggabungan Perseroan Terbatas secara khusus “*Lex Specialis*”, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/51/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/52/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sebelum penggabungan Perseroan Terbatas dilakukan, pihak yang melakukan penggabungan Perseroan Terbatas harus terlebih dahulu memperhitungkan berbagai hal, seperti memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

8. Tata Cara Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, tata cara pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas juga mengalami perkembangan yang sangat berarti, yaitu dari yang bersifat sederhana sampai yang sangat kompleks, dimana

perkembangan ini dipengaruhi bukan saja oleh hal-hal yang bersifat ekonomis, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan bidang hukum dan politik dari suatu negara.

Secara singkat metode atau tata cara pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas, dapat diuraikan sebagai berikut :⁵²

a. Metode Statutory Merger

Metode penggabungan ini dilaksanakan setelah sebelumnya ada kesepakatan antara perusahaan yang menerima penggabungan (absorbing company) dengan perusahaan yang menggabungkan diri (absorbed company) untuk melakukan penggabungan perusahaan dimana ketika penggabungan berlaku efektif, maka perusahaan yang menggabungkan diri menjadi hilang eksistensinya, dan perusahaan penerima penggabungan yang masih terus beroperasi termasuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menggabungkan diri sebelumnya. Sebagai akibatnya perusahaan penerima penggabungan juga menerima semua harta kekayaan, termasuk hak dan tanggung jawab dari perusahaan yang menggabungkan diri.

Selanjutnya pemegang saham pada perusahaan yang menggabungkan diri tersebut menerima kompensasi untuk menjadi pemegang saham pada perusahaan penerima penggabungan dan apabila perusahaan tersebut tidak mau menerima kompensasi, maka mereka berhak menerima uang tunai yang setara dengan nilai

⁵² Jesse H. Chopper & Melvin A. Eisenberg, *Gilbert Law Summaries "Corporations"*, Thirteenth Edition (Chicago: Harcourt Brace Legal and Professional Publications Inc), 1989-1990, hal. 180-187.

saham yang dimilikinya pada perusahaan yang menggabungkan diri. Cara ini disebut metode appraisal right.

b. Metode Cash Merger

Metode ini pada hakekatnya merupakan pengembangan dari metode pelaksanaan statutory merger, dimana pemegang saham pada perusahaan penerima penggabungan tidak menghendaki adanya peralihan saham, dengan masuknya pemegang saham dari perusahaan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham pada perusahaan penerima penggabungan, sehingga seluruh saham dikompensasikan dalam bentuk uang tunai.

c. Metode Triangular Merger

Penggabungan perusahaan ini dimulai oleh perusahaan yang akan menerima penggabungan dengan terlebih dahulu membentuk sebuah perusahaan baru sebagai anak perusahaan. Selanjutnya anak perusahaan tersebut yang akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan (absorbing company) dalam pelaksanaan penggabungan dengan perusahaan yang akan menggabungkan diri (absorbed company). Pemegang saham pada perusahaan yang menggabungkan diri selanjutnya diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk saham pada perusahaan induk. Adapun maksud dan tujuan dari metode ini adalah agar tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri tidak beralih ke perusahaan induk dari perusahaan penerima penggabungan, melainkan hanya beralih menjadi tanggung jawab anak perusahaan.

d. Metode Reserve Triangular Merger

Metode penggabungan ini merupakan kebalikan dari metode triangular merger, dimana perusahaan yang akan digabungkan membentuk anak perusahaan yang akan berfungsi sebagai perusahaan yang menggabungkan diri (absorbed company/target company). Sementara itu perusahaan induk dari target company dapat menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai dari perusahaan penerima penggabungan (absorbing company) atau dalam bentuk saham pada perusahaan penerima penggabungan (absorbing company).

Metode ini dilaksanakan dalam hal perusahaan yang akan digabungkan memiliki beberapa jenis kegiatan usaha yang berbeda, seperti misalnya perdagangan, industri, percetakan dan sebagainya. Sedangkan perusahaan yang menerima penggabungan (absorbing company) hanya berminat untuk menggabungkan satu atau beberapa jenis usaha yang dikelola oleh perusahaan yang akan digabungkan tersebut, misalnya usaha percetakan saja. Untuk itu perusahaan yang akan digabungkan mendirikan perusahaan baru yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, sehingga perusahaan baru tersebut berstatus sebagai anak perusahaan dan mengalihkan jenis usaha percetakan berikut seluruh asset yang berkaitan dengan usaha percetakan itu kepada perusahaan baru tersebut.

Setelah proses pendirian anak perusahaan selesai, baru dilaksanakan proses penggabungan dimana kemudian anak perusahaan tersebut berfungsi sebagai perusahaan yang menggabungkan diri (absorbed company/target company) ke dalam perusahaan penerima penggabungan (absorbing company). Selanjutnya setelah

penggabungan perusahaan selesai dilaksanakan, anak perusahaan yang menggabungkan diri (absorbed company/target company) dibubarkan, dan perusahaan induk dari perusahaan tersebut mendapat kompensasi dalam bentuk saham pada perusahaan penerima penggabungan (absorbing company) atau dalam bentuk uang tunai.

e. Metode Short-Form Merger

Metode ini dilaksanakan dalam hal penggabungan perusahaan dilakukan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya atau sebagian. Metode penggabungan ini terbagi atas dua jenis, yaitu Up Stream Merger dimana perusahaan induk berfungsi sebagai absorbing company, dan Down Stream Merger dalam hal anak perusahaan bertindak selaku absorbing company.

f. Metode Merger Menurut Prinsip Akuntansi

Metode ini dilaksanakan menurut prinsip akuntansi, tidak berkaitan dengan pendekatan dari sudut hukum, tetapi semata-mata didasarkan atas makna penggabungan perusahaan secara ekonomis.⁵³ Menurut prinsip-prinsip akuntansi, metode ini dibedakan atas dua jenis, yaitu :

- 1) Pooling of Interest Method, atau metode penyatuan kepentingan dipergunakan apabila penggabungan usaha merupakan tindakan untuk menyatukan kepemilikan dari atau lebih perusahaan yang digabungkan. Artinya disini adalah sejak semula absorbed company dianggap telah bergabung ke dalam absorbing

company, sehingga harta/aktiva perusahaan yang menggabungkan diri yang dialihkan kepada perusahaan penerima penggabungan "*absorbing company*" dinilai sesuai dengan harga yang terakhir tercatat di dalam pembukuan perusahaan yang menggabungkan diri "*absorbed company*".

- 2) Purchase Method, atau metode pembelian, dipergunakan apabila penggabungan perusahaan menimbulkan perubahan pada struktur nilai kepemilikan atas harta/aktiva pada perusahaan penerima penggabungan. Artinya disini bahwa harta atau aktiva absorbed company yang dialihkan kepada absorbing company dinilai berdasarkan harga yang riil dan wajar sesuai harga pasar/market value, dan berdasarkan harga buku (book value).

9. Pengabungan Perseroan Terbatas Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Daya Saing

Pada saat ini tidak dapat disangkal lagi bahwa tingkat persaingan yang dihadapi oleh dunia usaha menjadi sangat ketat dan bersifat frontal. Dalam kondisi seperti demikian, dunia usaha dituntut di samping memikirkan strategi eksternal untuk mencari cara-cara dan strategi memenangkan persaingan, juga harus memikirkan upaya-upaya di dalam melakukan konsolidasi dan pembenahan internal yang seringkali disebut sebagai strategi ke dalam. Konsolidasi dan pembenahan internal tersebut sangat diperlukan untuk lebih memastikan bahwa setiap komponen

⁵³ Ma'rie Muhammad, *Aspek Perpajakan Dalam Praktek Business Combination*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Business Combination, Jakarta, 1991, hal. 4-6.

yang terkait di dalam seluruh mata rantai kegiatan bisnis dikelola secara produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas secara menyeluruh.⁵⁴

Dengan melakukan pembenahan internal tersebut berbagai macam atau bentuk inefisiensi pada perusahaan dapat segera dihapus sehingga memungkinkan perusahaan siap menghadapi berbagai bentuk persaingan. Tanpa upaya semacam itu, strategi apa pun yang diterapkan oleh perusahaan di dalam persaingan tidak akan efektif karena perusahaan akan selalu dirongrong dari dalam sehingga akhirnya sulit untuk menang dalam persaingan.

Menghadapi persaingan yang makin lama makin tajam di dunia bisnis, salah satu upaya untuk memperkuat posisi internal dan eksternal adalah dengan melakukan penggabungan Perseroan Terbatas. Penggabungan Perseroan Terbatas mempunyai sasaran umum strategis yang bervariasi, antara lain meningkatkan daya saing dimana untuk itu perlu peningkatan efisiensi dan melakukan inovasi-inovasi. Hal tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi daya saingnya, misalnya daya saing ekspor maupun impor.

Dalam upaya meningkatkan daya saing, salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah dengan melakukan penggabungan perusahaan dengan perusahaan sejenis atau dengan perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, maka pasar lebih terkonsentrasi, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang sudah lebih dulu

⁵⁴ Thomas Suyatno, *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Dalam Upaya Penyehatan Perusahaan*, Makalah Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 10-11 September 1997.

besar. Dengan melakukan penggabungan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi, efisiensi dalam pemasaran, dan penghematan biaya pengeluaran dalam memproduksi produk yang sama dibandingkan sebelum dilakukan penggabungan, sehingga persaingan pasar menjadi tidak tajam. Selain itu dengan melakukan penggabungan perusahaan, perusahaan menjadi besar sehingga riset dan pengembangan produk dapat dikembangkan secara canggih, hal mana dapat mendorong untuk timbulnya inovasi-inovasi baru dalam menghasilkan produk-produk dari perusahaan yang bersangkutan.

10. Aspek Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan

Pengembangan usaha untuk meningkatkan sinergi perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan cara melakukan penggabungan Perseroan Terbatas. Penggabungan Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk pengembangan usaha yang relatif dapat dilakukan secara lebih cepat, jika dibandingkan dengan cara pengembangan usaha konservatif lainnya yang cenderung memakan lebih banyak waktu dan biaya. Melalui penggabungan perusahaan, seorang pengusaha dapat dengan cepat dan mudah menguasai sesuatu kegiatan bidang usaha tanpa harus bersusah payah merintis dari awal, dengan menanggung resiko kegagalan berusaha yang relatif cukup tinggi.

Pada awalnya tindakan penggabungan Perseroan Terbatas berdasarkan atas pemikiran manajerial dengan tujuan ekonomi semata-mata. Salah satu alasan

bersifat ekonomis dan menejerial melakukan penggabungan perusahaan adalah guna mencapai sasaran tertentu, yaitu meningkatkan pangsa pasar, baik pangsa pasar hasil produksi maupun pangsa pasar sumber bahan baku.

Meskipun tindakan penggabungan Perseroan Terbatas dilakukan atas dasar pertimbangan ekonomi dan menejerial, namun pada hakekatnya juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, baik kepada pihak yang berkepentingan maupun kepada pihak ketiga, dengan konsekuensi adanya hak dan kewajiban atau tanggung jawab tertentu.⁵⁵ Oleh karena itu dalam melakukan penggabungan perusahaan harus pula berdasarkan pertimbangan hukum untuk menentukan apakah tindakan tersebut sah dan aman dari segi hukum dan apakah penggabungan perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar hak dan kepentingan pihak lain.

Sebagaimana diketahui dalam melakukan penggabungan Perseroan Terbatas ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu **Pertama**, memperkuat posisi dan meningkatkan daya saing. **Kedua**, memperbesar *market share*, misalnya dengan perluasan kantor cabang, perluasan koresponden di luar negeri, perluasan jaringan pasar, dan lain-lain. **Ketiga**, memperkuat struktur permodalan. **Keempat**, membangun citra baru, dan membuang citra lama yang kurang baik. **Kelima**, membantu perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien. **Keenam**,

⁵⁵ Sri Redjeki Hartono, *Pengaruh Dan Akibat Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Makalah Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 10-11 September 1997.

mengeksplotasi sinergi. Daftar sinergi yang dapat berlaku secara umum tidak mungkin dikomplikasi secara lengkap. Terdapat banyak kemungkinan yang dihasilkannya, antara lain alih teknologi, meningkatnya pengetahuan pemasaran, penelitian dan pengembangan, efisiensi biaya, harmonisasi produk, penggunaan sumber daya yang lebih optimal merupakan alasan yang paling umum melakukan penggabungan Perseroan Terbatas.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok penggabungan Perseroan Terbatas adalah untuk mencapai tingkat efisiensi yang optimal dan menghasilkan sinergi yang besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Bertolak dari pemikiran bahwa tujuan penggabungan perusahaan adalah untuk kemajuan perusahaan dan atas landasan kepentingan ekonomis, tetapi yang paling menentukan adalah kepentingan-kepentingan pemilik/pemegang saham yang dari masing-masing perusahaan. Selain itu karena dalam perbuatan hukum penggabungan perusahaan akan menimbulkan akibat-akibat hukum baik terhadap para pihak dan juga terhadap pihak ketiga secara langsung maupun terhadap masyarakat luas secara tidak langsung, peranan hukum sangat dibutuhkan sebagai pengaman guna menjaga keseimbangan kepentingan para pihak pada satu sisi dan kepentingan publik pada sisi yang lain. Dengan demikian pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁶ Thomas Suyatno, op. cit.

Sebelum penggabungan Perseroan Terbatas dilakukan, pihak yang melakukan penggabungan Perseroan Terbatas harus terlebih dahulu memperhitungkan berbagai hal, agar pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas tersebut memperoleh manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan penerima penggabungan.

Di samping itu dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas diupayakan meminimalkan resiko atau akibat hukum yang merugikan pihak tertentu, misalnya terhadap karyawan, pemegang saham minoritas, kreditor dan masyarakat. Dan apabila ada akibat hukum yang merugikan pihak-pihak tertentu, Direksi dan Komisaris dari Perseroan Terbatas penerima penggabungan seharusnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang dirugikan.

B. Akibat Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas

Penggabungan Perseroan Terbatas sebagai salah bentuk restrukturisasi perusahaan merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tentu dapat menimbulkan akibat-akibat hukum baik bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, karyawan, kreditor dan masyarakat, bahkan secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional.

1. Keuntungan Dan Kerugian Penggabungan Perseroan Terbatas

Sebagaimana diketahui bahwa penggabungan Perseroan Terbatas dilandasi oleh adanya motivasi untuk meningkatkan sinergi perusahaan yang

diharapkan membawa keuntungan ekonomis, baik bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya maupun bagi perekonomian secara makro, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat merugikan perekonomian nasional yang akan diuraikan di bawah ini.⁵⁷

a. Keuntungan Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Penggabungan Perseroan Terbatas

Keuntungan yang dapat diraih oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penggabungan Perseroan Terbatas, agar lebih jelas dipisah menjadi 2 (dua), yaitu keuntungan bagi perusahaan penerima penggabungan dan keuntungan bagi perusahaan yang menggabungkan diri.

Keuntungan bagi perusahaan penerima penggabungan, adalah sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan harta perusahaan yang digabungkan dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang sebenarnya. Keuntungan ini dapat diperoleh perusahaan penerima penggabungan melalui penggabungan Perseroan Terbatas yang dilandasi motivasi keuntungan selisih nilai harta kekayaan ini merupakan suatu akibat adanya penilaian harta kekayaan perusahaan yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya sehingga perusahaan penerima penggabungan akan menerima keuntungan dari selisih penilaian harta kekayaan perusahaan yang menggabungkan diri tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Teori Keuntungan Selisih Nilai Harta Kekayaan (Undervaluation). Keadaan ini dapat terjadi karena.

⁵⁷ Muchyar Yara, op. cit, hal. 45.

beberapa sebab, yaitu Pertama, manajemen perusahaan yang menggabungkan diri tidak mampu menjalankan perusahaan secara maksimal sehingga kinerja perusahaan menjadi perusahaan menjadi rendah dan mengakibatkan harga sahamnya pun menjadi rendah. Kedua, manajemen perusahaan yang menggabungkan diri kurang jeli melihat peluang pasar dan karena itu bidang usaha yang dijalankan kurang diminati investor sehingga harga saham menjadi turun. Ketiga, kebijaksanaan perusahaan yang menggabungkan diri dalam melakukan pembagian laba perusahaan (dividen) terbatas sehingga kurang diminati oleh investor dan akibatnya harga saham perusahaan menjadi turun.

- 2) Memperbesar penguasaan pangsa pasar dengan menggabungkan perusahaan yang bergerak dalam bidang dan tingkat usaha yang sama yang sebelumnya justru merupakan perusahaan saingan (competitor). Keuntungan ini dapat diperoleh perusahaan penerima penggabungan yang dilandasi motivasi meningkatkan penguasaan pangsa pasar sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kekuatan Pasar. Dengan adanya penggabungan tersebut, maka penguasaan pasar akan semakin luas, dan hal ini sudah tentu akan meningkatkan daya saing dan terjaganya kekuatan pasar. Penggabungan perusahaan dengan keinginan untuk perluasan pasar ini, akan mengurangi biaya promosi dan biaya pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan yang baru. Selanjutnya biaya-biaya tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan meningkatkan mutu produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing.

- 3) Memperbesar pendapatan/income perusahaan penerima penggabungan dengan menggabungkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang berbeda. Keuntungan ini diperoleh perusahaan penerima penggabungan melalui penggabungan Perseroan Terbatas yang dilandasi motivasi penganekaragaman usaha yang merupakan tindak lanjut tercapainya sinergi keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Teori Diversifikasi. Kemampuan modal yang semakin kuat, perusahaan akan dapat melakukan penganeka-ragaman bidang usaha. Dengan memiliki keanekaragaman usaha, maka diharapkan suatu perusahaan akan dapat menjaga stabilitas pendapatan (income). Untuk jelasnya dapat diberikan suatu contoh pada saat sekarang usaha divisi distributor kendaraan bermotor mengalami penurunan omset penjualan, namun pada saat yang sama pada divisi yang lain yaitu divisi penyediaan suku cadang atau spare parts dan perbengkelan mengalami peningkatan pendapatan, sehingga secara keseluruhan dari 2 (dua) divisi tersebut income atau pendapatan perusahaan dapat tetap terjadi sesuai dengan target yang direncanakan.
- 4) Memperoleh fasilitas pengurangan pajak dengan menggabungkan perusahaan yang mempunyai fasilitas pengurangan pajak karena adanya akumulasi kerugian yang diderita sebelumnya. Keuntungan ini diperoleh perusahaan penerima penggabungan melalui penggabungan usaha yang dilandasi motivasi pada keinginan memperoleh keuntungan di bidang perpajakan sebagaimana dijelaskan dalam Teori Keuntungan Pajak. Penggabungan perusahaan ini biasanya dilakukan oleh konglomerat atau biasa terjadi antara perusahaan induk dengan

anak perusahaan baik secara vertikal maupun horizontal antara perusahaan sejenis, misalnya perusahaan A adalah perusahaan yang senantiasa memperoleh keuntungan yang besar, sehingga kewajiban pembayaran pajaknya pun besar, sedangkan perusahaan B baru meraih keuntungan kecil setelah sekian tahun mengalami kerugian, sehingga perusahaan B masih memiliki fasilitas pembebasan pajak akibat akumulasi kerugiannya itu. Dengan melakukan penggabungan perusahaan B ke dalam perusahaan A, maka keuntungan di bidang perpajakan diperoleh melalui pengurangan kewajiban pembayaran pajak oleh perusahaan penerima penggabungan oleh karena adanya fasilitas pembebasan pajak yang dimiliki oleh perusahaan yang menggabungkan diri. Selain itu ada kemungkinan penggabungan perusahaan tersebut didasarkan pada keinginan untuk menghindarkan diri dari penarikan pajak ganda.

- 5) Meningkatnya efisiensi perusahaan penerima penggabungan melalui pencapaian "*economics of scale*", yaitu suatu keadaan dimana hasil produksi bertambah dua kali lipat, namun total biaya bertambah tidak sampai dua kali lipat.⁵⁸

Keuntungan ini diperoleh perusahaan penerima penggabungan melalui penggabungan usaha yang dilandasi motivasi meningkatkan efisiensi yang akan melahirkan "sinergi baru". Secara ekonomi dengan bertambahnya asset yang merupakan faktor-faktor komplementer dalam produksi, maka akan

⁵⁸ Roger Le Roy Miller, *Economics Today*, Harper & Row Publishers, New York, 1988, hal. 602.

mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda sebagaimana dijelaskan dalam Teori Efisiensi.

Sedangkan keuntungan bagi perusahaan yang menggabungkan diri ⁵⁹, adalah :

- 1) Terbebas dari kesulitan keuangan yang selama ini menjadi beban perusahaan, karena melalui penggabungan perusahaan akan terjadi perubahan struktur permodalan.
- 2) Meningkatnya kemampuan manajemen, yang selama ini justru dihindari kondisi yang tidak efisien.
- 3) Meningkatnya daya saing produk di pasaran, karena melalui penggabungan perusahaan akan tercapai "*economics of scale*".

b. Keuntungan Dan Kerugian Penggabungan Perseroan Terbatas Bagi Perekonomian Secara Makro

Penggabungan Perseroan Terbatas dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penggabungan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan, antara lain meningkatnya sinergi perusahaan secara signifikan sehingga perseroan menjadi lebih kuat dari segi permodalan, sehat dan konsolidatif, produktif, kompetitif, ekspansif dari segi pangsa pasar dan portofolio produk. Dengan memperoleh keuntungan dari adanya penggabungan perusahaan sebagaimana tersebut diatas,

⁵⁹ Siswanto Sudomo, *Prospek Merger di Indonesia*, Majalah Info Bank, Mei 1990, hal. 20.

maka secara ekonomi mikro memberikan dampak positif bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan, yang pada akhirnya secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi nasional secara makro. Tetapi dalam pelaksanaannya apakah penggabungan Perseroan Terbatas benar-benar dapat mendatangkan keuntungan/manfaat, atau sebaliknya justru merugikan bagi perekonomian makro suatu negara ? Untuk menjawab pertanyaan di atas seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan ahli ekonomi, dan pada akhirnya melahirkan 3 (tiga) pendapat yang saling berbeda mengenai hal tersebut.⁶⁰

1) Pendapat Pertama : “Merger menguntungkan bagi perekonomian nasional”

Menurut kalangan yang berpendapat bahwa merger menguntungkan bagi perekonomian nasional, karena merger dapat memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian nasional suatu negara, karena :

- a) Merger dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, dan pada gilirannya akan berpengaruh pula pada peningkatan produktivitas dan efisiensi nasional.
- b) Merger dapat membantu masalah kekurangan dana pada perusahaan-perusahaan kecil tetapi memiliki teknologi cukup tinggi, sehingga melalui merger perusahaan-perusahaan itu dapat memperbesar kapasitas produksinya dan mencapai “*economics of scale*”.

⁶⁰ Muchyar Yara, op. cit, hal. 47-51



- c) Merger akan melahirkan perusahaan-perusahaan besar (raksasa) yang memiliki kemampuan keuangan untuk melakukan investasi dan ekspansi usaha, yang pada gilirannya akan menaikkan tingkat pertumbuhan perekonomian nasional.
- d) Perusahaan-perusahaan raksasa yang terbentuk melalui merger akan mampu menghasilkan produk-produk yang bersaing (competitive), baik di pasaran ekspor, maupun di pasaran domestik, sehingga pada gilirannya akan mendatangkan cadangan devisa nasional.

2) Pendapat Kedua : “Merger justru merugikan perekonomian nasional”

Kebalikan dari pendapat pertama di atas, maka pendapat kedua ini menilai praktek merger sama sekali tidak mendatangkan keuntungan bahkan justru bisa merugikan atau membahayakan perekonomian nasional suatu negara.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan statistik terhadap pelaksanaan penggabungan perusahaan yang dilaksanakan dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1997 di Amerika Serikat dalam hubungannya dengan situasi ekonomi makro di negara tersebut, membuktikan hal-hal sebagai berikut :⁶¹

- a) Praktek merger meningkat jumlahnya sejalan dengan naiknya harga saham-saham pada bursa saham, dan sebaliknya pada saat kapasitas produksi nasional meningkat, jumlah praktek merger justru rendah.

⁶¹ J. Fred Weston, Kwang S. Chung and Susan E. Hoag, op. cit, hal. 282.

- b) Praktek merger meningkat jumlahnya sejalan dengan turunnya tingkat suku bunga pinjaman bank, dan sebaliknya praktek merger cenderung menurun sejalan dengan naiknya tingkat suku bunga pinjaman bank.

Kenyataan yang diperoleh dari penelitian di atas menjelaskan bahwa merger tidak memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian makro. Sebaliknya, justru kondisi positif perekonomian makro yang mendorong meningkatnya jumlah praktek merger.

Selanjutnya, merger ternyata dilaksanakan terutama tujuan mencari keuntungan finansial jangka pendek yang diperoleh dari selisih harga saham di bursa saham dengan nilai harta yang sebenarnya dari perusahaan yang akan digabungkan, dan merger kurang sekali memberikan perhatian terhadap meningkatnya kapasitas produksi nasional yang melahirkan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro.

Praktek merger juga meningkat pada saat tingkat suku bunga pinjaman bank rendah. Ini menunjukkan bahwa merger dilaksanakan untuk tujuan mencari keuntungan finansial jangka pendek, melalui penggunaan dana murah guna membayar kompensasi kepada para pemegang saham yang digabungkan dan memperoleh harta perusahaan yang digabungkan yang nilainya jauh lebih tinggi.

Berbeda dengan di Amerika Serikat, penelitian terhadap praktek merger yang dilaksanakan pada tahun 1967 dan 1968 di Inggris menunjukkan bahwa sebagian terbesar dari merger yang dilaksanakan bertujuan untuk menguasai pasar

dan cenderung menciptakan situasi pasar yang monopolistik.⁶² Merger seperti ini jelas juga tidak memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian makro, bahkan justru membahayakan bagi perekonomian nasional yang dilandasi pada sistem pasar bebas.

3) Pendapat Ketiga : “Merger dapat menguntungkan bagi perekonomian makro bilamana kecenderungan negatifnya dibatasi/dihilangkan”

Pendapat ketiga ini merupakan jalan tengah antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Berdasarkan pendapat ketiga bahwa tidak sepenuhnya benar bilamana beranggapan praktek merger dipastikan memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian makro, karena bentuk-bentuk merger horizontal dan merger vertical seringkali dimanfaatkan untuk mendorong terciptanya situasi pasar yang monopolistik melalui penguasaan pangsa pasar secara dominan oleh sebuah atau sekelompok perusahaan. Sebaliknya juga tidaklah tepat mengatakan bahwa seluruh praktek merger dapat mengakibatkan dampak yang bersifat negatif terhadap perekonomian makro, karena harus diakui bahwa bentuk-bentuk merger konglomerat sangat bermanfaat untuk mendorong adanya peningkatan efisiensi, pencapaian “*economics of scale*”, perluasan usaha melalui diversifikasi, dan peningkatan investasi, yang kesemuanya itu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

⁶² M.A. Weinberg, M.V. Blank and A.L. Greystoke, *Take-Overs and Mergers*, London : Sweet & Maxwell, 1979, hal. 37-38.

Penggabungan Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya senantiasa melahirkan sikap ganda yang saling bertentangan, dimana pada satu sisi penggabungan perusahaan dapat melahirkan dampak positif bagi perseroan itu sendiri sehingga menjadi besar, maju dan berkembang. Apabila Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dan sekaligus sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam kondisi yang kuat, sehat, maju dan berkembang, maka secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Tetapi pada sisi lain penggabungan Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu, misalnya terhadap pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat.

2. Akibat Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Setiap perbuatan hukum mengakibatkan akibat hukum, demikian pula perbuatan hukum penggabungan Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat hukum yang bersifat multi dimensi⁶³, yaitu:

- a. Akibat hukum yang bersifat internal dan materiil baik pada institusi atau lembaga yang bersangkutan internal maupun eksternal baik pada pihak pihak internal maupun eksternal.

⁶³ Sri Redjeki Hartono, *"Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap Pihak Ketiga"*, Makalah Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.

- b. Akibat hukum yang mempunyai dampak lebih luas yaitu pengaruh yang bersifat ekonomi.
- c. Akibat yang hampir terasa atau tidak yaitu pengaruh sosial dan psikologis

Dengan demikian pengaruh yang timbul atas tindakan penggabungan Perseroan Terbatas dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu pengaruh-pengaruh yang bersifat yuridis dan pengaruh-pengaruh yang bersifat non-yuridis⁶⁴. Pengaruh yang bersifat yuridis dapat terjadi atau timbul, baik terhadap institusi atau lembaga maupun terhadap pendukung institusional, sedangkan pengaruh-pengaruh yang bersifat non yuridis adalah setiap dampak yang timbul karena adanya perbuatan hukum penggabungan perusahaan.

Pengaruh yang bersifat yuridis terhadap institusi atau lembaga, dengan terjadinya penggabungan akan menimbulkan pengaruh terhadap eksistensi dari masing-masing lembaga yang bersangkutan. Bagi lembaga yang tetap eksis akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, antara lain mengenai organ Perseroan Terbatas dan pendukungnya, kepemilikan saham dan komposisi pemilikan saham, kekayaan perusahaan, tanggung jawab dan kewajiban, hak-hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga.⁶⁵ Sedangkan bagi lembaga yang tidak eksis di samping kedudukannya sebagai badan hukum menjadi bubar, perlu melakukan tindakan-tindakan yuridis terhadap:

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

1. Kewajiban-kewajiban internal termasuk kepada Sumber Daya Manusia (SDM) dan kewajiban lain yang harus dipenuhi termasuk pajak yang belum dibayar dan sebagainya,
2. Pengaruh terhadap institusi baik internal maupun eksternal dapat mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menyangkut eksistensi Perseroan Terbatas yang bersangkutan apakah tetap eksis atau tidak karena adanya perseroan baru dan sebagainya,
 - b) Adanya likuidasi yang diikuti oleh pembubaran, atau
 - c) Adanya pembubaran tanpa likuidasi.

Ketiganya menimbulkan konsekuensi yuridis yang tidak kecil, baik kepada pemegang saham maupun terhadap pihak ketiga atas transaksi-transaksi yang belum tuntas.

Pengaruh yuridis lainnya adalah pengaruh terhadap pendukung institusional, dalam hal ini hak dan kewajiban bertimbal balik harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang pernah diadakan. Pendukung institusi ini dimaksudkan adalah semua pihak yang mempunyai kaitan dengan institusi antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sumber dana, masyarakat pelanggan/konsumen dan negara sebagai penerima pajak.

Sedangkan pengaruh-pengaruh yang sifatnya non-yuridis adalah setiap dampak yang timbul karena adanya perbuatan hukum dari penggabungan Perseroan

Terbatas. Dalam hal ini dibutuhkan perhatian dengan pendekatan yang memerlukan kajian psikologis antara lain mengenai akibat putusnya hubungan kerja pada setiap tingkat atau jenjang di lembaga yang bersangkutan, sikap pemegang saham lama/baru terhadap Sumber Daya Manusia yang tetap bertahan/dipertahankan dan sebagainya.

Pengaruh yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non-yuridis tersebut di atas, ada kemungkinan menimpa pihak ketiga seperti masyarakat dan kreditur. Pengaruh yang menimpa pihak ketiga justru sangat membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

Penggabungan Perseroan Terbatas sebagai perbuatan hukum dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap Perseroan Terbatas itu sendiri, karyawan, kreditur dan masyarakat, bahkan secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional. Akibat hukum dari penggabungan Perseroan Terbatas secara lebih rinci akan diuraikan dibawah ini.

a. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Yang Terlibat Penggabungan

Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan dapat mendatangkan keuntungan bagi perseroan yang bersangkutan. Keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan, antara lain meningkatnya sinergi perusahaan secara signifikan sehingga perseroan menjadi lebih kuat dari segi permodalan, sehat dan konsolidatif, produktif, kompetitif, ekspansif dari segi pangsa pasar dan portofolio produk. Dengan memperoleh keuntungan dari adanya penggabungan perusahaan sebagaimana tersebut diatas, maka secara ekonomi mikro

memberikan dampak positif bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan, yang pada akhirnya secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi nasional secara makro.

Dengan adanya penggabungan, perseroan akan menjadi lebih kuat, sehingga perseroan yang telah melakukan penggabungan menjadi lebih besar, maju dan berkembang. Apabila Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dan sekaligus sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam kondisi yang kuat, sehat, maju dan berkembang, maka secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Secara kelembagaan, penggabungan Perseroan dapat menimbulkan akibat hukum baik secara internal maupun eksternal. Secara internal penggabungan akan menimbulkan akibat hukum, baik bagi perusahaan sebagai badan hukum, pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas, dan karyawan. Selain itu secara internal penggabungan mempunyai akibat hukum bagi anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan, karena status hukum atau keberadaan mereka terhadap perusahaan induknya menjadi berubah yang semula merupakan anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri kemudian setelah melakukan penggabungan beralih menjadi anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan, kecuali diperjanjikan lain.

Akibat hukum perbuatan hukum penggabungan Perseroan Terbatas terhadap perusahaan yang menggabungkan diri telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 107 secara tegas telah ditentukan bahwa dalam hal terjadi penggabungan, maka yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pembubaran tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Dalam hal pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi, maka aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan, dan pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Penggabungan Perseroan Terbatas yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah menetapkan saat berlakunya pembubaran perseroan yang menggabungkan diri. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar.
- (2) Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang wajib dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, maka perseroan yang menggabungkan diri bubar,

terhitung sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam Daftar Perusahaan.

- (3) Apabila penggabungan perseroan dilakukan tanpa disertai perubahan perubahan anggaran dasar, maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan.

Walaupun saat berlakunya secara efektif perseroan yang menggabungkan diri bubar telah dimuat secara tegas dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut, akan tetapi perseroan yang menggabungkan diri, dalam hal ini Direksi sudah dinyatakan demisioner, tidak boleh melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan penggabungan, sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tanggung jawab Direksi yang bersangkutan.

b. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Di samping akibat hukum terhadap perseroan itu sendiri, penggabungan Perseroan Terbatas juga menimbulkan dampak bagi pemegang saham, yang mana menurut ketentuan Pasal 107 ayat (3) huruf b dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dalam Perseroan Terbatas terjadi peralihan pemegang saham, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang saham yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil merger atau konsolidasi”.

Peralihan ini terjadi karena berdasarkan titel umum tanpa adanya perbuatan penyerahan (levering), tetapi cukup hanya dengan akta penggabungan (merger). Dengan demikian hak dan kewajiban ini dan tuntutan terhadap perseroan asal beralih dengan sendirinya kepada perseroan hasil penggabungan, termasuk di dalamnya hak tanggungan yang dipegang oleh perseroan asal.⁶⁶ Adanya peralihan pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan sebenarnya bukan merupakan masalah, kecuali bila ada di antara pemegang saham perusahaan yang digabungkan (biasanya adalah pemegang saham minoritas) menolak pelaksanaan penggabungan, maka kepada yang bersangkutan diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai dengan cara menjual sahamnya.

Dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui harga jual sahamnya, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan tentang penggabungan. Pasal 54 ayat (2) menyebutkan, bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris. Apabila dianggap perlu pemegang saham

⁶⁶ Yunus Husein, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Makalah Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 10-11 September 1997, hal. 3-4

minoritas dapat juga mengajukan permohonan kepada pengadilan Negeri, agar terhadap perseroan dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.⁶⁷

c. Akibat Hukum Terhadap Karyawan

Salah satu tujuan penggabungan Perseroan Terbatas adalah untuk efisiensi perusahaan, untuk terciptanya efisiensi perusahaan, Perseroan Terbatas hasil penggabungan tidak mungkin mempekerjakan semua karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan yang menerima penggabungan, sehingga dengan adanya penggabungan Perseroan Terbatas dapat mengurangi kesempatan kerja bagi karyawan. Berkurangnya kesempatan kerja guna untuk mencapai efisiensi perusahaan diperlukan adanya rasionalisasi karyawan dengan jalan mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Oleh karena penggabungan perusahaan dapat mengakibatkan kesempatan kerja bagi karyawan, maka kepentingan karyawan harus dilindungi. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pendekatan kepada karyawan, berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan setelah terjadinya penggabungan yang sudah tentu dalam hal ini banyak peraturan ketenagakerjaan harus dipedomani.

d. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Penggabungan Perseroan Terbatas dapat pula menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga, khususnya kreditur dan masyarakat. Menurut Pasal 107 ayat (3)

⁶⁷ Ibid, hal. 5.

huruf a dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

“Aktiva dan passiva perseroan yang digabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil merger atau konsolidasi”

Dari ketentuan tersebut di atas, peralihan aktiva dan passiva yang diakibatkan penggabungan Perseroan Terbatas, terjadi berdasarkan titel umum tanpa adanya penyerahan atau levering, tetapi cukup dengan akta penggabungan. Dengan demikian hak dan kewajiban serta tuntutan terhadap aktiva dan passiva beralih dengan sendirinya kepada perseroan hasil penggabungan perusahaan.

Jadi dengan adanya perubahan status hukum asset Perseroan Terbatas tersebut berarti segala perjanjian utang dan perjanjian lain yang mengakibatkan timbulnya atau lahirnya kewajiban Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri kepada pihak ketiga yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum penggabungan dilakukan, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan. Dengan demikian Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan harus melunasi semua utang Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri yang terjadi sebelum penggabungan dilakukan.

Perubahan status aktiva dan passiva tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat dengan keberadaan utang dan piutang perseroan yang terjadi sebelum penggabungan dilakukan. Hal ini menjadi lebih penting ketika Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan menghadapi

tuntutan atau gugatan pihak ketiga, khususnya kreditur atas segala utang yang pernah diikat oleh Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri sebelum penggabungan dilakukan.

e. Akibat Hukum Terhadap Masyarakat

Penggabungan Perseroan Terbatas selain bertujuan untuk meningkatkan sinergi perusahaan, efisiensi dan efektif, penggabungan Perseroan Terbatas secara tidak langsung dapat menimbulkan akibat negatif terhadap persaingan usaha, yaitu sebagai berikut:

- a. Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk menjadi tinggi;
- b) Kekuatan pasar "*market power*" menjadi semakin besar yang dapat mengancam pelaku usaha yang lebih kecil.⁶⁸

Memperhatikan dari akibat negatif yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas terhadap persaingan usaha, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggabungan Perseroan Terbatas yang menghasilkan sinergi kerja pelaku usaha yang lebih efisien dan kuat, memang akan mempunyai kecenderungan untuk penguasaan pasar secara monopoli yang dapat menghilangkan persaingan usaha yang sehat.

Adanya kecenderungan penguasaan pasar secara monopoli dan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat lainnya yang diakibatkan penggabungan

⁶⁸ Munir Fuady, op. cit, hal. 143.

perusahaan, pada akhirnya merugikan masyarakat konsumen karena dengan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, masyarakat akan membayar lebih tinggi atas suatu produk dan jasa yang dihasilkan oleh Perseroan Terbatas tersebut.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas

Dampak-dampak penggabungan Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di atas, tidak selalu menguntungkan pihak-pihak tertentu, misalnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat. Pihak-pihak yang dirugikan tersebut secara hukum perlu mendapat perlindungan.

Setiap akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum, yang mendatangkan kerugian baik bagi pihak-pihak tertentu atau pihak ketiga, maka hukum sebagai instrumen harus memberikan perlindungan hukum bagi-bagi pihak yang dirugikan. Demikian juga dalam penggabungan Perseroan Terbatas, pihak-pihak yang dirugikan perlu mendapat perlindungan hukum.

1. Kepentingan Pihak-Pihak Yang Harus Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penggabungan Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya senantiasa melahirkan sikap ganda yang saling bertentangan, dimana pada satu sisi penggabungan perusahaan dapat melahirkan dampak positif bagi perseroan itu sendiri sehingga menjadi besar, maju dan

berkembang. Apabila Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dan sekaligus sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam kondisi yang kuat, sehat, maju dan berkembang, maka secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Tetapi pada sisi lain penggabungan Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu, misalnya terhadap pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat.

Untuk itu pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas harus diupayakan meminimalkan resiko atau akibat hukum yang merugikan pihak-pihak tersebut. Jadi dalam pelaksanaan penggabungan perusahaan harus memperhatikan kepentingan perseroan itu sendiri, kepentingan pemegang saham minoritas, kepentingan karyawan, kepentingan kreditor dan kepentingan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang dirugikan dirugikan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pada Pasal 104 telah mewanti-wanti agar setiap perbuatan penggabungan perusahaan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat. Selengkapnya Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

(1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

(2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Dalam penggabungan Perseroan Terbatas, kepentingan pemegang saham minoritas perlu diperhatikan karena kedudukannya berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Selain pemegang saham, pihak yang sering dirugikan dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas adalah karyawan. Karyawan berdasarkan struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan, ditempatkan sebagai pihak yang sangat

lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya, seperti pemegang saham, Direktur atau Komisaris. Karyawan dikatakan sebagai pihak yang sangat lemah karena sama sekali tidak dilibatkan dalam penentuan "*policy*" maupun operasional perusahaan, sehingga kepentingan karyawan harus diperhatikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas. Sebab dalam penggabungan Perseroan Terbatas, seringkali terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi dan rasionalisasi usaha..

Kepentingan lain yang harus dilindungi dalam Perseroan Terbatas adalah kreditur yang memiliki tagihan pada perseroan asal yang terkait dalam penggabungan Perseroan Terbatas. Penggabungan Perseroan Terbatas senantiasa diikuti dengan pengalihan aktiva dan passiva (asset) perusahaan yang dapat berupa utang. Karena adanya pengalihan tersebut, status kreditur beralih dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil penggabungan.

Selain pihak-pihak tersebut di atas, yang perlu mendapat perlindungan hukum dalam penggabungan Perseroan Terbatas adalah masyarakat, karena penggabungan Perseroan Terbatas dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu masyarakat harus mendapat perlindungan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.

2. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas memang riskan terhadap timbulnya akibat hukum yang merugikan bagi pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa dalam penggabungan Perseroan Terbatas diperlukan adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Keharusan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas, apabila dalam perbuatan hukum penggabungan Perseroan Terbatas merupakan perbuatan hukum yang cukup hanya dapat dilakukan oleh Direksi masing-masing

perseroan tanpa mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka tidak mustahil perbuatan hukum penggabungan Perseroan Terbatas itu dapat merugikan para pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, dan apabila telah terlanjur dilakukan maka sulit bagi pemegang saham itu untuk mengoreksinya kembali.

Pengalaman di masa lampau menunjukkan bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan adalah hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang dilakukan oleh organ perseroan. Jadi nampak suatu diskriminasi yang jelas antara yang kuat dan yang lemah.

Secara umum, pemegang saham mempunyai hak perseorangan yang dapat dipertahankan serta dapat dituntut pelaksanaan haknya. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan apabila yang bersangkutan dirugikan karena

tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hak untuk mengajukan gugatan tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang baik bagi pemegang saham, namun demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut adalah pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas dapat menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan, meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain hak perseorangan, Undang-Undang memberikan hak suara khusus kepada pemegang saham minoritas dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan baik oleh Direksi dan ataupun oleh Komisaris.

Sebagai subyek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang yang akan merugikan kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2), pemegang saham minoritas

mempunyai dua pilihan dalam menghadapi rencana perseroan untuk melakukan penggabungan. Pilihan pertama, pemegang saham minoritas dapat melaksanakan hak yang diberikan oleh Pasal 104 ayat (2) untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Dalam hal hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar itu tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan pilihan kedua, yaitu tidak menyetujui rencana penggabungan yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan haknya yang ditentukan dalam Pasal 55 (2) Undang-undang tersebut, yaitu meminta kepada perseroan agar mengusahakan sahamnya dibeli oleh pihak lain..

Dalam hal pemegang saham minoritas menolak penggabungan perusahaan dan tidak menyetujui harga jual sahamnya, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, pemegang saham tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan penggabungan perusahaan. Pasal 54 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi atau Komisaris. Apabila dianggap perlu, pemegang saham minoritas dapat juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, agar terhadap perseroan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak

ketiga; atau anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Selain pemegang saham minoritas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan dalam penggabungan Perseroan Terbatas. Karyawan berdasarkan struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan, ditempatkan sebagai pihak yang sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya sehingga sering dirugikan akibat penggabungan Perseroan Terbatas..

Karyawan dalam perusahaan yang akan melakukan penggabungan, merupakan salah satu pihak yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum penggabungan dilakukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan karyawan dalam hubungan adanya penggabungan Perseroan Terbatas, yaitu dalam penggabungan Perseroan Terbatas selalu diikuti dengan pengalihan status karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri ke perusahaan yang menerima penggabungan dan dengan alasan efisiensi dan restrukturisasi usaha tidak jarang sebagian karyawan diputuskan hubungan kerjanya.. Dalam sistem hukum kita hampir tidak ada upaya hukum apapun untuk menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan karyawan yang diakibatkan penggabungan Perseroan Terbatas, meskipun Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah memberikan isyarat agar dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas memperhatikan kepentingan karyawan sebagaimana tertuang dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Perlindungan hukum bagi karyawan akibat penggabungan Perseroan Terbatas meskipun tidak diatur secara konkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tetapi telah diatur secara jelas dalam peraturan ketenagakerjaan yang termuat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

Selain pemegang saham minoritas dan karyawan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam hal terjadi penggabungan Perseroan Terbatas. Penggabungan Perseroan Terbatas senantiasa diikuti dengan pengalihan aktiva dan passiva (asset) perusahaan yang dapat berupa utang. Karena adanya pengalihan tersebut, status kreditur beralih dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil penggabungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perlindungan hukum bagi kreditur dapat dijumpai pada Pasal 104 ayat (1) huruf b, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) huruf f angka 3, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 33.

Selain pihak-pihak tersebut di atas, yang perlu mendapat perlindungan hukum dalam penggabungan Perseroan Terbatas adalah masyarakat dalam hal penggabungan perusahaan tersebut mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu masyarakat harus mendapat perlindungan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya telah terakomodasi dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, namun perlindungan hukum yang diberikan kedua peraturan tersebut masih minim dan sederhana serta belum ada sanksi hukum bagi pihak yang melanggar, sehingga ketentuan monopoli pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 dianggap kurang memadai.

Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap persaingan usaha tidak sehat, mendapat angin segar setelah Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1999 mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana penggabungan Perseroan Terbatas menjadi salah satu obyek pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Ketentuan dilarangnya penggabungan Perseroan Terbatas yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28 dan Pasal 29. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Perlindungan-perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah tersebut terjadi dalam penggabungan Perseroan Terbatas, antara lain mereka lemah secara struktural, finansial dan lokalisasi.⁶⁹ Lemah secara struktural maksudnya adalah kedudukan pihak tersebut dalam struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya. Menurut sistem hukum positif kita, dari segi "*Corporate Law*", kedudukan karyawan/pekerja di perusahaan lebih lemah dari kedudukan pihak lain, seperti pemegang saham, Direktur atau Komisaris, karena karyawan sama sekali tidak dilibatkan dalam hal penentuan policy maupun operasional perusahaan.

Lemah secara finansial maksudnya adalah kedudukannya kuat secara yuridis, misalnya pemegang saham minoritas, tetapi karena ikatan finansial lemah, maka konsekuensinya posisi yang bersangkutan juga akhirnya lemah. Sedangkan lemah secara lokalisasi maksudnya pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan kontraktual, misalnya antara

⁶⁹ Munir Fuady, op. cit, hal. 127.

kreditur dengan perusahaan yang bersangkutan, maupun hubungan non kontraktual, misalnya dengan si teresaing secara tidak fair.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum pada prinsipnya dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perseorangan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki badan hukum, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan Terbatas, yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Sebagaimana diketahui organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Dalam menjalankan perusahaan, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengurusan perseroan, serta berwenang mewakili perseroan. Oleh karena itu keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan, karena Perseroan Terbatas sebagai "*artificial person*" tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai "*natural person*". Sedangkan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan

Dalam hal penggabungan Perseroan Terbatas, Direksi dan Komisaris mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Dalam rangka menjalankan usaha perseroan, khususnya apabila perseroan tersebut akan melaksanakan penggabungan perusahaan, maka Direksi dan Komisaris mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Sesuai ketentuan Pasal 102, dalam hal penggabungan Perseroan Terbatas, Direksi masing-masing perseroan menyusun rencana penggabungan yang dituangkan dalam rancangan penggabungan. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum atau meminimalkan resiko penggabungan Perseroan Terbatas yang akan merugikan pihak-pihak tertentu, maka dalam penyusunan rancangan penggabungan, Direksi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memperhatikan:

- 1) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil-hasil penggabungan, dan cara penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, hal ini dimaksudkan agar kepentingan pihak ketiga, khususnya kreditur terlindungi;
- 2) Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri, hal ini diharapkan agar masalah karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri dapat diperhatikan, sehingga dalam penggabungan Perseroan Terbatas yang akan dilaksanakan tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

- 3) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan, hal ini dimaksudkan agar pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dapat memperoleh haknya, yaitu untuk menjual sahamnya secara wajar dan bebas menawarkan sahamnya kepada pihak yang berminat.

Selanjutnya Direksi wajib mengumumkan rancangan penggabungan Perseroan Terbatas dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 105 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Kewajiban untuk mengumumkan rancangan penggabungan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau kreditur untuk mengajukan keberatan terhadap penggabungan perusahaan tersebut.

Setelah rancangan penggabungan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi wajib untuk mengajukan persetujuan, menyampaikan laporan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan perusahaan dengan melampirkan rancangan penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Setelah Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan mendapat persetujuan, telah diterimanya laporan dan pemberitahuan oleh Menteri Kehakiman, Direksi mempunyai kewajiban untuk mengumumkan hasil penggabungan Perseroan

Terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan perusahaan dilakukan (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Ketentuan kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam hal pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut di atas, kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam penggabungan Perseroan Terbatas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- a) Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan. Usulan rencana penggabungan tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris (Pasal 7);
- b) Direksi wajib menyusun rancangan penggabungan, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana penggabungan (Pasal 9);
- c) Direksi wajib mengumumkan ringkasan rencana penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Direksi wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat

14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan (Pasal 9);

- d) Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan, penyampaian laporan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Departemen Perdagangan dan Perindustrian serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara RI (Pasal 14);
- e) Terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan, Direksi perseroan yang menggabungkan diri tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum apapun, kecuali perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penggabungan. Apabila Direksi melanggar ketentuan tersebut, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi yang bersangkutan (Pasal 19);
- f) Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan wajib menyampaikan surat tercatat rancangan penggabungan kepada seluruh kreditur, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 33);
- g) Direksi perseroan hasil perseroan wajib mengumumkan hasil penggabungan Perseroan Terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) terhitung sejak berlakunya penggabungan (Pasal 34);

- h) Dalam proses pelaksanaan penggabungan Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Apabila terjadi benturan kepentingan antara perseroan dengan Direksi, maka Direksi perseroan wajib menuangkan hal tersebut dalam usulan rencana dan rancangan penggabungan. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Komisaris.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 101, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai tugas, wewenang maupun hak dan kewajiban Komisaris, sedangkan kewajiban dan tanggung jawab Komisaris dalam penggabungan Perseroan Terbatas adalah memberikan persetujuan terhadap usulan rencana penggabungan. Sebagai pengawas perusahaan, Komisaris dituntut untuk mengawasi pelaksanaan penggabungan perseroan, sehingga dalam penggabungan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak. Dengan demikian dalam menyusun rencana penggabungan Komisaris harus memberi pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dalam pelaksanaan penggabungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas secara tersurat tidak memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Direksi dan Komisaris dalam hal memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas, namun dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas Direksi bertindak sebagai

penyusun rencana penggabungan Perseroan Terbatas. Dalam menyusun usulan rancangan penggabungan tersebut Direksi harus memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, dimana pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas secara tersirat Direksi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Demikian juga dengan Komisaris sebagai pengawas dalam perseroan, dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas mempunyai tugas untuk memberikan persetujuan usulan rencana penggabungan yang telah disusun oleh Direksi. Dalam memberikan persetujuan usulan rencana penggabungan, Komisaris harus memantau apakah kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang lemah telah terakomodasi dalam rencana penggabungan tersebut. Dalam hal usulan rencana penggabungan belum atau tidak memuat perlindungan hukum bagi pihak-pihak tertentu, maka Komisaris dapat menolak rencana penggabungan dengan tidak menyetujui usulan penggabungan tersebut.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa Direksi dan Komisaris perseroan mempunyai peran yang sangat penting, sentral dan strategis dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas.

Kewajiban dan tanggung jawab Direksi dalam rangka memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan dimulai pada saat penyusunan rencana penggabungan, karena dalam penyusunan rencana penggabungan perusahaan terjadi negoisasi mengenai status pemegang saham minoritas, karyawan dan kreditur, baik terhadap perusahaan yang menggabungkan maupun terhadap perusahaan yang menerima penggabungan, serta mencari jalan ke luar dengan menentukan langkah-langkah penyelesaian terhadap kerugian yang akan timbul. Dalam membuat rencana penggabungan, Direksi harus benar-benar memperhatikan pihak-pihak tertentu, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat, sehingga risiko yang dapat menimbulkan kerugian atas pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas diminimalkan.

Dalam menyusun rencana penggabungan Perseroan Terbatas, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dicerminkan adanya negoisasi Direksi dalam memperjuangkan kebebasan pemegang saham minoritas untuk menentukan setuju atau menolak penggabungan Perseroan Terbatas, dan apabila menolak yang bersangkutan memperoleh harga yang wajar atas saham yang dimilikinya.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi karyawan dapat dilakukan oleh Direksi dengan cara negoisasi untuk meminimalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat

dihindarkan, maka Direksi harus memperjuangkan hak-hak yang harus diperoleh karyawan apabila diputuskan hubungan kerjanya.

Sedangkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, Direksi harus mengusulkan adanya perjanjian pengalihan utang dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil penggabungan, serta pembayaran utang-utang perusahaan yang menggabungkan diri dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dalam menyusun rencana penggabungan yang di dalamnya memuat prospektus perusahaan hasil penggabungan. Dalam menyusun prospektus perusahaan, Direksi harus memperhatikan etika bisnis dan prinsip-prinsip usaha yang sehat sehingga nantinya perusahaan hasil penggabungan tidak mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang nantinya dapat merugikan masyarakat dan persaingan usaha.

Kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris berakhir setelah Perseroan Terbatas hasil penggabungan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, misalnya memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi kepada karyawan, pemenuhan utang kepada kreditur, terjualnya saham dari pemegang saham minoritas dengan harga wajar dan untuk jangka panjang mengusahakan agar perusahaan hasil penggabungan tidak melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

B A B III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS -

A. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan di Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta beberapa Notaris di Jakarta, maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan

Pengembangan usaha untuk meningkatkan sinergi perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, menurut Warren J. Keegen dalam bukunya yang berjudul "*Global Marketing Management*", cara pengembangan secara internasional dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Dengan cara ekspor,
2. Melalui pemberian lisensi,
3. Dalam bentuk franchising (waralaba),
4. Pembentukan perusahaan patungan (joint ventures),
5. Total ownership atau kepemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui direct ownership (kepemilikan langsung) ataupun melalui merger dan akuisisi.¹

Selain itu, Warren J. Keegen berpendapat bahwa penggabungan dan akuisisi merupakan suatu bentuk pengembangan usaha yang relatif dapat dilakukan secara lebih cepat, jika dibandingkan dengan cara pengembangan usaha konservatif lainnya yang cenderung memakan lebih banyak waktu dan biaya. Melalui penggabungan perusahaan, seorang pengusaha dapat dengan cepat dan mudah menguasai sesuatu kegiatan bidang usaha tanpa harus bersusah payah merintis dari awal, dengan menanggung resiko kegagalan berusaha yang relatif cukup tinggi.²

Penggabungan Perseroan Terbatas akhir-akhir ini, khususnya setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi merupakan salah satu alternatif yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan pengembangan usahanya, di samping bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan yang lain. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah permohonan persetujuan, laporan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diajukan ke Departemen Kehakiman dan

¹ Warren J. Keegen, *Global Marketing, Management*, New York Prentice Hall International, 1989, hal 294.

² Ibid, hal. 294.

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dalam hal ini Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum.

Dari data yang diperoleh dari Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, jumlah permohonan persetujuan, laporan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.

**PERMOHONAN PENGESAHAN, PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS DAN PENGGABUNGAN PERSEROAN
TERBATAS YANG MASUK DI SUB DIT. BADAN HUKUM
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM**

No.	Tahun	Permohonan Pengesahan dan Persetujuan Anggaran Dasar	Permohonan Penggabungan PT (Persetujuan, laporan dan pemberitahuan)
1.	1998	48.058	32
2.	1999	33.381	37
3.	2000	41.062	43
4.	2001	28.441	46

Sumber: Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata.

Data tersebut di atas adalah jumlah permohonan penggabungan Perseroan Terbatas dari berbagai macam kegiatan usaha, baik Perseroan Terbatas biasa, Perseroan Terbatas bidang usaha khusus, Perseroan Terbatas bidang Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank, Perseroan Terbatas bersifat terbuka "*go-public*" serta

Perseroan Terbatas yang didirikan dengan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA).

Dari data yang diperoleh di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, dapat dilihat perkembangan penggabungan Perseroan Terbatas yang didirikan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dari tahun 1998 sampai dengan 2001 mengalami peningkatan.

Data mengenai jumlah permohonan penggabungan Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka fasilitas Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN) masih bersifat data mentah, karena data tersebut masih menunjukkan permohonan penggabungan Perseroan Terbatas menurut sektor usaha, dan data tersebut baru berupa pengajuan izin kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dan belum melakukan perubahan anggaran dasar atas rencana penggabungan perusahaan tersebut, data penggabungan Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN) dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL 2.

**PERSETUJUAN PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS YANG
DIKELUARKAN BKPM TAHUN 1998**

No.	Sektor	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	PMDN / PMA
1.	SEKTOR PRIMER 1. Tanaman Pangan 2. Perkebunan 3. Peternakan 4. Perikanan 5. Kehutanan 6. Pertambangan	1	19.504	PMDN
2.	SEKTOR SEKUNDER 7. Industri Makanan 8. Industri Tekstil 9. Industri Kayu 10. Industri Kertas 11. Industri Farmasi 12. Industri Kimia 13. Industri Mineral Non Logan 14. Industri Logam Dasar 15. Industri Barang Logam 16. Industri lainnya	1 1 2 1	710.815 129.962 4.758 24.041	PMDN PMDN PMDN PMDN
3.	SEKTOR TERSIER 17. Listrik dan air 18. Bangunan 19. Perdagangan 20. Hotel dan Restoran 21. Pengangkutan 22. Perumahan, Kawasan Industri 23. Perkantoran 24. Jasa lainnya			
	J U M L A H	6	889.080	

Sumber: Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

TABEL 3.

**PERSETUJUAN PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS YANG
DIKELUARKAN BKPM TAHUN 1999**

No.	Sektor	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	PMDN / PMA
1.	SEKTOR PRIMER			
	1. Tanaman Pangan			
	2. Perkebunan			
	3. Peternakan			
	4. Perikanan			
	5. Kehutanan	3	68.626	PMDN
	6. Pertambangan			
2.	SEKTOR SEKUNDER			
	7. Industri Makanan	2	132.962	PMDN
	8. Industri Tekstil	2	61.326	PMDN
	9. Industri Kayu			
	10. Industri Kertas			
	11. Industri Farmasi			
	12. Industri Kimia	1	5.091	PMA
	13. Industri Mineral Non Logam			
	14. Industri Logam Dasar	1	34.381	PMDN
	15. Industri Barang Logam			
	16. Industri lainnya			
3.	SEKTOR TERSIER			
	17. Listrik dan air			
	18. Bangunan			
	19. Perdagangan			
	20. Hotel dan Restoran			
	21. Pengangkutan			
	22. Perumahan, Kawasan Industri			
	23. Perkantoran			
	24. Jasa lainnya			
	J U M L A H	9	302.386	

Sumber: Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

TABEL 4.

**PERSETUJUAN PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS YANG
DIKELUARKAN BKPM TAHUN 2000**

No.	Sektor	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	PMDN / PMA
1.	SEKTOR PRIMER			
	1. Tanaman Pangan			
	2. Perkebunan			
	3. Peternakan	1	42.276	PMDN
	4. Perikanan			
	5. Kehutanan			
	6. Pertambangan	1	86.801	PMA
2.	SEKTOR SEKUNDER			
	7. Industri Makanan	2	93.523	PMDN
	8. Industri Tekstil	3	362.045	PMA
	9. Industri Kayu			
	10. Industri Kertas	2	114.982	PMDN
	11. Industri Farmasi	1	12.152	PMDN
	12. Industri Kimia			
	13. Industri Mineral Non Logam			
	14. Industri Logam Dasar	2	70.236	PMDN
	15. Industri Barang Logam			
	16. Industri lainnya			
3.	SEKTOR TERSIER			
	17. Listrik dan air			
	18. Bangunan			
	19. Perdagangan	2	56.725	PMA
	20. Hotel dan Restoran			
	21. Pengangkutan			
	22. Perumahan, Kawasan Industri			
	23. Perkantoran			
	24. Jasa lainnya			
	J U M L A H	14	838.740	

Sumber: Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

TABEL 5.

**PERSETUJUAN PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS YANG
DIKELUARKAN BKPM TAHUN 2001**

No.	Sektor	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	PMDN / PMA
1.	SEKTOR PRIMER			
	1. Tanaman Pangan			
	2. Perkebunan	1	18.315	PMDN
	3. Peternakan			
	4. Perikanan	1	23.525	PMDN
	5. Kehutanan			
	6. Pertambangan	2	1.207.327	PMDN
2.	SEKTOR SEKUNDER			
	7. Industri Makanan	1	875.475	PMDN
	8. Industri Tekstil	1	1.095.708	PMDN
	9. Industri Kayu	2	781.649	PMDN
	10. Industri Kertas	1	52.317	PMDN
	11. Industri Farmasi	3	300.724	PMDN
	12. Industri Kimia	1	66.981	PMDN
	13. Industri Mineral Non Logam			
	14. Industri Logam Dasar	1	66.981	PMA
	15. Industri Barang Logam			
	16. Industri lainnya	2	82.250	PMA
3.	SEKTOR TERSIER			
	17. Listrik dan air			
	18. Bangunan			
	19. Perdagangan			
	20. Hotel dan Restoran			
	21. Pengangkutan			
	22. Perumahan, Kawasan Industri			
	23. Perkantoran			
	24. Jasa lainnya	2	42.760	PMDN
	J U M L A H	18	4.568.095	

Sumber: Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

Dari tabel persetujuan penggabungan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal yang masih bersifat data mentah, maka setelah data tersebut diolah dapat dirangkum bahwa persetujuan penggabungan Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri mengalami peningkatan³. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 6
PERSETUJUAN PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN
FASILITAS PMA DAN PMDN TAHUN 1998 – 2001

Tahun	Persetujuan Merger Perseroan Terbatas		
	PMA	PMDN	Jumlah
1998	-	6	6
1999	1	8	9
2000	6	8	14
2001	3	15	18

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diolah

Praktek penggabungan Perseroan Terbatas di Indonesia sudah dikenal cukup lama, meskipun tidak dalam arti penggabungan usaha yang murni berupa penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang otonom ke dalam perusahaan otonom lainnya.

³ Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 20 Nopember 2001

Penggabungan Perseroan Terbatas sebagai salah satu cara penyatuan perusahaan baru dipraktekkan di Indonesia pada awal dasawarsa tahun 1970-an, yaitu sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.614/MK/II/8/1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Kepada Bank-Bank Swasta Nasional yang melakukan Penggabungan (Merger).

Perkembangan penggabungan Perseroan Terbatas mengalami perkembangan yang pesat, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 7 Maret 1995. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 merupakan tonggak baru tentang hukum penggabungan Perseroan Terbatas, dimana dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tersebut penggabungan Perseroan Terbatas mulai diatur secara cukup komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun sebelumnya ada pengaturan mengenai penggabungan Perseroan Terbatas, tetapi hal tersebut masih bersifat sektoral dan tingkat pengaturannya pun masih di bawah Undang-Undang.

Pengaturan mengenai penggabungan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Bab VII mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, mulai Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 dan Pasal 76 mengenai quorum rapat umum pemegang saham untuk penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah pada tanggal 24 Pebruari 1998 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas pada prinsipnya mengatur persyaratan dan tata cara proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas sebagai ketentuan umum "*Lex Generalis*" dari perbuatan hukum penggabungan Perseroan Terbatas, maka tata cara dan persyaratan penggabungan Perseroan Terbatas harus mengacu kepada ketentuan umum tersebut. Meskipun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 pada Pasal 36 memberikan kemungkinan berlakunya tata cara dan persyaratan khusus penggabungan Perseroan Terbatas yang berbeda dengan ketentuan umum tersebut. Ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

“Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara khusus penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan.”

Dari ketentuan Pasal 36 tersebut di atas, membuka peluang adanya peraturan-peraturan yang mengatur penggabungan Perseroan Terbatas secara khusus “*Lex Specialis*”, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/51/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/52/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sebelum penggabungan Perseroan Terbatas dilakukan, pihak yang melakukan penggabungan Perseroan Terbatas harus terlebih dahulu memperhitungkan berbagai hal, agar pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas tersebut dapat berhasil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴

⁴ Wawancara dengan Notaris Sovyedi Andasasmita, SH., Jakarta, tanggal 1 April 2002.

Penggabungan Perseroan Terbatas yang baik adalah penggabungan Perseroan Terbatas yang berakhir dengan deal yang *win-win*⁵, artinya baik pihak perusahaan penggabung maupun perusahaan target sama-sama dapat meraih manfaat dari adanya penggabungan perusahaan. Di samping itu dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas diupayakan meminimalkan resiko atau akibat hukum yang merugikan pihak tertentu, misalnya terhadap karyawan, pemegang saham minoritas, kreditor dan masyarakat. Dan apabila ada akibat hukum yang merugikan pihak-pihak tertentu, Direksi dan Komisaris dari Perseroan Terbatas penerima penggabungan seharusnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang dirugikan.⁶

Untuk berhasilnya penggabungan Perseroan Terbatas yang ideal, dibutuhkan beberapa informasi penting yang berupa data sebagai berikut:⁷

1. Data Ekonomi, yang terdiri dari:
 - a) Keadaan pasar, berupa:
 - (i) Pengembangan pasar;
 - (ii) Situasi ekspor-impor.
 - b) Keuntungan perusahaan, berupa:
 - (i) Laporan finansial terbaru;
 - (ii) Budget.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 29.

⁶ Wawancara dengan Notaris Vidya Shah, SH, Jakarta, tanggal 2 April 2002.

⁷ Steven R. Schuit et.al, *Dutch Business Law*, The Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1983, hal. 229.

- c) Teknologi, berupa:
 - (i) Fixed asset dan depreasiasinya;
 - (ii) Teknik-teknik baru.
 - d) Pembiayaan, berupa:
 - (i) Debt to equity ratio;
 - (ii) Long terms debts;
 - (iii) Short terms debts;
 - (iv) Angka-angka likuiditas.
 - e) Umum, berupa advis pihak luar terhadap merger tersebut.
2. Aspek Legal, yang terdiri dari:
- a) Kepemilikan;
 - b) Struktur Hukum dari Perusahaan;
 - c) Dewan Komisaris dan Komposisinya;
 - d) Struktur Manajemen, yang terdiri dari:
 - (i) Komposisi Direksi;
 - (ii) Keikutsertaan Direksi Nasional (Domestik).
 - e) Persyaratan Pelaporan/Perizinan;
 - f) Komunikasi dengan Pekerja.
3. Data Sosial, yang terdiri dari:
- a) Ketersediaan pekerjaan;
 - b) Keamanan kerja;
 - c) Overlapping pekerjaan karena merger;

d) Kebijaksanaan personil, yang terdiri dari:

- (i) Besar upah;
- (ii) Recruitment setelah merger, promosi, training, dan pendidikan dari pekerja;
- (iii) Prosedur konsultasi.

Setelah terkumpul informasi-informasi tersebut di atas, dilanjutkan dengan langkah-langkah awal proses penggabungan Perseroan Terbatas yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan gambaran mengenai arah, tata cara serta *terms and conditions*. Langkah awal proses penggabungan adalah untuk menemukan persamaan persepsi di antara pemegang saham khususnya kesamaan pandang di dalam visi, misi dan orientasi bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang serta tujuan-tujuan murni dari setiap pemegang saham di dalam melihat peluang dan tantangan yang ada.⁸

Berdasarkan pengalaman selama ini, faktor kunci keberhasilan penggabungan perusahaan banyak tergantung pada strategi pra penggabungan dan pasca penggabungan. Strategi pra penggabungan yang baik adalah penting untuk mencapai hasil yang optimal dan meningkatkan kinerja.⁹ Langkah-langkah awal dalam proses merger adalah sebagai berikut:

⁸ Thomas Suyatno, *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Upaya Menyelamatkan Perusahaan*, Makalah Seminar Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta tanggal 10-11 September 1997, hal. 12..

⁹ Ibid, hal. 12.



1. Melakukan Due Diligence;
2. Melakukan Taksiran Harga Perusahaan/Saham perusahaan target;
3. Melakukan checklist;
4. Melakukan beberapa tindakan yuridis lainnya.¹⁰

Untuk lebih jelasnya langkah-langkah awal dalam proses penggabungan Perseroan Terbatas diuraikan di bawah ini:

Sebelum diputuskan untuk dilakukan penggabungan Perseroan Terbatas, tentu saja harus diketahui terlebih dahulu tentang situasi dan kondisi dari perusahaan yang menggabungkan. Untuk itu dilakukan semacam penelitian terhadap perusahaan target tersebut. Penelitian tersebut dalam bahasa yang lebih teknis disebut dengan "*Due Diligence*". Dalam bidang hukum pun perlu dilakukan "*due diligence*" yang hasilnya akan keluar dalam bentuk laporan berupa "*legal opinion*" bahkan "*legal audit*". "*Due diligence*" tersebut dilakukan oleh konsultan hukum yang independen dengan perusahaan yang diaudit itu.

Di samping "*due diligence*", sebelum dilakukan penggabungan perusahaan secara yuridis terlebih dahulu harus dilakukan taksiran dari harga saham, sehingga penggabungan perusahaan dapat dilakukan secara menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam menaksir harga saham ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Stephen R. Schuit, op. cit, hal.230.

¹¹ Munir Fuady, op. cit, hal. 47.

1. Book Value

Book Value atau nilai buku adalah penilaian terhadap suatu perusahaan yang merupakan refleksi investasi historis dari pemilik saham umum dari saham yang bersangkutan. Jadi nilai buku "*un sich*" bukan merupakan nilai yang sesungguhnya dari perusahaan yang bersangkutan

2. Appraisal Value

Appraisal Value atau nilai taksiran ini yang merupakan harga hasil taksiran terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat dipakai sebagai "petunjuk" terhadap harga dari saham/perusahaan yang bersangkutan.

3. Stock Market Value

Stock Market Value atau nilai pasar saham, yakni harga yang sebenarnya terjadi di pasar saham merupakan harga yang sangat mendekati nilai riil dari perusahaan yang bersangkutan sehingga merupakan faktor kunci dalam menilai harga saham/perusahaan yang bersangkutan.

4. Pendekatan Chop-Shop

Chop-shop value adalah nilai suatu perusahaan seandainya perusahaan tersebut dijual bagian per bagian daripada dijual seluruhnya secara utuh. Chop-shop akan lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya jika dijual keseluruhan perusahaan secara sekaligus, terutama jika dalam perusahaan tersebut terdapat masalah keagenan "*agency problem*" dan masalah biaya kebangkrutan.

5. Future Cash Flow

Cash flow untuk masa yang akan datang "*future cash flow*" juga merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam menilai harga suatu perusahaan/saham, karena nilai suatu perusahaan termasuk juga nilai sekarang "*present value*" atas suatu aliran kas yang dihasilkan di masa mendatang.

Setelah melakukan taksiran harga perusahaan/saham perusahaan target kemudian dilanjutkan dengan membuat checklist yang berguna untuk memastikan tidak ada satu aspek pun yang tertinggal, terutama aspek yang signifikan, sehingga penggabungan Perseroan Terbatas tersebut benar-benar dapat membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.

Checklist dapat diklasifikasikan berdasarkan tahapan-tahapan penggabungan Perseroan Terbatas dan jenis informasi yang dibutuhkan dalam penggabungan perusahaan. Klasifikasi checklist berdasarkan jenis informasi, dapat diberikan contoh sebagai berikut: ¹²

- 1) Informasi yang diperlukan pada tahap penjajakan.
- 2) Informasi yang diperlukan pada tahap persiapan.
- 3) Informasi tentang pelaksanaan merger.

¹² Michael Simmons, et. al., *Successful Mergers. Planing, Strategi and Execution*, Waterlow Publisher, London, Inggris, 1990 hal. 163.

- 4) Informasi tentang prosedur merger.
- 5) Informasi tentang asosiasi.
- 6) Informasi tentang aspek perpajakan.

Langkah awal proses penggabungan Perseroan Terbatas yang lainnya yaitu dilakukannya tindakan yuridis lainnya yang berupa proses integrasi dari perusahaan-perusahaan yang bergabung. Pada prinsipnya, proses integrasi perusahaan ini terjadi pada dua fase sebagai berikut:¹³

1. Fase Proses Penggabungan Perusahaan

Dalam fase penggabungan perusahaan ini, banyak hal dari segi yuridis maupun dari segi bisnis yang dilakukan dalam rangka menggabungkan dua atau lebih perusahaan tersebut, karena bagaimana pun juga dualisme dalam perusahaan tertentu tidak dapat dibiarkan demi kelangsungan perusahaan hasil penggabungan perusahaan yang bersangkutan, jadi yang dituju bukan hanya bersatunya perusahaan secara formal, melainkan bersatunya sikap, tindak, cara pandang dan visi ke depan. Namun demikian, variabel-variabel sepanjang masih dalam kepentingan bersama tentu dapat ditoleransi.

2. Fase Setelah Penggabungan Perusahaan

Proses integrasi biasanya tidak selesai ketika perusahaan secara formal telah bersatu dengan tindakan penggabungan perusahaan tersebut. Sampai setelah

¹³ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 49

penggabungan pun integrasi perusahaan ini masih tetap saja berlangsung. Dalam hal ini, sasaran integrasi adalah kepentingan yang bersifat jangka panjang. Untuk proses integrasi perusahaan setelah penggabungan perusahaan ini sangat dibutuhkan data tertentu dari perusahaan, data yang diperlukan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang biaya penggabungan perusahaan untuk beberapa tahun ke depan;
- b. Data tentang keuntungan, pengukuran, perbandingan, dan peramalan;
- c. Data tentang segmen pasar dalam bermacam-macam periode waktu;
- d. Data tentang penilaian reaksi pelanggan;
- e. Data tentang perbandingan penjualan;
- f. Data tentang parameter untuk gangguan produksi;
- g. Data tentang keuntungan yang diharapkan;
- h. Data tentang pengakuan terhadap profil perusahaan yang baru;
- i. Data tentang keluar masuknya personil.

Sebuah perusahaan yang akan melakukan penggabungan dengan perusahaan lain, sebelum penggabungan dilakukan disamping harus mempunyai informasi dan melakukan langkah-langkah awal sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa faktor yang minimal harus dipertimbangkan dan diinvestigasikan terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Produksi

Sebagaimana diketahui faktor produksi merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan jika suatu penggabungan Perseroan Terbatas akan dilakukan.¹⁴

Pentingnya faktor produksi dipertimbangkan dalam melakukan penggabungan perusahaan, karena dengan penggabungan Perseroan Terbatas akan terjadi perpaduan antara dua sumber produksi, baik produksi produk yang sama, produksi produk satu jalur ataupun produksi dua produk yang berbeda, akan tetapi dengan adanya penggabungan produksi tersebut, sejauhmana akan membawa suatu sinergi harus diperhitungkan. Dalam suatu penggabungan Perseroan Terbatas hal-hal yang harus diperhitungkan dalam hubungannya dengan faktor produksi adalah sebagai berikut:

- a. Sejahteranya penggabungan dapat menghemat production cost;
- b. Sejahteranya riset dan development terhadap produk dapat digabungkan;
- c. Standart produk yang bagaimana yang diinginkan dalam mempersatukan dua produk yang mungkin standarnya berbeda;
- d. Bagaimana knowhow dapat ditingkatkan dalam produksi dapat ditingkatkan dalam bidang produksi dengan penggabungan Perseroan Terbatas tersebut;
- e. Berapa besar perkiraan biaya yang diperlukan dalam hal tempat produksinya di tempat yang berbeda, yang harus dipertimbangkan misalnya transportasi, waktu dan sebagainya;

¹⁴ Wawancara dengan Notaris Sovyedi Andasasmita, Jakarta, tanggal 1 Maret 2002

- f. Bagaimana penyatuan pabrik-pabrik dan peralatan jika diperlukan, apakah memerlukan biaya ekstra untuk itu;
- g. Apakah ada masalah-masalah yang tidak kelihatan misalnya produk yang telah dihasilkan berkualitas rendah sehingga ada ancaman pengembalian produk atau bahkan menimbulkan gugatan hukum di pengadilan.¹⁵

2. Faktor Finansial

Faktor finansial juga merupakan faktor yang penting yang mesti dipertimbangkan dalam suatu penggabungan perusahaan.¹⁶ Beberapa masalah finansial dari perusahaan yang harus dipertimbangkan sebelum dilakukan penggabungan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban perusahaan

Baik kewajiban yang tercatat maupun yang tidak tercatat dalam pembukuan (unrecorded contingent liabilities);

b. Financial Statement

Analisa terhadap financial statement termasuk proyeksi untuk ke depan;

c. Inventories

Dalam hal ini perlu dicermati taksiran harga dari inventories perusahaan, kemudian inventories tersebut biasanya dibagi ke dalam beberapa katagori sebagai berikut:

¹⁵ Munir Fuady, op. cit, hal. 32.

¹⁶ Wawancara dengan Notaris Sovyedi Andasasmita, Jakarta, tanggal 1 April 2002.

- 1) Katagori bahan mentah (raw materials);
 - 2) Katagori pekerjaan yang sedang diselesaikan (work in progress);
 - 3) Katagori barang yang sudah jadi (finished goods);
- d. Laporan kredit dari Bank;
- e. Harga dari properti, pabrik dan peralatan-peralatan lain (equipment);
- f. Hak milik intelektual

Dalam hal ini yang harus diperhatikan nilai dari hak milik intelektual termasuk royaltinya, baik terhadap Hak Merk, Hak Patent, Hak Cipta, Disaign Industri dan lain-lain;

g. Receivables

Account receivables (tagihan) dan notes juga harus menjadi fokus perhatian bagi perusahaan yang melakukan penggabungan. Yang penting untuk diamati bagaimanakah kolektibilitas dari account receivables tersebut. Artinya apakah account receivables tersebut termasuk mudah atau sukar ditagih, baik itu trade receivables (tagihan dagang) maupun non trade receivables. Di samping itu, juga tentunya harus diperhatikan bad debt dari perusahaan target dan bagaimana cara eksekusi bad debt yang dibenarkan oleh hukum untuk jenis hutang tersebut, apakah misalnya dengan cara eksekusi cepat misalnya Fiat Executie, eksekusi pengadilan secara pintas tanpa memerlukan prosedur biasa. Oleh karena diperlukan konsultan hukum dalam melakukan penggabungan Perseroan Terbatas.

h. Liabilities

Liabilities (kewajiban) dalam neraca harus juga dipertimbangkan oleh perusahaan yang akan melakukan penggabungan Perseroan Terbatas, selain itu liabilities harus diinvestigasi apakah ada kewajiban yang tidak tercatat (off balance sheet), dan bila perlu dikonfirmasi kepada krediturnya khususnya untuk hutang-hutang besar. Dalam hal ini bank statement sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar outstanding dari hutang yang ada di bank yang bersangkutan.

i. Commitment dan Contingencies

Pada faktor financial apakah ada komitmen yang diberikan oleh atau untuk perusahaan yang akan melakukan penggabungan juga harus menjadi perhatian dalam melakukan penggabungan. Apakah perusahaan yang akan melakukan penggabungan ada "*corporate guarantee*", "*indemnity*" atau apapun namanya. Jika yang akan melakukan penggabungan adalah perusahaan holding, apakah sebagai perusahaan holding ada kemungkinan yang potensial untuk digugat berdasarkan teori piercing the corporate veil dan lain-lain,

j. Operations

Yang penting dalam hal operasional perusahaan, bagaimanakah earning capacity dari perusahaan yang akan melakukan merger tersebut, karena earning capacity merupakan indikator yang paling penting untuk mengetahui

pendapatan perusahaan dari masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu income statement mestinya diteliti secara lebih detail dan ditelusuri beberapa tahun ke belakang tergantung situasi dan kondisi dari perusahaan yang bersangkutan.¹⁷

3. Faktor Pajak

Dalam penggabungan perusahaan, yang perlu diperhatikan juga adalah besarnya pajak, apakah sudah dibayar atau akan dibayar oleh perusahaan di samping pajak untuk transaksi penggabungan perusahaan. Yang perlu diperhatikan juga adalah pajak penghasilan, berapa hutang pajak yang mesti harus dibayar. Sehingga dalam memperhatikan masalah perpajakan, diperlukan adanya keterlibatan konsultan pajak.¹⁸

4. Faktor Hukum

Dalam hal adanya penggabungan Perseroan Terbatas, faktor hukum tidak boleh diabaikan dalam mempertimbangkan pada saat suatu penggabungan Perseroan Terbatas akan dilakukan¹⁹. Apakah perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan mempunyai masalah-masalah hukum, oleh karena itu perlu adanya dokumen yang disebut dengan legal audit terhadap perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Faktor-faktor hukum yang harus diperhatikan dalam hal adanya penggabungan adalah sebagai berikut :

¹⁷ Munir Fuady, op. cit, hal 34.

¹⁸ Wawancara dengan Notaris Sovyedi Andasasmita, Jakarta, tanggal 1 April 2002.

¹⁹ Wawancara dengan Notaris Sovyedi Andasasmita, Jakarta, tanggal 1 April 2002.

- a. Dalam hal suatu perusahaan terlibat saham yang listing maka harus pula dicari prosedur yang berlaku dipasar modal,
- b. Dicari prosedur penggabungan Perseroan Terbatas dan pembuatan dokumen penggabungan yang aman bagi pihak yang melakukan penggabungan sehingga dikemudian hari tidak terjadi gangguan-gangguan hukum serta gugatan-gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan,
- c. Perlu dicermati juga apakah perusahaan tersebut punya masalah dengan masalah lingkungan hidup,
- d. Masalah-masalah permodalan,
- e. Masalah kepengurusan,
- f. Masalah ketenagakerjaan.²⁰

5. Faktor Pemasaran

Dalam penggabungan Perseroan Terbatas, banyak pertimbangan yang harus dilakukan dari segi pemasaran agar penggabungan perusahaan benar-benar membawa hasil yang optimal. Jika penggabungan perusahaan dimaksudkan untuk memperluas pasar, seberapa jauh pasar tersebut menjadi luas setelah penggabungan perusahaan. Untuk itu harus dilakukan survei pasar untuk menentukan apakah ada kemungkinan untuk memasarkan produk ke luar wilayah yang dilakukan sebelum adanya penggabungan perusahaan serta harus diselidiki

²⁰ Wawancara dengan Notaris Sovyedi Andasasmita, Jakarta, 1 April 2002.

untung ruginya. Demikian juga dengan masalah marketing harus mendapat perhatian sebelum dilakukan penggabungan perusahaan.

6. Faktor Sumber Daya Manusia

Sektor sumber daya manusia (SDM) juga merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan penggabungan Perseroan Terbatas.²¹

Masalah sumber daya manusia yang perlu diperhatikan adalah status perusahaan yang melebur tidak eksis lagi, apakah harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun dapat dipekerjakan pada Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan. Keefektifan dan efisiensi perusahaan tentu menjadi pertimbangan utama untuk hal ini. Penempatan dan pemberian posisi bagi pekerja harus dipertimbangkan benar-benar sehingga mereka tetap bekerja dengan semangat dalam perusahaan hasil penggabungan Perseroan Terbatas.

7. Faktor-faktor Lain

Faktor-faktor lain yang cukup penting dipertimbangkan dalam melaksanakan penggabungan Perseroan Terbatas, misalnya manager management akan bertambah solid, apakah penggabungan perusahaan dapat memperluas pangsa pasar serta pengaruh penggabungan perusahaan terhadap persaingan usaha dan lain-lain.

²¹ Wawancara dengan S. Lumban Gaol, Direktur Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta, 25 Pebruari 2002.

Setelah langkah-langkah awal tersebut di atas dilakukan, maka tahap berikutnya pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas memasuki tahap pelaksanaan penggabungan perusahaan secara yuridis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sebelum sampai pada tahap prosedur dan tata cara penggabungan perusahaan, perlu diketahui persyaratan-persyaratan penggabungan Perseroan Terbatas.

Persyaratan penggabungan Perseroan Terbatas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dapat dibedakan menjadi persyaratan formil dan persyaratan materiil sebagai berikut :

1. Persyaratan Formil

Perseroan yang akan melakukan penggabungan, melalui Direksi masing-masing harus:

a) Menyusun/membuat usulan rencana penggabungan Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- (2) Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan perusahaan;
- (3) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan;

- (4) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan;
- (5) Neraca, perhitungan rugi laba yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- (6) Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain:
 - (a) Neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan penilaian ahli yang independen;
 - (b) Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;
 - (c) Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;
 - (d) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
 - (e) Susunan gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan;
 - (f) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;

- (g) Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
 - (h) Kegiatan usaha perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
 - (i) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
 - (j) Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
 - (k) Gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris. (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).
- (7) Neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil penggabungan, dalam hal perseroan yang melakukan penggabungan, tergabung dalam satu group atau antar group. (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).
- (8) Persetujuan dari Komisaris masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atas usulan rencana penggabungan Perseroan Terbatas. (Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).

- b) Menyusun rancangan penggabungan yang dibuat bersama oleh Direksi perseroan yang melakukan penggabungan yang memuat hal-hal yang tercantum di dalam usulan rencana penggabungan yang telah disetujui oleh Komisaris masing-masing perseroan yang melakukan penggabungan. (Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).
- c) Membuat pernyataan yang berisi penegasan dari perseroan yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri. (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).
- d) Mengumumkan rencana penggabungan di dalam 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).
- e) Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perseroan yang melakukan penggabungan atas rancangan penggabungan serta konsep akta penggabungan yang telah dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).

2. Persyaratan Materiil

Disamping harus memenuhi persyaratan formil sebagaimana tersebut diatas, penggabungan Perseroan Terbatas juga harus memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagai berikut:

- a) Penggabungan Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat serta persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- b) Penggabungan Perseroan Terbatas tidak boleh mengurangi hak pemegang saham minoritas atau pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penggabungan untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).
- c) Penggabungan Perseroan Terbatas harus memperhatikan kepentingan kreditur (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).

- d) Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan harus diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut (Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).
- e) Bagi Perseroan Terbuka dalam hal persyaratan quorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan quorum pengambilan keputusan tersebut tidak dapat dicapai, maka ketentuan mengenai quorum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan quorum pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal (Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).
- f) Penggabungan usaha tidak boleh menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, sebagai akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta penggabungan usaha tidak boleh menimbulkan monopoli, monopsoni dan oligopoli dalam segala bentuk yang merugikan masyarakat (Penjelasan Umum Alinea 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Di samping beberapa persyaratan tersebut di atas, jika salah satu atau lebih perseroan yang melakukan penggabungan adalah Perseroan Terbuka/Publik, maka harus pula memenuhi ketentuan persyaratan keterbukaan (transparansi), kewajaran dan pelaporan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor : X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Nomor: IX.G.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

Begitu juga, jika Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan adalah Bank, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Prosedur pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, Direksi masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan perusahaan, terlebih dahulu melakukan penjajagan mengenai

kemungkinan dilakukannya penggabungan Perseroan Terbatas²². Kegiatan penjajagan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a) Kepentingan perseroan, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh;
- b) Kepentingan pemegang saham minoritas, yaitu pemberian perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang menolak diadakannya penggabungan Perseroan Terbatas, berupa hak untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar;
- c) Kepentingan karyawan perseroan, yaitu bagaimana penyelesaian karyawan perseroan terutama bagi karyawan Perseroan Terbatas yang akan menggabungkan diri; dan
- d) Kepentingan masyarakat, yaitu bahwa penggabungan Perseroan Terbatas tersebut tidak boleh merugikan masyarakat, menimbulkan praktek monopoli, monopsoni, dan oligopoli.²³

Apabila hasil penjajagan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan dilakukan penggabungan dan mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, maka Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana

²² Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, tanggal 4 Maret 2002.

²³ Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, tanggal 5 Maret 2002.

penggabungan. Usulan tersebut wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1988 sebagai berikut :

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- c. Tata cara konvensi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan;
- d. Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan;
- e. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
- f. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain:
 - 1). Neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan hasil penilaian ahli yang independent;
 - 2). Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;
 - 3). Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;

- 4). Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
- 5). Susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan;
- 6). Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
- 7). Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- 8). Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
- 9). Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- 10). Nama Direksi dan Komisaris; dan
- 11). Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Usulan rencana penggabungan tersebut merupakan bahan untuk menyusun rancangan penggabungan yang disusun bersama oleh Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan. Rancangan penggabungan setidaknya harus memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana penggabungan serta memuat penegasan dari perseroan yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri.

Tahap kedua, setelah dibuat rancangan penggabungan tersebut di atas, Direksi masing-masing perusahaan yang bergabung harus membuat pengumuman yang dimuat dalam dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis

kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS).

Selanjutnya diberikan waktu 30 (tigapuluh) hari bagi siapa saja yang mempunyai keberatan terhadap rencana penggabungan dimaksud untuk menyampaikan keberatan kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau bagi siapa saja yang mempunyai persoalan dengan perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan untuk menyelesaikan dengan Direksi bersangkutan.

Tahap ketiga, penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Rancangan penggabungan serta konsep akta penggabungan wajib dimintakan persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal penggabungan harus memenuhi ketentuan dari Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Dalam hal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran persroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Konsep penggabungan yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1988).

Tahap keempat, penyelenggaraan Rapat Umum Gabungan Pemegang saham perusahaan penerima penggabungan dan perusahaan yang digabungkan, yang bertujuan untuk mengkonfirmasi atau menegaskan kembali putusan-putusan yang telah dibuat dalam Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham masing-masing perusahaan (tahap ketiga).

Tahap kelima, pembuatan dan penandatanganan perjanjian penggabungan perusahaan (perjanjian merger), yang mengatur secara lebih rinci putusan-putusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut pada tahap ketiga dan keempat. Pada perjanjian penggabungan perusahaan ini biasanya dicantumkan secara gantung yaitu penggabungan perusahaan baru berlaku efektif setelah memperoleh ijin atau persetujuan dari instansi-instansi yang terkait.

Tahap keenam, pengajuan permohonan ijin bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang akan melakukan penggabungan perusahaan sesuai dengan status dan usaha perusahaan pada tahap ini berlaku ketentuan khusus "*Lex Specialis*" dari prosedur penggabungan perusahaan yang umum, misalnya bagi penggabungan perusahaan yang berusaha dalam bidang perbankan harus mendapat ijin terlebih

dahulu dari Bank Indonesia, bagi perseroan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing harus mendapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan lain-lain.

Tahap ketujuh, adalah pembuatan dan penandatanganan perjanjian atau dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pengalihan harta, kewajiban, tanggung jawab, izin, lisensi, dan lain-lainnya dari perusahaan yang digabungkan kepada perusahaan penerima penggabungan.

Tahap kedelapan, pengajuan permohonan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan penerima penggabungan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut pada tahap ketiga.

Tahap kesembilan, penerimaan persetujuan atau penyampaian laporan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar perusahaan penerima penggabungan.

Dalam penggabungan perusahaan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Dalam hal penggabungan perusahaan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan, sehingga terhitung sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Sedangkan penggabungan perusahaan yang dilakukan tanpa disertai perubahan Anggaran Dasar, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan, demikian juga perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar sejak ditandatangani akta penggabungan tersebut.

Setiap perbuatan hukum mengakibatkan akibat hukum, demikian pula perbuatan hukum penggabungan Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat hukum yang bersifat multi dimensi ²⁴, yaitu:

1. Akibat hukum yang bersifat internal dan materiil baik pada institusi atau lembaga yang bersangkutan internal maupun eksternal baik pada pihak ~~pihak~~ internal maupun eksternal.
2. Akibat hukum yang mempunyai dampak lebih luas yaitu pengaruh yang bersifat ekonomi.

²⁴ Sri Redjeki Hartono, *"Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap Pihak Ketiga"*, Makalah Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.

3. Akibat yang hampir terasa atau tidak yaitu pengaruh sosial dan psikologis

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH mengemukakan bahwa pengaruh yang ada atau timbul atas tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu pengaruh-pengaruh yang bersifat yuridis dan pengaruh-pengaruh yang bersifat non-yuridis²⁵. Pengaruh yang bersifat yuridis, dapat dipilah-pilah sebagai berikut :

Pengaruh terhadap institusi atau lembaga, dengan terjadinya penggabungan akan menimbulkan pengaruh terhadap eksistensi dari masing-masing lembaga yang bersangkutan. Bagi lembaga yang tetap eksis akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, antara lain mengenai organ Perseroan Terbatas dan pendukungnya, kepemilikan saham dan komposisi pemilikan saham, kekayaan perusahaan, tanggung jawab dan kewajiban, hak-hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga.²⁶ Sedangkan bagi lembaga yang tidak eksis di samping kedudukannya sebagai badan hukum menjadi bubar, perlu melakukan tindakan-tindakan yuridis terhadap:

1. Kewajiban-kewajiban internal termasuk kepada Sumber Daya Manusia (SDM) dan kewajiban lain yang harus dipenuhi termasuk pajak yang belum dibayar dan sebagainya,
2. Pengaruh terhadap institusi baik internal maupun eksternal dapat mengenai hal-hal sebagai berikut:

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

- a) Menyangkut eksistensi Perseroan Terbatas yang bersangkutan apakah tetap eksis atau tidak karena adanya perseroan baru dan sebagainya,
- b) Adanya likuidasi yang diikuti oleh pembubaran, atau
- c) Adanya pembubaran tanpa likuidasi.

Ketiganya menimbulkan konsekuensi yuridis yang tidak kecil, baik kepada pemegang saham maupun terhadap pihak ketiga atas transaksi-transaksi yang belum tuntas.

Pengaruh yuridis lainnya adalah pengaruh terhadap pendukung institusional, dalam hal ini hak dan kewajiban bertimbal balik harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang pernah diadakan. Pendukung institusi ini dimaksudkan adalah semua pihak yang mempunyai kaitan dengan institusi antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sumber dana, masyarakat pelanggan/konsumen dan negara sebagai penerima pajak.

Sedangkan pengaruh-pengaruh yang sifatnya non-yuridis adalah setiap dampak yang timbul karena adanya perbuatan hukum dari penggabungan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini dibutuhkan perhatian dengan pendekatan yang memerlukan kajian psikologis antara lain mengenai akibat putusnya hubungan kerja pada setiap tingkat atau jenjang di lembaga yang bersangkutan, sikap pemegang saham lama/baru terhadap Sumber Daya Manusia yang tetap bertahan/dipertahankan dan sebagainya.

Pengaruh yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non-yuridis tersebut di atas, ada kemungkinan menimpa pihak ketiga seperti masyarakat dan kreditur. Pengaruh yang menimpa pihak ketiga justru sangat membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

Penggabungan Perseroan Terbatas sebagai perbuatan hukum dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap Perseroan Terbatas itu sendiri, karyawan, kreditur dan masyarakat, bahkan secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional. Akibat hukum dari penggabungan Perseroan Terbatas secara lebih rinci akan diuraikan dibawah ini.

Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan dapat mendatangkan keuntungan bagi perseroan yang bersangkutan. Keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan, antara lain meningkatnya sinergi perusahaan secara signifikan sehingga perseroan menjadi lebih kuat dari segi permodalan, sehat dan konsolidatif, produktif, kompetitif, ekspansif dari segi pangsa pasar dan portofolio produk. Dengan memperoleh -keuntungan dari adanya penggabungan perusahaan sebagaimana tersebut diatas, maka secara ekonomi mikro memberikan dampak positif bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan, yang pada akhirnya secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi nasional secara makro.

Dengan adanya penggabungan, perseroan akan menjadi lebih kuat, sehingga perseroan yang telah melakukan penggabungan menjadi lebih besar, maju dan berkembang. Apabila Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dan sekaligus

sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam kondisi yang kuat, sehat, maju dan berkembang, maka secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Secara kelembagaan, penggabungan Perseroan dapat menimbulkan akibat hukum baik secara internal maupun eksternal. Secara internal penggabungan akan menimbulkan akibat hukum, baik bagi perusahaan sebagai badan hukum, pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, dan karyawan. Sedangkan secara internal penggabungan mempunyai akibat hukum bagi anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan, karena status hukum atau keberadaan mereka terhadap perusahaan induknya menjadi berubah yang semula merupakan anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri kemudian setelah melakukan penggabungan beralih menjadi anak atau anak-anak perusahaan dari Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan, kecuali diperjanjikan lain.

Di samping akibat hukum terhadap perseroan itu sendiri, penggabungan Perseroan Terbatas juga menimbulkan dampak bagi pemegang saham, yang mana menurut ketentuan Pasal 107 ayat (3) huruf b dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dalam Perseroan Terbatas terjadi peralihan pemegang saham, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang saham yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil merger atau konsolidasi”.

Adanya peralihan pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan sebenarnya bukan merupakan masalah, namun peralihan pemegang saham tersebut akan menjadi masalah serius apabila pemegang saham minoritas menolak untuk melakukan penggabungan Perseroan Terbatas.

Salah satu tujuan penggabungan Perseroan Terbatas adalah untuk efisiensi perusahaan, untuk terciptanya efisiensi perusahaan, Perseroan Terbatas hasil penggabungan tidak mungkin mempekerjakan semua karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan yang menerima penggabungan, sehingga dengan adanya penggabungan Perseroan Terbatas dapat mengurangi kesempatan kerja bagi karyawan. Berkurangnya kesempatan kerja guna untuk mencapai efisiensi perusahaan diperlukan adanya rasionalisasi karyawan dengan jalan mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penggabungan Perseroan Terbatas dapat pula menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu, terutama terhadap pihak ketiga, khususnya kreditur dan masyarakat.

Dampak penggabungan selain dialami oleh Perseroan Terbatas itu sendiri, pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, karyawan, dan dapat juga dialami oleh kreditur dari perusahaan yang menggabungkan diri. Menurut Pasal 107 ayat (3) huruf a dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

“Aktiva dan passiva perseroan yang digabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil merger atau konsolidasi; dan”

Dari ketentuan tersebut di atas, peralihan aktiva dan passiva yang diakibatkan penggabungan Perseroan Terbatas, terjadi berdasarkan titel umum tanpa adanya penyerahan atau levering, tetapi cukup dengan akta penggabungan. Dengan demikian hak dan kewajiban serta tuntutan terhadap aktiva dan passiva beralih dengan sendirinya kepada perseroan hasil penggabungan perusahaan.

Jadi dengan adanya perubahan status hukum asset Perseroan Terbatas tersebut berarti segala perjanjian utang dan perjanjian lain yang mengakibatkan timbulnya atau lahirnya kewajiban Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri kepada pihak ketiga yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum penggabungan dilakukan, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan. Dengan demikian Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan harus melunasi semua utang Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri yang terjadi sebelum penggabungan dilakukan.

Perubahan status aktiva dan passiva tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat dengan keberadaan utang dan piutang perseroan yang terjadi sebelum penggabungan dilakukan. Hal ini menjadi lebih penting ketika Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan menghadapi tuntutan atau gugatan pihak ketiga, khususnya kreditur atas segala utang yang pernah

diikat oleh Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri sebelum penggabungan dilakukan.

Penggabungan Perseroan Terbatas selain bertujuan untuk meningkatkan sinergi perusahaan, efisiensi dan efektif, penggabungan Perseroan Terbatas secara tidak langsung dapat menimbulkan akibat negatif terhadap persaingan usaha, akibat negatif dari penggabungan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk menjadi tinggi;
- b) Kekuatan pasar "*market power*" menjadi semakin besar yang dapat mengancam pelaku usaha yang lebih kecil.²⁷

Memperhatikan dari akibat negatif yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas terhadap persaingan usaha, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggabungan Perseroan Terbatas yang menghasilkan sinergi kerja pelaku usaha yang lebih efisien dan kuat, memang akan mempunyai kecenderungan untuk penguasaan pasar secara monopoli yang dapat menghilangkan persaingan usaha yang sehat.

Adanya kecenderungan penguasaan pasar secara monopoli dan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat lainnya yang diakibatkan penggabungan perusahaan, pada akhirnya merugikan masyarakat konsumen karena dengan adanya

²⁷ Munir Fuady, op. cit, hal. 143.

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, masyarakat akan membayar lebih tinggi atas suatu produk dan jasa yang dihasilkan oleh Perseroan Terbatas tersebut.

Dampak-dampak penggabungan Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di atas, tidak selalu menguntungkan pihak-pihak tertentu, misalnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat. Pihak-pihak yang dirugikan tersebut secara hukum perlu mendapat perlindungan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas

Seperti diketahui bahwa penggabungan Perseroan Terbatas dilakukan atas dasar pertimbangan dan kepentingan ekonomi dan manajerial semata-mata. Di samping itu pada hakekatnya penggabungan Perseroan Terbatas juga merupakan suatu perbuatan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi atau dapat menimbulkan kerugian baik kepada para pihak yang berkepentingan maupun kepada pihak ketiga, dengan konsekuensi adanya hak dan kewajiban atau tanggung jawab tertentu.

Secara umum, setiap perbuatan hukum selalu mempunyai akibat hukum, dengan konsekuensi timbulnya hak dan tanggung jawab tertentu serta tidak boleh merugikan pihak ketiga. Dalam penggabungan Perseroan Terbatas, akibat hukum yang timbul, adalah hak dan tanggung jawab baik diantara para pihak dan juga terhadap pihak ketiga secara langsung dan masyarakat luas secara tidak langsung sebagaimana telah diuraikan di atas.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari penggabungan Perseroan Terbatas menjadi sangat penting dan mendesak untuk dikaji terlebih dahulu sebelum dilakukannya penggabungan Perseroan Terbatas, mengingat luasnya kemungkinan akibat yang ditimbulkan berkenaan dari pelaksanaan penggabungan perusahaan kepada para pihak maupun kepada pihak ketiga, maka hukum perlu dan harus melakukan intervensi secara intensif dalam rangka suatu tindakan pengamanan.

Setiap akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum, yang mendatangkan kerugian baik bagi pihak-pihak tertentu atau pihak ketiga, maka hukum sebagai instrumen harus memberikan perlindungan hukum bagi-bagi pihak yang dirugikan. Demikian juga dalam penggabungan Perseroan Terbatas, pihak-pihak yang dirugikan perlu mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas dibutuhkan campur tangan hukum guna menjaga keseimbangan para pihak pada satu sisi (keperdataan), dan kepentingan publik pada sisi lain.²⁸

Seperti telah diketahui berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, setiap perbuatan penggabungan perusahaan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

²⁸ Sri Redjeki Hartono, *op.cit*, hal. 3.

Pasal 104

- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:
 - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan
 - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Penggabungan Perseroan Terbatas memang riskan terhadap timbulnya akibat hukum yang merugikan bagi pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 penggabungan Perseroan Terbatas diperlukan adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Keharusan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas, apabila dalam perbuatan hukum penggabungan Perseroan Terbatas merupakan perbuatan hukum yang cukup hanya dapat dilakukan oleh Direksi masing-masing perseroan tanpa mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka tidak mustahil perbuatan hukum penggabungan Perseroan Terbatas itu dapat merugikan para pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, dan apabila telah terlanjur dilakukan maka sulit bagi pemegang saham itu untuk mengoreksinya kembali.

Dalam suatu perseroan apabila terdapat perbedaan pemilikan saham perseroan dengan selisih jumlah yang begitu besar, maka akan dijumpai adanya pemegang saham mayoritas pada satu pihak dan di lain pihak adalah pemegang saham minoritas, juga dengan perbedaan jumlah hak suara yang mencolok.

Pengalaman di masa lampau menunjukkan bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan

Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan atau Perseroan Terbatas pada prinsipnya "*Persona Standi In Judicio*" atau "*capacity standing in court or in judgment*"²⁹, yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dilakukan oleh organ perseroan. Jadi nampak suatu diskriminasi yang jelas antara yang kuat dan yang lemah, walaupun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, namun tanpa adanya suatu instrumen bagi pihak yang lemah untuk mempertahankan haknya apabila hendak menuntut pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 511 ayat (4) dinyatakan bahwa surat saham dinyatakan dipandang sebagai barang bergerak. Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Demikian juga Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, juga dinyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan pada pemegangnya. Dijelaskan pula bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

²⁹ I.G. Rai Widjaya, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Mega Poin, Jakarta, 2000, hal. 202..

Secara umum, pemegang saham mempunyai hak perseorangan "*personal rights*", pemegang saham selaku subyek hukum mempunyai hak perseorangan yang dapat dipertahankan serta dapat dituntut pelaksanaan haknya. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Gugatan terhadap perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hak untuk mengajukan gugatan tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang baik bagi pemegang saham, namun demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut adalah pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas dapat menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan, meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain hak perseorangan, Undang-Undang memberikan hak suara khusus kepada pemegang saham minoritas dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan baik oleh Direksi dan ataupun oleh Komisaris.

Sebagai subyek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang yang akan merugikan kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2), pemegang saham minoritas mempunyai dua pilihan dalam menghadapi rencana perseroan untuk melakukan merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) atau akuisisi (pengambilalihan).³⁰ Pilihan pertama, pemegang saham minoritas dapat melaksanakan hak yang diberikan oleh Pasal 104 ayat (2) untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar.³¹

Dalam hal hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar itu tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan pilihan kedua, yaitu tidak menyetujui rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi dan

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Upaya Penyehatan Perusahaan*, Makalah Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta tanggal 10-11 September 1997, hal. 15.

³¹ Ibid, hal. 15.

melaksanakan haknya yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang tersebut.³²

Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Penjualan, penjaminan, pertkaraan sebagian besaar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
 - c. Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.

Sedangkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan sebagai berikut:

- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk membeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain.

Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengatur hak para pemegang saham yang disebut "*appraisal remedy*" atau yang juga

³² Ibid, hal. 16.

disebut "*appraisal rights*". Yang dimaksud "*appraisal remedy*" atau "*appraisal rights*" adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memungkinkan para pemegang saham yang rentan terhadap keputusan yang diambil oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyatakan hanya terhadap keputusan itu dan meminta agar perseroan membeli saham mereka dengan harga yang terjadi sebelum diambilnya keputusan tersebut dan selanjutnya menarik diri dari perseroan yang bersangkutan.³³

Dalam hal pemegang saham minoritas menolak penggabungan perusahaan dan tidak menyetujui harga jual sahamnya, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, pemegang saham tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan penggabungan perusahaan. Pasal 54 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi atau Komisaris. Apabila dianggap perlu, pemegang saham minoritas dapat juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, agar terhadap perseroan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

³³ Henry Cambell Black's, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, SA. Paul Minn, 1979

Pasal 110

- (1). Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Dalam penggabungan Perseroan Terbatas sering dijumpai adanya jual beli saham melalui konversi saham. Namun menurut Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tidak memuat tata cara konversi saham, khususnya dalam hal adanya penggabungan perusahaan.³⁴

Selain pemegang saham, pihak yang sering dirugikan dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas adalah karyawan. Karyawan berdasarkan struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan, ditempatkan sebagai pihak yang sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya.

Menurut hukum kita, dari segi "*Corporate Law*" kedudukan karyawan di perusahaan lebih lemah dari kedudukan pihak lain seperti pemegang saham, Direktur atau Komisaris. Karyawan dikatakan sebagai pihak yang sangat lemah karena sama sekali tidak dilibatkan dalam penentuan "*policy*" maupun operasional perusahaan.

Karyawan dalam perusahaan yang akan melakukan penggabungan, merupakan salah satu pihak yang mesti sangat diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum penggabungan dilakukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan karyawan dalam hubungan adanya penggabungan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

³⁴ Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 5 Maret 2002.

1. Prinsip-prinsip umum mengenai kebijaksanaan kesejahteraan sosial yang akan diterapkan setelah penggabungan Perseroan Terbatas.
2. Waktu yang pantas untuk berkonsultasi dengan organisasi pekerja.
3. Cara dan saat untuk menginformasikan penggabungan Perseroan Terbatas kepada pekerja.
4. Cara-cara untuk mencegah atau setidaknya mengeliminir kemungkinan kerugian materiil kepada pihak pekerja, termasuk memberikan kompensasi yang bersifat materiil.
5. Aktivitas khusus dari organisasi pekerja dalam perusahaan.
6. Suatu garansi terhadap keamanan dan ketersediaan pekerjaan setelah penggabungan Perseroan Terbatas.³⁵

Dalam penggabungan Perseroan Terbatas selalu diikuti dengan pengalihan status karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri ke perusahaan yang menerima penggabungan. Pengalihan status karyawan yang diakibatkan dari tindakan penggabungan perusahaan tidak bisa dikategorikan sama dengan peralihan harta kekayaan atau asset,³⁶ walaupun menurut teori manajemen bahwa asset bukan berarti sebagai benda yang bertubuh. Apabila karyawan sebagai asset dalam pengertian benda, maka karyawan sebagai faktor produksi dan hal ini

³⁵ Munir Fuady, op. cit, hal. 128

³⁶ Wawancara dengan S. Lumban Gaol, Direktur Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta, tanggal 26 Pebruari 2002.

sangat bertentangan dengan konsep hubungan perburuhan yang berkembang di Indonesia.³⁷

Pengertian asset dapat diartikan sebagai kemampuan memproduksi atau dapat disebut sebagai produktivitas kerja yang dapat diukur dengan kalori dan dapat dinilai dengan uang. Pengalihan produktivitas kerja yang dapat dinilai dengan uang dapat mudah untuk dilaksanakan, berbeda dengan karyawan, sebagai manusia ia memiliki nilai bukan dalam bentuknya tetapi dalam kemampuan beraktivitasnya. Kemampuan beraktivitas merupakan sinergi dari kemampuan kognitif, efektif dan motorik yang dimiliki manusia. Kemampuan ini dapat dinilai berdasarkan perbandingan antara besar energi tubuh dalam melakukan aktivitas dengan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu.³⁸ Dengan demikian, konsep pengalihan karyawan tidak bisa disamakan dengan pengalihan harta kekayaan atau dengan kata lain peralihan karyawan tidak termasuk dalam lingkup pengalihan kekayaan atau asset.

Hal ini senada dengan pengertian perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian pada umumnya. Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi sebagai berikut:

³⁷ Wawancara dengan S. Lumban Gaol, Direktur Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta, tanggal 26 Pebruari 2002.

³⁸ Wawancara dengan S. Lumban Gaol, Direktur Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta, tanggal 26 Pebruari 2002.

“Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”

Dari pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dapat dikatakan bahwa perjanjian kerja merupakan perjanjian khusus karena yang diperjanjikan adalah manusia sendiri, oleh karena itu dalam perjanjian kerja karyawan dapat berperan sebagai obyek sekaligus subyek hukum dari perjanjian perburuhan.

Karyawan sebagai obyek dari perjanjian karena karyawan mempunyai kemampuan yang dinilai ekonomis yaitu produktifitas kerja sedangkan sebagai subyek, karyawan merupakan kodrati yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berkembang. Perkembangan ini merupakan dinamika yang selalu berubah, aktif dan tidak pernah berhenti.³⁹

Dalam penggabungan Perseroan Terbatas, seringkali dilakukan dengan alasan efisiensi dengan melakukan rasionalisasi usaha, setelah penggabungan dilaksanakan sebagian karyawan diputuskan hubungan kerjanya. Dalam sistem hukum kita hampir tidak ada upaya hukum apapun untuk menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, dalam hal perlindungan karyawan yang diakibatkan penggabungan

³⁹ N. Dirjarkara, S.J, *Filsafat Manusia*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1984, hal 51.

Perseroan Terbatas tidak memberikan pengaturan secara jelas, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah memberikan isyarat agar dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas memperhatikan kepentingan karyawan sebagaimana tertuang dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Sebagai perbandingan pengaturan merger di beberapa negara, pengaturan penggabungan Perseroan Terbatas memuat juga ketentuan yang mensyaratkan beralihnya setiap kontrak kerja atas atau kesepakatan kerja bersama dari perusahaan yang dilebur kepada perusahaan yang melakukan "*merger by the operation of law*". Jadi dengan adanya penggabungan Perseroan Terbatas secara otomatis terjadi peralihan karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan yang menerima penggabungan.

Di Indonesia belum mempunyai ketentuan sebagaimana tersebut diatas, bahkan ketentuan perburuhan di Indonesia, memperbolehkan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, asal dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun dengan alasan peningkatan efisiensi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 hanya memberikan rambu-rambu dalam Pasal 104, tanpa memberikan pengaturan yang lebih konkrit mengenai perlindungan karyawan dalam hal terjadinya penggabungan Perseroan Terbatas, namun dalam hal perlindungan hukum bagi karyawan akibat penggabungan Perseroan Terbatas sudah melangkah lebih maju dalam memberikan perlindungan hukum bagi karyawan, hal ini terlihat dalam pengaturan ketenagakerjaan yang

termuat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan, dalam Pasal 28 memberikan pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja karena perubahan status atau perubahan kepemilikan perusahaan, Pasal 28 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena perubahan status atau perubahan kepemilikan perusahaan sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dengan syarat-syarat kerja baru yang sama dengan syarat-syarat kerja lama dan pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka kepada pekerja dibayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena perubahan status atau perubahan kepemilikan perusahaan sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya dengan alasan apapun, maka pekerja berhak atas uang

pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23, dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain.

- (3) Kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada pengusaha baru, kecuali diperjanjikan lain antara lain antara pengusaha lama dengan pengusaha baru.

Ketentuan mengenai besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian bagi karyawan yang menolak melanjutkan kerja dan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat adanya penggabungan perusahaan, diatur dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Di Perusahaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Besarnya uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah;

UPT-PUSTAK-UNDIP

- b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang
dari 2 tahun. 2 bulan upah;
- c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang
dari 3 tahun..... 3 bulan upah;
- d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang
dari 4 tahun..... 4 bulan upah;
- e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang
dari 5 tahun..... 5 bulan upah;
- f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang
dari 6 tahun..... 6 bulan upah;
- g. Masa kerja 6 tahun atau lebih..... 7 bulan upah

Pasal 23

Besarnya uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 6 tahun 2 bulan upah;
- b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 9 tahun..... 3 bulan upah;
- c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 12 tahun..... 4 bulan upah;

- d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 15 tahun..... 5 bulan upah;
- e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 18 tahun..... 6 bulan upah;
- f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 21 tahun..... 7 bulan upah;
- g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 24 tahun..... 8 bulan upah;
- h. Masa kerja 24 tahun atau lebih..... 10 bulan upah;

Pasal 24

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi:

- a. Ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
- b. Ganti kerugian untuk istirahat panjang bilamana di perusahaan yang bersangkutan berlaku peraturan istirahat panjang dan pekerja belum mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa kerja pekerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat mengambil istirahat panjang.
- c. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ketempat dimana pekerja diterima bekerja.

d. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja.

e. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat.

Ketentuan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian bagi karyawan perusahaan yang melakukan penggabungan menurut Pasal 28, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila dalam penggabungan Perseroan Terbatas karyawan menolak untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan, maka karyawan berhak untuk memperoleh:

1. Uang pesangon $= 1 \times \text{Pasal 22}$
2. Uang penghargaan masa kerja $= 1 \times \text{Pasal 23}$
3. Uang ganti kerugian $= 1 \times \text{Pasal 24}$

Sedangkan apabila dalam penggabungan Perseroan Terbatas, pengusaha Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan tidak bersedia menerima pekerja dari perusahaan yang menggabungkan diri, maka karyawan berhak menerima:

1. Uang pesangon $= 2 \times \text{Pasal 22}$
2. Uang Penghargaan masa kerja $= 1 \times \text{Pasal 23}$
3. Uang Ganti Kerugian $= 1 \times \text{Pasal 24}$

Kepentingan lain yang harus dilindungi dalam Perseroan Terbatas adalah kreditur yang memiliki tagihan pada perseroan asal yang terkait dalam penggabungan Perseroan Terbatas. Penggabungan Perseroan Terbatas senantiasa diikuti dengan pengalihan aktiva dan passiva (asset) perusahaan yang dapat berupa utang. Karena adanya pengalihan tersebut, status kreditur beralih dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil penggabungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perlindungan hukum bagi kreditur dapat dijumpai pada Pasal 104 ayat (1) huruf b, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) huruf f angka 3, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 33.

Pasal 5

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 5 ditegaskan bahwa ketentuan ini merupakan pelaksanaan prinsip hukum perjanjian. Kreditur dalam hal ini adalah kreditur perseroan yang melakukan penggabungan atau peleburan diri atau yang akan mengambilalih dan diambilalih.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f angka 3 ditegaskan bahwa Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan harus mencantumkan klausul cara menyelesaikan hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga.

Sedangkan dalam Pasal 11 ditentukan bahwa rancangan penggabungan juga harus memuat penegasan dari perseroan yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri.

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur tercantum juga pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang memuat kewajiban Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan untuk mengumumkan ringkasan atas rancangan penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Pengumuman ringkasan atas rancangan penggabungan tersebut di atas dimaksudkan agar masyarakat dan atau pihak kreditur mengetahui adanya penggabungan Perseroan Terbatas.

Selanjutnya puncak dari jaminan perlindungan hukum kepada kreditur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, adalah tercantum pada Pasal 33 yaitu Direksi berkewajiban menyampaikan surat-surat tercatat mengenai rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kepada seluruh kreditur paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam rangka pemberian perlindungan hukum tersebut kreditur dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan memutus rancangan penggabungan yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut, dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur dianggap menyetujui penggabungan Perseroan Terbatas tersebut.

Sedangkan apabila kreditur mengajukan keberatan, maka keberatan kreditur tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna mendapat penyelesaian. Selama keberatan yang diajukan kreditur tersebut belum mendapat penyelesaian, maka penggabungan Perseroan Terbatas tidak dapat dilaksanakan. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam penggabungan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kepada seluruh kreditur paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus mengenai rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur dianggap menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

(4) Keberatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.

(5) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum tercapai, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

Ketentuan Pasal 33 tersebut di atas dipertegas dalam penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 33

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi Direksi untuk memberitahu kreditur lebih awal dengan menyampaikan usulan rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Pada saat penyampaian rancangan tersebut sekaligus pula dicantumkan tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (4)

Pengertian penyelesaian dalam hal ini tidak harus berarti pembayaran kembali piutang seketika, tetapi dapat juga berupa kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditur.

Mengenai perlindungan terhadap kreditur, Yunus Husein mengemukakan bahwa kepentingan lain yang harus dilindungi adalah kepentingan masyarakat atau

kreditur yang memiliki tagihan pada perseroan asal yang terkait dengan merger, konsolidasi dan akuisisi. Dengan demikian seluruh hak, kewajiban dan tuntutan terhadap perseroan asal akan beralih kepada perseroan hasil merger dan konsolidasi.⁴⁰

Selain pihak-pihak tersebut di atas, yang perlu mendapat perlindungan hukum dalam penggabungan Perseroan Terbatas adalah masyarakat dalam hal penggabungan perusahaan tersebut mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu masyarakat harus mendapat perlindungan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya telah terakomodasi dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, namun perlindungan hukum yang diberikan kedua peraturan tersebut masih minim dan sederhana serta belum ada sanksi hukum bagi pihak yang melanggar, sehingga ketentuan monopoli pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 dianggap kurang memadai.⁴¹

⁴⁰ Yunus Husein, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Makalah Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 10-11 September 1997.

⁴¹ Wawancara dengan Kurnia Sjahrane, Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 25 Pebruari 2002.

Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap persaingan usaha tidak sehat, mendapat angin segar setelah Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1999 mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana penggabungan Perseroan Terbatas menjadi salah satu obyek pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.

Ketentuan dilarangnya penggabungan Perseroan Terbatas yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28 dan Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1). Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- (2). Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1). Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai asset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
- (2). Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Meskipun Pasal 28 dan Pasal 29 tersebut di atas, dipandang telah cukup untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan penggabungan Perseroan Terbatas, namun untuk efektifnya aspek pelaksanaan hukum "*law enforcement*" dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dibutuhkan suatu badan independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi, oleh karena itu dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁴²

⁴² Wawancara dengan M. Nawir Messi, Direktur Eksekutif Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, tanggal 26 Februari 2002.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertanggung jawab pada Presiden, dalam hal penggabungan Perseroan Terbatas, komisi ini mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap perjanjian penggabungan Perseroan Terbatas yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan menjatuhkan sanksi administratif baik berupa pembatalan perjanjian penggabungan Perseroan Terbatas dan sanksi denda bagi pelanggarnya.⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memberikan peluang kepada masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat untuk melaporkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan diberikannya kesempatan untuk memberi laporan atau adanya dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berarti secara tidak langsung masyarakat diberikan perlindungan hukum untuk kepentingan mereka sendiri.

Pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat dengan cara melaporkan atau menyampaikan dugaan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga berlaku bagi penggabungan Perseroan Terbatas yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

⁴³ Wawancara dengan M. Nawir Messi, Direktur Eksekutif Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, tanggal 26 Februari 2002

Penyampaian laporan atau dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh masyarakat atau oleh lembaga swadaya masyarakat merupakan perlindungan hukum yang lebih efektif karena masyarakat merupakan pihak yang pertama kali merasakan akibat dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan adanya kenaikan harga barang dan atau jasa yang tidak wajar.

Tata cara penyampaian laporan dari masyarakat diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai pelaksanaan Pasal 38, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tanggal 8 September 2000 Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Laporan adanya dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia, laporan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tanggal 8 September 2000 Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Laporan dibuat dengan uraian yang jelas mengenai telah terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

(2) Laporan harus dilengkapi dengan:

- a. Nama dan alamat lengkap pelapor; dan
- b. Surat dan atau dokumen serta informasi pendukung lain yang memperkuat dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

(3) Komisi menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Setelah Komisi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi segera menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penanganan perkara. Tata cara penanganan perkara diatur pada Bab VII mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Juncto Pasal 14 sampai Pasal 25 Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tanggal 8 September 2000 Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Setelah laporan memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan Ketua Komisi melalui nota dinas menugaskan kepada sekretaris Komisi untuk melakukan penelitian kelengkapan laporan. Segera setelah menerima laporan lengkap dan resume laporan dari sekretaris, Ketua Komisi menyampaikan berkas laporan tersebut kepada Komisi dengan permintaan agar Komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang mewajibkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk, berdasarkan laporan yang telah diterima, melakukan pemeriksaan pendahuluan. Dari pemeriksaan pendahuluan tersebut, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima laporan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib menetapkan perlu atau tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan perlu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Selanjutnya jika diperlukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam rangka pemeriksaan lanjutan, Undang-Undang memberikan hak kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mendengar keterangan saksi, saksi ahli dan atau pihak lain yang relevan.

Dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi melakukan penilaian terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan atau ada atau tidak ada kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Dalam melakukan penilaian majelis menilai kebenaran alat bukti, alat bukti pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berupa:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat dan atau dokumen;

4. Petunjuk;
5. Keterangan pelaku usaha.

Majelis Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan, jika diperlukan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Majelis Komisi paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja. Setelah itu Kantor Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Keputusan ini dilakukan dalam suatu sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota komisi. Setelah membacakan putusan, Majelis Komisi segera memberitahukan Putusan Komisi kepada terlapor.

Terhadap Putusan Komisi, terlapor dapat mengajukan keberatan dalam waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak menerima Pemberitahuan. Apabila terlapor tidak mengajukan keberatan maka Putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebagai putusan akhir (final). Sebagai konsekuensinya putusan tersebut bersifat eksekutorial, dengan pengertian bahwa putusan tersebut dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Undang-Undang menentukan bahwa dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jika putusan tersebut tidak dijalankan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan pelaku usaha yang tidak menerima putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah pemberitahuan putusan tersebut diterima. Pengadilan tersebut harus memeriksa keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha dalam 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut, dan harus memberikan putusan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

Selanjutnya, jika terdapat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri maka pihak yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak putusan dijatuhkan. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Berikut ini kami sajikan tabel waktu penanganan dan penyelesaian perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kaitannya dengan lembaga peradilan yang ada:

TABEL 7.

WAKTU PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA OLEH KPPU

No.	Pasal	Deskripsi (uraian)	Hari
1	39 (1)	Pemeriksaan Pendahuluan	30
2	43 (1)	Pemeriksaan lanjutan	60
3	43 (1)	Perpanjangan waktu pemeriksaan lanjutan	30
4	43 (3)	Putusan ada tidaknya pelanggaran	30
5	43 (4)	Penyempaian Putusan	-
6	44 (1)	Pelaksanaan Putusan	30
Tingkat KPPU		Sub Total hari	180
7	44 (2)	Pengajuan Keberatan ke PN	14
8	45 (1)	Pemeriksaan Keberatan	14
9	45 (2)	Putusan Atas Keberatan	30
Tingkat PN		Sub Total hari	58
10	45 (3)	Kasasi Ke Mahkamah Agung	14
11	45 (4)	Putusan Kasasi oleh MA	30
Tingkat Kasasi		Sub Total hari	44

Sumber : Komisi Pengawas Persaingan Usaha

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya Perseroan Terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagian dari Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewarisan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki badan hukum, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan Terbatas, yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan definisi bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar".

Dalam menjalankan perusahaan, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan perseroan, serta berwenang mewakili perseroan. Oleh karena itu keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki Direksi, karena perseroan sebagai "*artificial person*" tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai "*natural person*".⁴⁴

Tugas dan tanggung jawab Direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian keberadaan Direksi dalam suatu perseroan juga diatur berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Dengan pengecualian, untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam akta pendirian. Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam anggaran dasar perseroan, tanpa mengurangi hak pemegang saham. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi, besar dan jenis pekerjaan anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

⁴⁴ I.G. Rai Widjaya, op. cit, hal. 208.

Selain mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi juga bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)

Jadi selain bertanggung jawab penuh atas pengelolaan, Direksi juga bertindak mewakili perseroan "*persona standi in judicio*"⁴⁵. Dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, maka setiap anggota Direksi wajib beritikad baik "*in good faith*" dan penuh tanggung jawab "*full responsibility*"⁴⁶. Namun apabila tidak demikian, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana yang dibebankan dan diwajibkan kepadanya.

Selain mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab tersebut di atas, Direksi mempunyai kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi wajib:
 - a. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan risalah rapat Direksi; dan

⁴⁵ Wawancara dengan Notaris Vidhya Shah, SH, Jakarta, 2 Mei 2002.

⁴⁶ Wawancara dengan Notaris Vidhya Shah, SH, Jakarta, 2 Mei 2002.

- b. Menyelenggarakan pembukuan perseroan yang semuanya disimpan di tempat kedudukan perseroan.

Pemegang saham dapat mengajukan permohonan untuk memeriksa dan mendapat salinan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan seperti tersebut pada huruf a dan b di atas dengan izin Direksi.

- 2) Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang, seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik serta mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan. Dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- 3) Direksi wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan juncto Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 Tahun 1998:
 - a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman (yaitu setelah perseroan memperoleh status badan hukum);

- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan tertentu yang bersifat mendasar seperti dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- c. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman atas perubahan selain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pendaftaran, Direksi wajib mengumumkan akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan atau persetujuan dan telah diterima laporan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Kehakiman serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilaksanakan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Selain itu, anggota Direksi juga bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kerugian yang diderita oleh pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum karena perolehan saham oleh perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- 4. Anggota Direksi wajib dan atau keluarganya (isteri/suami dan anak-anaknya) melaporkan kepemilikan sahamnya pada perseroan tersebut.

5. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.
6. Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengurangan modal perseroan kepada semua kreditur dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan.
7. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila:
 - a. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat (Bank, Asuransi dan Danareksa).
 - b. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang (obligasi); atau
 - c. Perseroan merupakan perseroan terbuka.
8. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham adalah kewajiban Direksi.
9. Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.

Selain Direksi, Perseroan Terbatas mempunyai organ yang disebut Komisaris. Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Fungsi kontrol dan pemberian nasihat ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:⁴⁷

- a) Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b) Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan "*fiduciary duty*".
- c) Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai pemilikan sahamnya dan atau keluarganya (suami/isteri dan anak-anaknya) pada perseroan tersebut. Demikian juga setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan mengenai hal ini dicatat dalam Daftar Khusus yang merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan pengurus perseroan yang bersangkutan, sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil-kecilnya

⁴⁷ Wawancara dengan Notaris Bambang Suprianto, SH., Jakarta, 1 Mei 2002.

Dalam hal penggabungan Perseroan Terbatas, Direksi dan Komisaris mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Dalam rangka menjalankan usaha perseroan, khususnya apabila perseroan tersebut akan melaksanakan penggabungan perusahaan, maka Direksi dan Komisaris mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.⁴⁸

Sesuai ketentuan Pasal 102, dalam hal penggabungan Perseroan Terbatas, Direksi masing-masing perseroan menyusun rencana penggabungan yang dituangkan dalam rancangan penggabungan. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum atau meminimalkan resiko penggabungan Perseroan Terbatas yang akan merugikan pihak-pihak tertentu, maka dalam penyusunan rancangan penggabungan, Direksi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memperhatikan:

- 1) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil-hasil penggabungan, dan cara penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, hal ini dimaksudkan agar kepentingan pihak ketiga, khususnya kreditur terlindungi;
- 2) Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri, hal ini diharapkan agar masalah karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri

⁴⁸ Wawancara dengan Notaris Bambang Suprianto, SH, Jakarta, 1 Mei 2002.

dapat diperhatikan, sehingga dalam penggabungan Perseroan Terbatas yang akan dilaksanakan tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

- 3) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan, hal ini dimaksudkan agar pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dapat memperoleh haknya, yaitu untuk menjual sahamnya secara wajar dan bebas menawarkan sahamnya kepada pihak yang berminat.⁴⁹

Selanjutnya Direksi wajib mengumumkan rancangan penggabungan Perseroan Terbatas dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 105 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Kewajiban untuk mengumumkan rancangan penggabungan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau kreditur untuk mengajukan keberatan terhadap penggabungan perusahaan tersebut.

Setelah rancangan penggabungan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi wajib untuk mengajukan persetujuan, menyampaikan laporan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan perusahaan dengan melampirkan rancangan penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

⁴⁹ Wawancara dengan Notaris Sovyedi Andasasmita, SH, Jakarta, tanggal 2 Mei 2002.

Setelah Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan mendapat persetujuan, telah diterimanya laporan dan pemberitahuan oleh Menteri Kehakiman, Direksi mempunyai kewajiban untuk mengumumkan hasil penggabungan Perseroan Terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan perusahaan dilakukan (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Ketentuan kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam hal pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut di atas, kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam penggabungan Perseroan Terbatas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- a) Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan. Usulan rencana penggabungan tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris (Pasal 7);
- b) Direksi wajib menyusun rancangan penggabungan, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana penggabungan (Pasal 9);

- c) Direksi wajib mengumumkan ringkasan rencana penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Direksi wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan (Pasal 9);
- d) Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan, penyampaian laporan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Departemen Perdagangan dan Perindustrian serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara RI (Pasal 14);
- e) Terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan, Direksi perseroan yang menggabungkan diri tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum apapun, kecuali perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penggabungan. Apabila Direksi melanggar ketentuan tersebut, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi yang bersangkutan (Pasal 19);
- f) Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan wajib menyampaikan surat tercatat rancangan penggabungan kepada seluruh kreditur, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 33);

- g) Direksi perseroan hasil perseroan wajib mengumumkan hasil penggabungan Perseroan Terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) terhitung sejak berlakunya penggabungan (Pasal 34);
- h) Dalam proses pelaksanaan penggabungan Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Apabila terjadi benturan kepentingan antara perseroan dengan Direksi, maka Direksi perseroan wajib menuangkan hal tersebut dalam usulan rencana dan rancangan penggabungan. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Komisaris.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disajikan pembahasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa saat ini penggabungan Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 102 sampai Pasal 109 dan Pasal 76, dan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut pemerintah pada tanggal 24 Pebruari 1998 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Peraturan

Pemerintah tersebut merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur penggabungan Perseroan Terbatas.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan ketentuan umum "*lex generalis*" dari perbuatan hukum penggabungan Perseroan Terbatas yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas, namun dalam penggabungan Perseroan Terbatas yang berstatus khusus, seperti Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing, Perseroan Terbatas dengan bidang usaha perbankan, Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka "*go public*" selain berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas sebagai ketentuan umum dari perbuatan hukum penggabungan Perseroan Terbatas, juga berlaku ketentuan khusus "*lex specialis*" dalam bidang yang berkaitan dengan usaha tersebut.

Dalam hal Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan salah satu atau seluruhnya di bidang perbankan, maka disamping berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, juga berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Demikian juga penggabungan Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh perseroan yang bersifat terbuka "*go public*" di samping berlaku Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, juga berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Pemberlakuan ketentuan khusus tersebut, dimungkinkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 memberikan peluang berlakunya ketentuan khusus tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara khusus penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan.

Ketentuan umum mengenai penggabungan Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan sudah memadai dalam memberikan pengaturan penggabungan karena kedua ketentuan tersebut lebih komprehensif dibandingkan pengaturan penggabungan sebelum berlakunya kedua peraturan tersebut. Pengaturan penggabungan Perseroan Terbatas sebelumnya masih bersifat sektoral yang pengaturannya masih di bawah Undang-Undang, antara lain dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Merger Bank dan Bank Perkreditan Rakyat. Dan dasar

hukum utamanya adalah hukum kontraktual yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sehingga dengan diterbitkannya kedua peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa tindakan penggabungan sudah memasuki era kepastian hukum.

Untuk berhasilnya pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas dibutuhkan studi kelayakan yang berupa pengumpulan data-data atau informasi yang diperlukan untuk penggabungan Perseroan Terbatas dan langkah-langkah awal proses penggabungan Perseroan Terbatas.

Data atau informasi yang pertama kali diperlukan adalah Data Ekonomi, yang berupa keadaan pasar, keuntungan perusahaan dan teknologi serta pembiayaan. Data atau informasi mengenai ekonomi tersebut digunakan untuk menganalisa bagaimanakah peluang-peluang ekonomi yang diperoleh akibat penggabungan Perseroan Terbatas, misalnya apakah dengan melaksanakan penggabungan perusahaan akan memperoleh peningkatan pangsa pasar, ada tidaknya penambahan sinergi perusahaan, apakah dengan dilakukannya penggabungan perusahaan akan ada peningkatan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan tidak melakukan penggabungan.

Analisa teknologi digunakan untuk menganalisa apakah dengan penggabungan Perseroan Terbatas terjadi peningkatan teknologi atau adanya alih teknologi, sedangkan analisa pembiayaan digunakan untuk memperoleh gambaran tentang besar pembiayaan yang dibutuhkan untuk melakukan penggabungan

perusahaan serta pembiayaan yang dibutuhkan untuk melakukan penggabungan tertutupi oleh keuntungan yang akan diperoleh setelah penggabungan itu dilakukan.

Dari analisa-analisa tersebut di atas, diharapkan dapat membantu untuk menentukan apakah penggabungan perusahaan dari segi ekonomi dapat dilanjutkan atau tidak.

Selain data atau informasi ekonomi, dibutuhkan pula data atau informasi yang berhubungan dengan aspek hukum dalam penggabungan Perseroan Terbatas. Aspek hukum yang perlu dianalisa, antara lain mengenai kepemilikan saham, struktur hukum perusahaan, Komisaris, struktur manajemen, persyaratan pelaporan/perizinan dan komunikasi dengan pekerja.

Analisa mengenai kepemilikan saham dari masing-masing perusahaan baik dari perusahaan yang menggabungkan maupun perusahaan yang menerima penggabungan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran apakah semua pemilik saham setuju dilaksanakannya penggabungan perusahaan, dan apabila ada pemegang saham yang tidak setuju dilaksanakannya penggabungan bagaimana jalan keluar yang akan ditempuh serta bagaimana struktur kepemilikan saham setelah terjadinya penggabungan perusahaan.

Analisa aspek hukum tentang kepemilikan saham dibutuhkan karena merupakan langkah awal untuk terlaksananya penggabungan perusahaan, sebab jadi atau tidaknya penggabungan Perseroan Terbatas juga ditentukan oleh pemegang

saham, apakah pemegang saham setuju atau tidak dilaksanakannya penggabungan perusahaan.

Dalam penggabungan Perseroan Terbatas juga diperlukan analisa mengenai struktur hukum perusahaan, analisa tersebut digunakan untuk menentukan status hukum dari perusahaan hasil merger, apakah perseroan hasil penggabungan akan berstatus sebagai perseroan dengan fasilitas penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri atau akan menjadi Perseroan Terbatas bersifat terbuka "*go public*" serta apakah perseroan hasil penggabungan nantinya akan bergerak dalam usaha yang sama atau berubah bidang usahanya.

Analisa Dewan Komisaris dan komposisinya digunakan untuk menyusun struktur Komisaris dari perusahaan hasil penggabungan, apakah akan berasal dari perusahaan yang terlibat dalam penggabungan, atau dari pihak luar serta untuk menentukan jumlah Komisaris dalam struktur perusahaan hasil penggabungan.

Demikian juga mengenai Dewan Direksi perlu dianalisa pula mengenai komposisinya, apakah untuk perseroan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing dibutuhkan Direksi dari dalam negeri atau asing.

Struktur dan komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi seharusnya didasarkan pada kebutuhan perusahaan, jumlahnya tidak lebih dan tidak kurang sehingga struktur dan komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi menjadi ideal dan diharapkan efisiensi dan efektifitas bagi perusahaan akan terwujud.

Penggabungan perusahaan dibutuhkan beberapa perijinan dari pihak yang berwenang, untuk itu dibutuhkan analisa persyaratan pelaporan dan perijinan. Analisa ini digunakan untuk mempelajari atau mengetahui persyaratan, pelaporan dan perijinan yang diperlukan bagi Perseroan Terbatas serta jadwal waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan penggabungan perusahaan, sehingga dengan analisa ini pelaksanaan penggabungan perusahaan diharapkan dapat tepat waktu dan tidak terbentur dengan perijinan yang harus dipenuhi, sehingga menghemat biaya karena apabila penggabungan tidak tepat waktu, selain biaya untuk penggabungan perusahaan akan bertambah juga akan berpengaruh pada produksi pada perusahaan tersebut.

Analisa data sosial juga dibutuhkan dalam penggabungan Perseroan Terbatas. Analisa ini digunakan untuk mencegah terjadinya overlapping pekerjaan, menjamin ketersediaan pekerjaan dan keamanan kerja di perusahaan akibat ada penambahan tenaga kerja atau karyawan yang diakibatkan penggabungan perusahaan.

Sedangkan yang berhubungan dengan masalah kepersonaliaan dibutuhkan analisa kebijaksanaan personil. Analisa ini digunakan untuk menetapkan besarnya upah serta tunjangan-tunjangan yang harus diberikan kepada karyawan serta menentukan pola recruitment, pola training, pola kerja dan pendidikan bagi karyawan setelah penggabungan perusahaan.

Berdasarkan analisa-analisa tersebut di atas, dalam penggabungan Perseroan Terbatas memang dibutuhkan analisa-analisa sebelum pelaksanaan penggabungan. Oleh karena agar analisa-analisa yang dihasilkan akurat, maka dibutuhkan keterlibatan pihak profesional dalam penggabungan perusahaan, seperti konsultan hukum, akuntan, appraiser, konsultan pajak, konsultan manajemen, konsultan pemasaran dan lain-lain.⁵⁰

Setelah diperoleh data yang diperlukan dan dianalisa selanjutnya dilakukan langkah-langkah awal proses penggabungan Perseroan Terbatas yang merupakan kelanjutan dari langkah sebelumnya. Langkah-langkah awal tersebut berupa melakukan "*due diligence*", melakukan taksiran harga perusahaan atau saham perusahaan target, membuat checklist dan beberapa tindakan yuridis lainnya.

Hal yang penting dalam langkah awal proses penggabungan perusahaan, yaitu menentukan perusahaan yang akan menggabungkan atau perusahaan target dengan jalan melakukan penelitian terhadap perusahaan target tersebut. Penelitian "*due diligence*" ini penting karena pada umumnya perusahaan yang akan menggabungkan dalam keadaan "sakit", sedangkan perusahaan yang menerima penggabungan pada umumnya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian terhadap perusahaan target agar dalam penggabungan perusahaan nanti, perusahaan yang menerima tidak menjadi terpuruk seperti perusahaan target.

⁵⁰ Munir Fuady, op. cit, hal. 42

Melakukan taksiran harga perusahaan atau saham perusahaan target dalam langkah awal proses penggabungan perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh jumlah taksiran besarnya jumlah asset perusahaan target, termasuk di dalamnya kewajiban, utang dan lain-lain. Di samping untuk memperoleh taksiran jumlah asset perusahaan, juga untuk menentukan jumlah saham, struktur saham dan pemegang saham. Hal ini diperlukan untuk menentukan harga yang wajar apabila pemegang saham perusahaan target menolak penggabungan perusahaan dan kemudian menjual saham yang dimilikinya.

Setelah melakukan taksiran harga perusahaan atau harga saham, langkah awal berikutnya adalah proses integrasi dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan. Proses integrasi ini dilakukan baik pada saat proses penggabungan maupun setelah penggabungan perusahaan. Proses integrasi ini dimaksudkan untuk mencegah adanya dualisme kepentingan atau benturan kepentingan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan. Jadi proses integrasi ditujukan bukan semata-mata bersatunya perusahaan secara formal, melainkan bersatunya sikap, tindak, cara pandang dan visi ke depan dari perusahaan. Dalam melakukan integrasi dibutuhkan data atau informasi sebagaimana tersebut di muka.

Langkah awal proses penggabungan Perseroan Terbatas selanjutnya adalah melakukan beberapa tindakan hukum lainnya, karena dalam penggabungan Perseroan Terbatas faktor hukum harus menjadi pertimbangan. Hal ini disebabkan penggabungan Perseroan Terbatas dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk

Perseroan Terbatas yang mana sebagai badan hukum tentunya mempunyai masalah-masalah hukum.

Tindakan hukum diperlukan dalam hal perusahaan tersebut telah menjual sahamnya di pasar modal, mencari prosedur dan dokumen penggabungan perusahaan yang aman, apakah perusahaan dimaksud bermasalah dengan lingkungan hidup, modal, kepengurusan dan ketenagakerjaan.

Dengan selesainya langkah-langkah awal proses penggabungan Perseroan Terbatas, maka penggabungan memasuki tahap pelaksanaan penggabungan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Hasil analisa data atau informasi dan langkah-langkah awal proses penggabungan merupakan bahan bagi pelaksanaan penggabungan terutama untuk menyusun rencana penggabungan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dalam menyusun rencana Penggabungan Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan formil dan materiel, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas tidak ada satu pasal pun yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai perbedaan persyaratan formil dan materiel, tetapi hanya menyebutkan syarat-syarat penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana tercantum pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut.

Jika dilihat dari materi pengaturannya yang tercantum pada ketiga pasal tersebut di atas tampaknya pasal-pasal tersebut hanya memuat persyaratan materiel saja, hal mana dapat dilihat dari isi Pasal 4 yang mengatur persyaratan bahwa penggabungan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- 1) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan Perseroan yang melakukan penggabungan;
- 2) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Demikian pula dalam Pasal 5 ditentukan bahwa penggabungan Perseroan Terbatas harus memperhatikan kepentingan kreditur, sedangkan Pasal 6 mengatur penggabungan Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang qourum kehadiran maupun pengambil keputusannya harus mencapai mayoritas mutlak dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan secara sah. Hal ini berarti bahwa Rapat Umum Pemegang Saham hanya dapat memberikan persetujuan tentang rencana penggabungan, jika rapatnya dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang hadir tersebut.

Sedangkan persyaratan formil dari penggabungan Perseroan Terbatas tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yaitu pada Bab III mengenai tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang antara lain memuat:

1. Kewajiban Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan untuk menyusun usulan rencana penggabungan. Usulan rencana penggabungan tersebut harus mendapat persetujuan dari masing-masing Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan (Pasal 7);
2. Kewajiban agar usulan rencana penggabungan tersebut memuat rencana konsolidasi, dan neraca proforma dari Perseroan Terbatas hasil penggabungan, jika Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan tergabung dalam 1 (satu) group atau antar group, maka usulan rencana penggabungan harus memuat neraca konsolidasi dan proforma dari Perseroan Terbatas hasil penggabungan (Pasal 8);
3. Kewajiban dari Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan secara bersama-sama menyusun rencana penggabungan. Rencana penggabungan tersebut sekurang-kurangnya memuat persyaratan-persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam usulan rencana penggabungan. Dalam menyusun rencana penggabungan ini para Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan duduk bersama untuk membahas dan mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan usulan rencana penggabungan yang telah disetujui oleh Komisaris masing-masing Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan. Dalam kesempatan inilah terjadi tawar menawar atau negoisasi baik yang terkait dengan konversi saham, cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju terhadap tindakan penggabungan, cara penyelesaian

status karyawan terutama Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri, cara penyelesaian utang-piutang, terutama utang dan piutang dari Perseroan Terbatas yang akan menggabungkan diri yang kemudian dituangkan dalam pernyataan penegasan peralihan hak dan kewajiban oleh Perseroan Terbatas yang akan menerima penggabungan (Pasal 9);

4. Kewajiban bagi Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan untuk mengumumkan ringkasan rencana penggabungan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dan membuat pengumuman secara tertulis mengenai rencana penggabungan kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham di masing-masing Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan (Pasal 12);
5. Kewajiban Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan untuk meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rancangan penggabungan berikut konsep akta penggabungan. Konsep akta penggabungan Perseroan Terbatas yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham kemudian dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 13);
6. Kewajiban dari Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan untuk menyampaikan rancangan penggabungan dengan surat tercatat kepada

seluruh kreditur, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 33).

Kewajiban menyusun rencana penggabungan yang memuat persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di atas merupakan tahap pertama dari pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas. Setelah tersusunnya rencana penggabungan, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Maksud dari pengumuman tersebut adalah agar karyawan, pemegang saham, kreditur atau bahkan masyarakat mengetahui adanya penggabungan Perseroan Terbatas dan apabila ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujui adanya penggabungan perusahaan dapat mengajukan keberatan.

Selanjutnya setelah diumumkan, dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang akan menggabungkan diri meminta persetujuan dari pemegang saham untuk menyetujui penggabungan perusahaan tersebut ke dalam Perseroan Terbatas yang akan menerima penggabungan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang akan menerima penggabungan meminta persetujuan dari pemegang saham untuk menerima penggabungan dari perusahaan target. Rapat Umum Pemegang Saham dalam penggabungan Perseroan Terbatas harus memenuhi

ketentuan dari Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Dalam hal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Ketentuan quorum Rapat Umum Pemegang Saham pada penggabungan berbeda dengan quorum Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang hanya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemegang saham dimaksudkan agar keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang lebih mencerminkan kehendak dari pemegang saham serta untuk lebih melindungi pemegang saham minoritas

Setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing Perseroan Terbatas, kemudian tahap berikutnya dilanjutkan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham gabungan dari Perseroan Terbatas yang akan menggabungkan diri maupun yang akan menerima penggabungan. Rapat Umum Pemegang Saham gabungan tersebut bertujuan untuk mengkonfirmasi atau menegaskan kembali putusan-putusan yang dibuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan, membahas perubahan anggaran dasar perseroan

hasil penggabungan, dan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akibat dari penggabungan perusahaan serta mencari pemecahan dari permasalahan dan akibat hukum yang timbul.

Setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham gabungan, maka diteruskan pada tahap pembuatan dan penandatanganan perjanjian penggabungan perusahaan (perjanjian merger) yang mengatur secara lebih rinci putusan-putusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahap ketiga dan keempat (lihat lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV). Perjanjian penggabungan ini bersifat “gantung”, artinya perjanjian penggabungan tersebut baru berlaku efektif setelah memperoleh izin atau persetujuan dari instansi-instansi terkait.

Setelah membuat perjanjian penggabungan tahap berikutnya adalah pengajuan permohonan izin bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang akan melakukan penggabungan perusahaan sesuai dengan status dan usaha perusahaan yang melakukan penggabungan. Pada tahap ini ketentuan-ketentuan khusus “*lex specialis*” dari prosedur penggabungan perusahaan yang umum mulai diterapkan penggunaannya. Sebagai contoh bagi perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing harus mendapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, bagi perusahaan perbankan harus memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka “go public” harus memerlukan perijinan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan prosedur-prosedur khusus

lainnya harus dipenuhi dalam pelaksanaan penggabungan perusahaan dengan status khusus.

Setelah ijin-ijin khusus dari instansi terkait diperoleh kemudian memasuki tahap pembuatan dan penandatanganan perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pengalihan harta, asset, kewajiban, tanggung jawab, lisensi, merk, patent dan lain-lain dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan penerima penggabungan.

Tahap berikutnya adalah pengajuan permohonan persetujuan, penyampaian laporan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penggabungan Perseroan Terbatas yang diharuskan mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI adalah apabila penggabungan tersebut diikuti dengan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), sedangkan apabila diikuti perubahan anggaran dasar selain yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) adalah berbentuk laporan dan penggabungan yang tidak diikuti dengan perubahan anggaran dasar termasuk dalam pemberitahuan.

Dalam pengajuan permohonan persetujuan, penyampaian laporan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan kepada

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus melampirkan dokumen-dokumen yang antasra lain:

1. Salinan Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham dari Perseroan Terbatas yang akan menggabungkan diri;
2. Salinan Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang saham dari Perseroan Terbatas yang penerima penggabungan;
3. Salinan Akta Perjanjian penggabungan Perseroan Terbatas;
4. Salinan Akta perubahan Anggaran Dasar dari Perseroan terbatas hasil Penggabungan;
5. Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara;
6. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Dua surat kabar harian yang memuat pengumuman penggabungan Perseroan Terbatas;
8. Neraca masing-masing Perseroan Terbatas 3 (tiga) tahun terakhir.

Pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas harus dimohonkan persetujuan, disampaikan laporan atau pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, karena pada prinsipnya penggabungan Perseroan Terbatas selalu diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas hasil penggabungan yang berbentuk persetujuan, laporan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Tahap terakhir dari pelaksanaan penggabungan adalah tahap penerimaan persetujuan, laporan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas hasil penggabungan

Dalam hal penggabungan Perseroan Terbatas dilakukan dengan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu merubah:

1. Nama perseroan;
2. Maksud dan tujuan perseroan;
3. Kegiatan usaha perseroan;
4. Jangka waktu berdirinya perseroan;
5. Besarnya modal dasar;
6. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
7. Status perseroan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

Maka penggabungan perseroan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan saat itu pula Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Sedangkan penggabungan perseroan yang dilakukan dengan perubahan Anggaran Dasar yang tidak termasuk dalam Pasal 15 ayat (2) sebagaimana tersebut di atas, maka mulai berlakunya penggabungan sejak tanggal mendaftarkan penggabungan ke kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indonesia dan sejak tanggal pendaftaran tersebut perseroan yang menggabungkan diri bubar.

Penggabungan perseroan yang tidak diikuti dengan perubahan anggaran dasar, maka penggabungan tersebut mulai berlaku saat penandatanganan akta penggabungan dan saat itu pula perseroan yang menggabungkan menjadi bubar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tidak mengenal tahapan-tahapan pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas yang telah diuraikan di atas, namun dalam pelaksanaan penggabungan umumnya menggunakan tahapan-tahap dimaksud.

Penggabungan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan sinergi perusahaan, meningkatkan konsentrasi pasar, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan daya saing, sekaligus dapat menimbulkan akibat-akibat hukum baik terhadap perusahaan sendiri, perekonomian nasional, namun di sisi lain penggabungan perusahaan seringkali dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham, kreditur, karyawan dan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian tersebut di atas dampak positif dari penggabungan Perseroan Terbatas secara ekonomi mikro adalah perseroan hasil penggabungan menjadi lebih sehat dan lebih kuat jika dilihat dari segi permodalan, sedangkan jika dilihat dari pangsa pasar, maka perusahaan hasil penggabungan akan lebih konsolidatif, produktif dan kompetitif, sehingga akan

meningkat sinergi kerjanya. Dengan sinergi demikian, maka perseroan akan memperoleh keuntungan yang besar.⁵¹

Seperti telah kita ketahui bahwa Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar dari pembangunan ekonomi Indonesia, maka perkembangan ekonomi secara makro dapat diukur dari segi sehat dan kuatnya Perseroan Terbatas. Dengan meningkatnya sinergi dari Perseroan Terbatas yang diperoleh dari penggabungan Perseroan Terbatas maka penggabungan Perseroan Terbatas secara tidak langsung dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional.⁵²

Selain mempunyai dampak positif sebagaimana tercermin dari tujuan penggabungan Perseroan Terbatas, penggabungan Perseroan Terbatas seringkali menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak tertentu seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur bahkan masyarakat.

Sebagai perbuatan hukum, penggabungan Perseroan Terbatas dapat mendatangkan kerugian bagi pemegang saham, meskipun pemegang saham merupakan pemilik dari Perseroan Terbatas dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam Perseroan Terbatas, namun pemegang saham sendiri dapat dirugikan dari pelaksanaan penggabungan tersebut. Akibat hukum bagi pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dapat terjadi manakala pemegang saham minoritas dari

⁵¹ Wawancara dengan Pratomo Walujo, SH, MSc, Kepala Bagian Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 20 Nopember 2001.

⁵² Wawancara dengan Pratomo Walujo, SH, MSc, Kepala Bagian Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 20 Nopember 2001.

perusahaan yang melakukan penggabungan menolak atau tidak setuju dengan penggabungan tersebut.

Pemegang saham mayoritas dan pemegang saham yang setuju dengan adanya penggabungan dapat memperoleh keuntungan dari meningkatnya sinergi perusahaan akibat adanya penggabungan perusahaan. Berbeda dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas dan pemegang saham yang tidak setuju dengan adanya penggabungan, justru mungkin mengalami kerugian.

Kerugian yang akan diperoleh pemegang saham minoritas dapat berupa kedudukannya dalam Perseroan Terbatas akan semakin kecil sehingga sama sekali tidak dapat menyampaikan aspirasinya atau pikiran-pikirannya terhadap perusahaan.

Dalam hal pemegang saham pada kedudukan yang demikian, pemegang saham minoritas dapat tidak menyetujui penggabungan Perseroan Terbatas dan menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Kerugian yang disebabkan penggabungan Perseroan Terbatas juga dapat dialami oleh karyawan terutama karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri, jika dalam pelaksanaan penggabungan menimbulkan pengurangan tenaga kerja dan perubahan status karyawan beserta hak-haknya dengan alasan untuk efisiensi dan efektifitas perusahaan.

Pengurangan tenaga kerja pada perusahaan hasil penggabungan merupakan konsekuensi yang harus dihadapi pada setiap perusahaan yang melakukan

penggabungan perusahaan karena tidaklah mungkin suatu perusahaan dapat menjadi efisien dan efektif apabila kelebihan tenaga kerja yang berasal dari karyawan-karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri.

Akibat hukum dari penggabungan Perseroan Terbatas, juga dapat terjadi pada masyarakat, baik itu kreditur maupun masyarakat umum yang posisinya berada di luar Perseroan Terbatas.

Dalam penggabungan Perseroan Terbatas selalu diikuti adanya perpindahan asset dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan. Asset yang dipindahkan tersebut dapat berupa aktiva dan pasiva yang di dalamnya termasuk utang-piutang dari beberapa perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Apabila perusahaan yang akan melakukan penggabungan tidak mempunyai utang kepada pihak lain "kreditur" maka penggabungan Perseroan Terbatas tidak menimbulkan akibat hukum atau masalah dengan kreditur.

Akibat hukum bagi kreditur dalam penggabungan Perseroan Terbatas timbul apabila Perseroan Terbatas yang akan menggabungkan diri mempunyai utang kepada pihak ketiga "kreditur". Akibat hukum bagi kreditur akan menjadi lebih kompleks lagi apabila penggabungan Perseroan Terbatas tersebut tidak diikuti dengan perjanjian khusus tentang pengalihan utang pihak ketiga dari Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri kepada Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan.

Peningkatan sinergi perusahaan selalu diikuti dengan meningkatnya kapasitas produksi dan pemasaran dari perusahaan hasil penggabungan sehingga akan diperoleh keuntungan yang besar. Guna mempertahankan kapasitas produksi dan pemasaran yang tinggi agar dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam meningkatkan keuntungan perusahaan, seringkali mengabaikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan etika bisnis yang benar sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang sangat merugikan masyarakat selaku konsumen.

Kerugian yang ditanggung oleh masyarakat sebagai akibat adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan adanya penggabungan Perseroan Terbatas adalah konsumen atau masyarakat mendapatkan harga yang lebih mahal untuk suatu produk yang dibutuhkannya dan konsumen tidak mempunyai pilihan lain dari produk yang diinginkan. Selain masyarakat yang dalam hal ini konsumen, penggabungan Perseroan Terbatas yang menjalankan usahanya tanpa didasari prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan etika bisnis yang benar dapat juga merugikan bagi pelaku usaha lain karena pelaku usaha lain enggan untuk memasuki usaha yang telah terjadi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas, selain harus memenuhi tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan,

Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas juga diperlukan langkah-langkah awal dari proses penggabungan yang dilakukan sebelum prosedur penggabungan sebagaimana ditentukan oleh kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Penggabungan Perseroan Terbatas selain mengakibatkan dampak positif juga menimbulkan akibat yang merugikan terutama bagi pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur atau bahkan masyarakat luas. Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan dari hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas

Seperti telah kita ketahui bahwa pada prinsipnya penggabungan Perseroan Terbatas merupakan suatu tindakan yang bersifat ekonomi dan manajerial dalam suatu perusahaan. Namun karena di dalam penggabungan Perseroan Terbatas terjadi perjanjian penggabungan Perseroan Terbatas dan perjanjian-perjanjian lainnya yang melibatkan hukum khususnya hukum perdata maka penggabungan Perseroan Terbatas dikategorikan sebagai perbuatan hukum.

Sebagai perbuatan hukum, penggabungan Perseroan Terbatas mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas dapat berupa akibat positif dan akibat yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu.

Mengingat besarnya akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan penggabungan Perseroan Terbatas bagi para pihak maupun pihak ketiga maka hukum perlu atau harus melakukan intervensi dalam rangka menjamin perlindungan bagi pihak-pihak terutama pihak yang dirugikan.

Setiap akibat hukum dari suatu perbuatan hukum yang mendatangkan kerugian bagi pihak-pihak, maka hukum sebagai instrumen harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang dilanggar.

Pengaruh yang diakibatkan dari penggabungan perusahaan dapat bersifat yuridis maupun non-yuridis, dan kemungkinan pengaruh tersebut dapat menimpa masyarakat atau kreditur, selain dari pihak-pihak yang melakukan penggabungan. Akibat yang menimpa pihak ketiga justru membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

Akibat-akibat penggabungan perusahaan sebagaimana diuraikan di atas, dapat menimpa pemegang saham, karyawan dan kreditur, walaupun Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas telah memberikan rambu-rambu agar dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas memperhatikan:

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan;

b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Namun dalam pelaksanaannya seringkali kepentingan-kepentingan tersebut terabaikan.

Guna mengantisipasi diabaikannya kepentingan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah mengantisipasi dengan memberikan syarat quorum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang berbeda dengan quorum-quorum rapat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 76 yang berbunyi:

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Namun apabila Pasal 76 tersebut dicermati secara mendalam, pasal tersebut hanya memberikan perlindungan bagi pemegang saham, yang mana pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas harus diketahui dan disetujui oleh sebagian besar pemegang saham sehingga kepentingan pemegang saham secara hukum terlindungi.

Dalam suatu perseroan apabila terdapat perbedaan kepemilikan saham perseroan dengan selisih jumlah yang begitu besar, maka akan dijumpai pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dalam

perseroan maupun dalam Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai kedudukan yang kuat karena dapat menentukan arah, kebijakan dan manajemen perusahaan, hal tersebut disebabkan pemegang saham mayoritas mempunyai hak suara yang besar.

Sedangkan pemegang saham minoritas selalu berada dalam posisi yang lemah dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan pemegang saham minoritas yang lemah itu selalu tidak mampu menghadapi tindakan Direksi dan Komisaris yang merugikan kepentingannya.

Dalam hal penggabungan Perseroan Terbatas, pemegang saham minoritas yang mempunyai kedudukan lemah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan 2 (dua) pilihan, yaitu **pilihan yang pertama** pemegang saham minoritas dapat melaksanakan hak yang diberikan oleh Pasal 104 ayat (2) untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Mengenai apa yang dimaksud dengan harga yang wajar, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tidak memberikan penjelasan apapun.⁵³

Sedangkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor: KEP-85/PM/1991 Tanggal 3 Oktober 1991 tentang Nilai Pasar Yang Wajar, Ketua Pengawas Pasar Modal menentukan bahwa nilai pasar yang wajar mengikuti peraturan Nomor: V.C.3 sebagaimana dimuat dalam lampiran Keputusan tersebut.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeni, op. cit, hal. 15.

Peraturan ini menentukan bahwa nilai pasar yang wajar untuk efek yang tidak tercatat pada Bursa Efek harus ditentukan atas dasar penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti independen yang terdaftar di Bapepam. Sedangkan nilai pasar yang wajar untuk efek yang tercatat pada Bursa Efek, harga terakhir dimana efek-efek tersebut telah diperdagangkan harus menjadi dasar untuk menentukan nilai pasar yang wajar bagi efek tersebut. Nilai pasar yang wajar tersebut tidak lebih tinggi dari harga terakhir di Bursa Efek dimana perdagangan besar efek tersebut terjadi.

Mengenai harga yang wajar dalam Perseroan Terbatas selain Perseroan Terbuka "*Go Public*", menurut hemat penulis, penentuan harga yang wajar itu dapat dilakukan dengan menunjuk konsultan penilai yang independen.

Dalam hal pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan yang wajar tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan **pilihan yang kedua** yaitu tidak menyetujui rencana penggabungan yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan haknya yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang tersebut. Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995:

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a. Perubahan Anggaran Dasar;
- b. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
- c. Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.

Sedangkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang tersebut menentukan:

Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain.

Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, memberikan hak *'appraisal remedy'* yaitu hak pemegang saham untuk meminta kepada Direksi agar sahamnya dibeli oleh perseroan dengan harga yang wajar, dan jika hal tersebut tidak terlaksana, karena melebihi batas ketentuan pembelian saham oleh perseroan sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1), maka perseroan asal wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain dengan harga yang wajar (untuk bidang usaha perbankan, Bank dilarang untuk membeli kembali sahamnya. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang membolehkan dengan syarat tertentu).

Dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui harga jual sahamnya, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pemegang saham tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri apabila

dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris. Apabila dianggap perlu pemegang saham minoritas dapat juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar terhadap perseroan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 110 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1). Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
- b. Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Sebagaimana halnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas harus juga memperhatikan kepentingan karyawan perseroan, karena dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas terjadi penyerahan karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri ke perusahaan hasil penggabungan, namun tidak seluruh karyawan dapat diterima di perusahaan yang menerima penggabungan dengan alasan efisiensi, sebab tidak mungkin tercapai efisiensi dalam perusahaan apabila jumlah karyawan lebih banyak dari jumlah pekerjaan.

Penggabungan Perseroan Terbatas dapat mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja bagi karyawan, oleh karena itu kepentingan karyawan juga harus dilindungi dalam hal terjadinya penggabungan perusahaan. Untuk itu sebelumnya perlu dilakukan pendekatan kepada karyawan, berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan setelah penggabungan perusahaan.

Pendekatan dimaksud dapat dilakukan pada saat Direksi masing-masing perusahaan akan menyusun rencana penggabungan yang mana pada penyusunan rencana penggabungan terjadi negosiasi terhadap kepentingan-kepentingan, termasuk di dalamnya mengenai karyawan. Pada negosiasi ini Direksi perusahaan yang menggabungkan diri diharapkan aktif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan karyawannya.

Dalam penggabungan perusahaan timbul masalah yang cukup pelik, yaitu terjadi perubahan "*corporate culture*" yang baru.⁵⁴ Perubahan atau munculnya "*corporate culture*" yang baru sudah tentu dapat menyulitkan karyawan yang belum terbiasa, sehingga sedapat mungkin harus diatasi. Misalnya karyawan diberi tenggang waktu untuk menyesuaikan diri dengan "*corporate culture*" yang baru. Kalau mereka diminta berhenti, hak-haknya sudah tentu juga harus diperhatikan, seperti pesangon.

Perlindungan terhadap karyawan dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 104 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang menentukan bahwa penggabungan hanya dapat dilakukan dengan

⁵⁴ Yubus Husein, op. Cit, hal. 5.

memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, selain ketentuan tersebut di atas, perlindungan karyawan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, juga diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan harus mencantumkan klausula cara penyelesaian status karyawan dalam usulan rencana dan rancangan penggabungan (Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998). Jadi dari ketentuan tersebut di atas sejak tahap awal penggabungan, yaitu pada saat penyusunan usulan rencana dan rancangan penggabungan, Direksi harus sudah memperhatikan nasib karyawan, yaitu dengan cara mencantumkan klausula cara penyelesaian status karyawan dalam usulan rencana dan rancangan penggabungan Perseroan Terbatas (lihat lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV).

Demikian juga pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 memberikan kewajiban kepada Direksi untuk mengumumkan ringkasan atas rancangan penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut A. Partomuan Pohan SH. LLM, Notaris di Jakarta, bahwa adanya kewajiban pengumuman dengan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan pengumuman secara tertulis kepada karyawan perseroan serta kewajiban untuk

membuat rancangan tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dan menyampaikan kepada Menteri Kehakiman pada satu sisi harus dilihat sebagai rambu-rambu untuk melindungi kepentingan karyawan Perseroan dalam rangka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut.⁵⁵

Sedangkan Munir Fuady, mengemukakan bahwa menurut sistem hukum positif dari segi "*corporate law*" kedudukan karyawan di perusahaan lebih lemah dari kedudukan pihak lain seperti pemegang saham, Direktur, Komisaris. Karyawan dianggap paling lemah kedudukannya karena karyawan sama sekali tidak dilibatkan dalam hal penentuan "*policy*" maupun operasional perusahaan, demikian juga saat pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas.⁵⁶

Karyawan dalam perusahaan yang akan melakukan penggabungan merupakan salah satu pihak yang mestinya sangat dipertimbangkan sebelum penggabungan dilakukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan karyawan ini dalam hubungan dengan penggabungan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip umum mengenai kebijaksanaan kesejahteraan sosial yang akan diterapkan setelah merger.
- b. Waktu yang pantas untuk berkonsultasi dengan organisasi pekerja.
- c. Cara dan saat untuk menginformasikan merger kepada pekerja.

⁵⁵ A. Partomuan Pohan, *Mekanisme Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman RI, Jakarta 10-11 September 1997, hal. 8-9.

⁵⁶ Munir Fuady, *op cit*, hal 127.

- d. Cara-cara untuk mencegah atau setidaknya mengeliminir kemungkinan kerugian material kepada pihak pekerja, termasuk memberikan kompensasi yang bersifat material.
- e. Aktivitas khusus dari organisasi pekerja dalam perusahaan.
- f. Suatu garansi terhadap keamanan dan ketersediaan pekerjaan setelah merger.

Dalam kasus-kasus penggabungan perusahaan, seringkali dengan alasan peningkatan efisiensi dan perampingan usaha, setelah penggabungan dilaksanakan sebagian karyawan diputuskan untuk diputuskan hubungan kerjanya atau bahkan karyawan menolak untuk melanjutkan bekerja di perusahaan hasil penggabungan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tidak memuat ketentuan mengenai hal tersebut.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dan peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tidak memuat ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dalam hal terjadinya penggabungan Perseroan Terbatas, namun dalam rangka memberikan hak-hak karyawan dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja khususnya mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian seharusnya kita mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP-150/MEN/2000 tersebut di atas memberikan pengaturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti kerugian di perusahaan dalam hal adanya penggabungan perusahaan, dalam terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan atau karyawan menolak melanjutkan pekerjaan pada perusahaan hasil penggabungan, yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.

Dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas, selain mengacu pada dasar hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, karena dalam penggabungan melibatkan berbagai hal sebagai konsekuensinya, maka penggabungan Perseroan Terbatas juga melibatkan ketentuan-ketentuan lainnya sebagai peraturan khusus yang berkaitan dengan penggabungan perusahaan, salah satu dari peraturan tersebut adalah peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pelaksanaan penggabungan dari dua atau lebih Perseroan Terbatas menjadi satu Perseroan Terbatas, seringkali sebagai konsekuensinya, karyawan, bahkan Direksi dan Komisaris diputuskan hubungan kerjanya. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, ketentuan yang harus diperhatikan adalah:⁵⁷

a. Anggaran Dasar yang Relevan.

Perlu diperhatikan anggaran dasar perseroan terutama mengenai pemberhentian Direksi dan Komisarisnya.

⁵⁷ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 81.

b. Perjanjian Kerja.

Mesti dilihat apakah ada dibuat perjanjian kerja di antara perusahaan yang relevan dengan tenaga kerja. Jika ada harus dilihat bagaimana cara pemutusan hubungan kerja dengan karyawan yang bersangkutan. Atau jika tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, apakah perjanjian kerja tersebut harus diperbaharui sehubungan dengan adanya merger yang bersangkutan.

c. Kesepakatan Kerja Bersama.

Jika pernah dibuat kesepakatan kerja bersama, maka harus pula dilihat bagaimanakah tata cara dan konsekuensinya jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Dan perlu pula dipikirkan mengenai pembaharuan Kesepakatan Kerja Bersama sehubungan dengan adanya tindakan merger tersebut.

d. Peraturan Perusahaan.

Peraturan Perusahaan adalah juga dokumen yang mesti diperhatikan jika dilakukan merger tersebut. Bagaimanakah pengaturan jika ada pemutusan hubungan kerja misalnya. Dan apakah perlu peraturan perusahaan tersebut disesuaikan setelah terjadinya merger tersebut.

Selanjutnya selain pihak-pihak yang berada dalam perusahaan yang melakukan penggabungan, kreditur sebagai pihak ketiga juga perlu mendapat perlindungan hukum terhadap akibat penggabungan Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 telah memuat perlindungan hukum bagi kreditur yang tercantum pada Pasal 104 ayat (1)

huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) huruf f angka 3, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, perlindungan bagi kreditur diberikan dengan cara Direksi dalam menyusun rencana Penggabungan Perseroan Terbatas diharuskan mencantumkan klausula cara penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga (Pasal 7 ayat (2) huruf f angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998), rancangan penggabungan juga harus memuat penegasan dari perseroan yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang menggabungkan diri (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998). Di samping itu mewajibkan kepada Direksi untuk mengumumkan ringkasan atas rencana penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998).

Selanjutnya puncak dari perlindungan hukum kepada kreditur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu kewajiban untuk menyampaikan surat-surat tercatat mengenai rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kepada seluruh kreditur paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998). Kewajiban untuk menyerahkan surat-surat tercatat tersebut dimaksudkan agar kreditur mengetahui rencana penggabungan perusahaan dan dalam rangka pemberian perlindungan hukum kepada kreditur, kreditur dapat mengajukan keberatan kepada

perseroan dan apabila kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur dianggap menyetujui penggabungan Perseroan Terbatas tersebut.

Sebagaimana diketahui dalam penggabungan Perseroan Terbatas, kreditur mempunyai kedudukan yang lemah secara lokalisasi, maksudnya kreditur berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang lain itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan, hubungan tersebut dapat berupa:

- a. Hubungan kontraktual, misalnya antara kreditur dengan perusahaan yang bersangkutan;
- b. Hubungan non kontraktual, misalnya dengan si tersaing secara tidak fair.⁵⁸

Sebagai pihak yang lemah secara lokalisasi, kreditur merupakan "*dangerous party*" yang harus diwaspadai jika perusahaan melakukan penggabungan. Kreditur pada perusahaan publik merasa lebih aman jika dibandingkan dengan perusahaan non publik. Hal tersebut disebabkan karena Bapepam sebagai penguasa otoritas pasar modal mewajibkan kepada Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan untuk mengumumkan kepada publik terhadap transaksi-transaksi spesial, seperti penggabungan perusahaan, oleh karena itu untuk memberikan perlindungan, terutama kreditur, perusahaan non publik yang akan melakukan penggabungan, seharusnya melakukan pengumuman sebagaimana tersebut di atas.

⁵⁸ Munir Fuady, Ibid, hal. 132.

Dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas, kedudukan kreditur sangat krusial, karena dalam penggabungan terjadi.⁵⁹

(1) Peralihan Asset

Pelaksanaan penggabungan perusahaan seringkali diikuti dengan adanya peralihan aset perusahaan, apabila terjadi demikian perusahaan yang menggabungkan diri yang mempunyai kedudukan sebagai debitur, hutangnya kepada kreditur dapat menjadi hutang tanpa dukungan asset yang merupakan jaminan pelunasan utang.

(2) Non Eksistensi Legal Entify

Seperti diketahui setelah penggabungan perusahaan selesai dilaksanakan, perusahaan yang menggabungkan diri bubar, dalam hal demikian siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya kepada kreditur. Dalam hal terjadi peralihan asset karena penggabungan perusahaan dan perusahaan yang menggabungkan diri bubar, upaya hukum bagi kreditur terhadap kasus yang istimewa "*special case*" dapat berupa.⁶⁰

a. Actio Pauliana

Apabila pengalihan asset yang dilakukan debitur dimaksudkan untuk mengelak pembayaran hutang-hutangnya, maka tindakan penggabungan perusahaan dapat dipandang sebagai transaksi objek pranata "*actio pauliana*"

⁵⁹ Munir Fuady, Ibid, hal. 132

⁶⁰ Munir Fuady, Ibid, hal, 133

karena dengan penggabungan perusahaan ada asset yang beralih dan jika terpenuhi syarat-syarat tertentu dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengalihan asset tersebut dapat dibatalkan melalui konstruksi hukum yang terkenal dengan sebutan “actio pauliana”. Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa tiap orang (kreditur) yang menghutangkan kepada orang lain (debitur) berhak untuk meminta pembatalan semua perjanjian yang dilakukan oleh debitur dengan asumsi bahwa debitur mengetahui perbuatan hukum yang dilakukannya telah merugikan kreditur yang memberi hutang, sedangkan tidak ada keharusan baginya untuk melakukan perbuatan tersebut.

b. Negative Covenant

Negative Covenant adalah suatu klausula yang dicantumkan dalam perjanjian kredit yang melarang atau harus minta izin kepada kreditur apabila asset ingin dialihkan. Apabila klausula tersebut dilanggar, hanya menyebabkan debitur melakukan pelanggaran “*default*” terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati, namun tidak sampai membatalkan transaksi pengalihan asset, yang kemungkinan pengalihan asset tersebut telah sah dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga, kecuali apabila pihak ketiga mempunyai itikad tidak baik maka transaksi pengalihan asset dapat dibatalkan.

Dalam hal para debitur membubarkan diri sebagai akibat dari penggabungan Perseroan Terbatas, berbagai kemungkinan dapat terjadi terhadap kedudukan krediturnya, yaitu sebagai berikut.⁶¹

- a) Perusahaan yang masih eksis akan menanggung hutang-hutang melalui konstruksi hukum novasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1417 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal mana dapat dilakukan jika ada izin dari kreditur, "*didisclose*" hutang tersebut kepada calon debitur baru dan calon debitur baru menerima pengalihan tanggung jawab hukum yang bersangkutan.
- b) Jika pihak Direktur perusahaan yang telah bubar tidak "*aware*" akan adanya hutang tersebut sehingga tidak "*didisclose*", maka kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- (I). Di negara-negara *Common Law*, Direktur perusahaan yang telah bubar secara pribadi akan bertanggung jawab, karena dia telah melakukan "*breach*" terhadap "*fiduciary duty*" atau "*duty of care*" terhadap perusahaannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga mengintrodusir semacam tugas "*fiduciary*" terhadap Direksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 ayat (1) dan terhadap Komisaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 98 ayat (1).

⁶¹ Munir Fuady, Ibid, hal. 133-135.

- (II). Ada juga negara-negara yang langsung membebaskan tanggung jawab atas hutang tersebut demi hukum "*by the operation of law*" kepada perusahaan yang tetap eksis setelah penggabungan perusahaan hal mana juga dianut oleh negara Indonesia, termuat dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- (III). Seperti yang berlaku di Indonesia, apabila Direkturnya tidak dalam keadaan lalai untuk men-"*discloce*"nya, maka tidak ada ketentuan hukum yang membebaskan tanggung jawab hutang tersebut kepada pihak tertentu, sehingga kewajiban membayar hutang menjadi tanggung jawab kreditur sendiri.
- (IV). Demikian pula seperti yang berlaku di Indonesia, apabila Direkturnya dianggap dalam keadaan lalai, sehingga tidak men-"*discloce*" hutang kepada pihak yang melakukan penggabungan perusahaan merupakan kelalaian Direktur sendiri, apabila terjadi demikian Direktur secara pribadi yang bertanggung jawab, karena Direktur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang seharusnya selaku Direktur tidak boleh dilakukannya.

Penggabungan perusahaan Perseroan Terbatas ditinjau dari tujuannya adalah meningkatkan sinergi perusahaan, namun dalam pelaksanaannya sering timbul efek negatif terhadap persaingan usaha, yaitu:⁶²

⁶² Munire Fuady, Ibid, hal. 143.

1. Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi;
2. Kekuatan pasar (market power) menjadi semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan merger sangat riskan terhadap praktek monopoli yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam ilmu hukum monopoli, sangat mewanti-wanti agar dalam penggabungan Perseroan Terbatas tidak terjadi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Demikian juga hukum bisnis Indonesia memberikan peringatan terhadap penggabungan perusahaan yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dapat dilihat dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, bahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan pengaturan anti monopoli yang bersifat komprehensif, juga memuat larangan penggabungan Perseroan Terbatas yang mengakibatkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan proteksi agar penggabungan perusahaan tidak menyebabkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat, dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Masyarakat diberikan perlindungan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena masyarakat merupakan pihak yang pertama kali merasakan akibat adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut, sehingga masyarakat menjadi korban dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan harus membayar lebih mahal produk yang dibutuhkan apabila dibandingkan dengan harga yang sebenarnya, dan masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan atas jenis produk yang sama.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat selain merugikan masyarakat, juga merugikan pelaku usaha lain karena adanya keengganan untuk memasuki pasar guna memproduksi produk yang sejenis, sehingga apabila pelaku usaha lain memaksa memasuki pasar produk tersebut pasti akan dimatikan oleh perusahaan yang melakukan monopoli yang pada akhirnya monopoli dan persaingan usaha secara tidak langsung merugikan perekonomian nasional.

Dengan melihat akibat penggabungan Perseroan Terbatas yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan praktek usaha tidak sehat yang begitu luas, maka sewajarnya pemerintah memberi proteksi dengan cara melarang penggabungan Perseroan Terbatas yang dapat mengakibatkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Larangan penggabungan Perseroan Terbatas yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, secara tegas diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai badan pengawas persaingan usaha dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan pembatalan atas penggabungan Perseroan Terbatas yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 47 Ayat (2) huruf e) dan menjatuhkan pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 48

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, juga memberikan hak kepada

masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk ikut mengawasi atau memberi kontrol praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan cara menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, demikian juga apabila masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat mengetahui adanya dugaan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat mengajukan laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan komisi wajib menindak lanjuti laporan tersebut dengan mengadakan pemeriksaan.

Dari uraian mengenai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam penggabungan perseroan tersebut diatas, maka dapat disarikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas telah cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. Selain kedua Peraturan tersebut, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas juga dapat dijumpai pada ketentuan yang mengatur ketenagakerjaan yang berhubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian. Sedangkan untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang diakibatkan dari pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah melarang

penggabungan Perseroan Terbatas yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas

Pada perusahaan terutama Perseroan Terbatas, memiliki pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan “manager” adalah orang yang diberi kuasa oleh pengusaha atau pemegang saham untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha atau pemegang saham.⁶³ Dia menggantikan pengusaha dalam segala hal mengenai pengelolaan perusahaan. Pemimpin perusahaan berfungsi sebagai wakil pengusaha dan berkuasa dalam segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan perusahaan yang dipimpinnya. Pemimpin perusahaan adalah pemegang kuasa tertinggi dalam menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh mengenai kemajuan dan kemunduran perusahaan⁶⁴. Karena keahliannya dan tanggung jawabnya itu, ia dibayar mahal oleh pengusaha. Pada Perseroan Terbatas pemimpin perusahaan berbentuk dewan pimpinan yang disebut dengan Direksi yang diketuai oleh seorang Direktur Utama atau Presiden Direktur dan dibantu oleh Direktur yang diberi kuasa untuk mengelola satu bidang tertentu dalam perusahaan seperti Direktur Produksi, Direktur Pemasaran, Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan dan lain-lain. Direktur merupakan Direktur Utama.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, Op. cit , hal 26.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, Ibid.

Dalam hal pengusaha atau pemegang saham juga berfungsi sebagai Direktur, misalnya pada perusahaan perorangan, maka pimpinan perusahaan selalu identik dengan pengusaha, sehingga timbul anggapan di kalangan masyarakat bahwa Direktur Utama dan Direktur adalah pengusaha, karena kenyataannya mereka yang menjalankan perusahaan. Secara yuridis mereka sebenarnya bukan pengusaha, kecuali pada perusahaan perseorangan yang dijalankan sendiri oleh pengusahanya.

Direksi atau pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian ruang lingkup tugas Direksi ialah mengurus perseroan.

Sebagaimana penjelasan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa tugas Direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan, namun apa yang disebut dengan pengurusan sehari-hari belum ada penjelasan resmi dari Undang-Undang.

Untuk melihat apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari, kita harus melihat dari Anggaran Dasar dari perseroan. Walaupun tidak mungkin rinci, tugas pengurusan sehari-hari dari Direksi dapat disimpulkan dari Anggaran Dasar. Mengurus perseroan semata-mata adalah tugas Direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ lain. Hal ini dipertegas dalam Pasal 82 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Disamping itu, Pasal 82 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut juga memberikan pedoman kepada Direksi, dalam menjalankan pengelolaan perseroan selalu berorientasi pada kepentingan perseroan. Hal ini dilatar belakangi karena adanya kepentingan dan tujuan perseroan yang tidak dapat sejalan dengan kepentingan dan keinginan pemegang saham. Ketentuan mengenai Direksi melaksanakan tugasnya hanyalah untuk kepentingan serta tujuan daripada perseroan, tampaknya didasarkan pada paham yang sementara orang disebut sebagai paham institusi atau pandangan bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan menjadi titik perhatian utama dari pengelolaan Direksi.

Hal senada juga ditegaskan pada Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan, jadi dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyangkut tugas dan tanggung jawab Direksi menganut paham institusi.

Sehubungan dengan paham institusi, Nindyo Pramono dalam bukunya yang berjudul "Sertifikasi Saham PT. Go Publik dan Hukum Pasar Modal di

Indonesia”, mengatakan bahwa Paul Scholten dan Bregstein berpendapat pengurus mewakili badan hukum, maka Direksi bertindak mewakili Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum. Kewenangan perwakilan Direksi dari Perseroan Terbatas ini timbul karena adanya pengangkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan akan berakhir dengan meninggalnya orang yang diangkat untuk mewakili tersebut atau kewenangan mewakili itu ditarik kembali.⁶⁶ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang intinya Direksi tidak boleh diangkat tanpa kemungkinan dicabut kembali.

Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan sampai sejauhmana batas-batas kewenangan dan tugas Direksi. Pada kedua pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas diurus oleh pengurus yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai luas, isi maupun ruang lingkup kepengurusan itu.

Demikian juga rincian tugas Direksi di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dapat diketahui. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya memuat pengaturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam anggaran dasar dapat

⁶⁶ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT. Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 87.

ditetapkan bahwa kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan oleh Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham.

Direktur sebagai wakil dari badan hukum secara umum mempunyai kewajiban:

1) Mengurus harta kekayaan perseroan.

Mengurus harta kekayaan perseroan berarti melakukan segala perbuatan hukum sehari-hari dalam memelihara harta kekayaan Perseroan Terbatas, memperbesar atau memperkecil modal Perseroan Terbatas dalam batas-batas tertentu, mencari kredit, dan lain-lain sebagainya yang diperlukan untuk memperlancar jalannya perusahaan.

2) Mengemudi usaha-usaha perseroan.

Mengemudi usaha-usaha perseroan berarti pada umumnya memimpin dan menyalurkan segala perbuatan perseroan ke arah mencapai tujuannya. Maksud mengemudi ialah melakukan perbuatan di dalam Perseroan Terbatas seperti administrasi, memimpin jalannya perusahaan, melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dan sebagainya.

3) Mewakili Perseroan Terbatas di dalam dan di luar pengadilan.

Direksi selain mewakili Perseroan Terbatas di dalam pengadilan, juga dapat mewakili Perseroan Terbatas di luar pengadilan. Kewenangan Direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan.

Untuk mengetahui secara rinci mengenai tugas Direksi dapat dilihat dari anggaran dasar Perseroan Terbatas yang pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurus segala urusan.
2. Menguasai harta kekayaan perseroan, dalam hubungannya dengan harta kekayaan perseroan, Direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik harta kekayaan perseroan serta menginventarisasi dengan teliti dan cermat harta kekayaan perseroan tersebut. Setiap perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban perseroan wajib dicatat dalam pembukuan sebagaimana norma-norma pembukuan yang lazim. Tiap-tiap akhir tahun buku, pada akhir tahun yang bersangkutan, Direksi wajib membuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan, bahkan untuk Perseroan Terbatas yang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat seperti usaha perbankan, asuransi dan lain sebagainya atau perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang seperti menerbitkan obligasi dan perseroan terbuka, sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Direksi perseroan tersebut diwajibkan menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh mengesahkan laporan tersebut. Laporan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Direksi

bertanggung jawab pada Rapat Umum Pemegang Saham atas semua perbuatan hukum yang telah dilakukannya atas nama perseroan. Pemeriksaan pertanggungjawaban ini dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau oleh Dewan Komisaris apabila anggaran dasar perseroan mengatur demikian.

3. Melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:
 - a Memindahtangankan hipotik pada barang-barang tetap.
 - b Membebaskan hipotik pada barang-barang tetap.
 - c Melakukan dading.
 - d Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik.
 - e Mewakili perseroan di muka dan di luar pengadilan.
4. Melakukan hubungan dengan pihak ketiga, Direksi dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga, baik secara "perseorangan" maupun bersama-sama mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh mengenai pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
5. Melaksanakan pendaftaran dan pengumuman. Jika anggaran dasar perseroan mendapat pengesahan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman, maka Direksi

perseroan tersebut diwajibkan mendaftarkan anggaran dasar yang telah disahkan atau mendapat persetujuan Menteri Kehakiman itu kepada Kantor Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara. Demikian juga apabila terjadi perubahan anggaran dasar yang meliputi penurunan modal dasar, modal ditempatkan serta penggabungan Perseroan Terbatas baik pengumuman rancangan penggabungan maupun akta perubahan anggaran dasar yang berkaitan dengan penggabungan perusahaan.

Uraian tugas tersebut di atas hanya merupakan gambaran umum yang termuat dalam anggaran dasar perseroan. Dalam hal-hal tertentu, seperti melakukan hubungan dengan pihak ketiga, di samping harus mengacu kepada tujuan perseroan dapat pula ditentukan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Komisaris yang telah mendapat mandat dari Rapat Umum Pemegang Saham, biasanya perbuatan hukum yang harus mendapat persetujuan dari Komisaris yaitu apabila berkaitan dengan penguasaan suatu benda. Di samping itu menyelenggarakan dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan juga Rapat Umum Pemegang Saham lainnya merupakan tugas Direksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.⁶⁷

⁶⁷ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 62,

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas dan sesuai prinsip manajemen, Direksi mempunyai wewenang atau otoritas sebagai kekuasaan resmi atau legal untuk menyuruh orang lain bertindak dan taat kepada pihak lain. Wewenang Direksi yang lazim dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan, antara lain:

- a Direksi berwenang untuk memohon perpanjangan waktu kepada Menteri Kehakiman apabila pengeluaran saham-saham telah jatuh tempo dan masih diperlukan perpanjangan waktu.
- b Direksi dengan persetujuan Komisaris berwenang menjual saham-saham kepada siapa saja apabila dalam waktu satu bulan setelah Direksi memberitahukan pengeluaran saham-saham tersebut tidak ada yang membeli.
- c Direksi berwenang menandatangani surat-surat saham bersama dengan Komisaris.
- d Direksi berwenang mengeluarkan duplikat saham atas permintaan yang berkepentingan, apabila ada surat saham atau talon yang rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi, sedangkan aslinya dimusnahkan oleh Direksi dihadapan yang berkepentingan.
- e Direksi berwenang mengeluarkan duplikat saham apabila surat saham atau talon yang asli hilang.

- f Direksi berwenang menahan keuntungan-keuntungan atas saham, dan melarang mengeluarkan suara atas saham tersebut, jika ternyata dalam suatu pemidahan hak, tidak dipenuhi kewajiban-kewajibannya.
- g Direksi berwenang atas tanggung jawabnya sendiri untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan syarat-syarat dan kekuasaan yang ditentukan secara tertulis.
- h Direksi berwenang mewakili perseroan di muka dan di luar pengadilan serta berhak melakukan perbuatan pengurusan dan pemilikan atau penguasaan (*beheer en beschkking*) dengan batasan-batasan tertentu.
- i Direksi berwenang memimpin dan mengetuai Rapat Umum Pemegang Saham.
- j Direksi berwenang mengadakan Rapat Umum Luar Bias Pemegang Saham setiap waktu bila dipandang perlu.
- k Direksi berwenang menandatangani notulen rapat, jika notulen rapat di buat di bawah tangan.⁶⁸

Dalam menjalankan wewenang untuk mewakili perseroan, anggaran dasar sering menentukan batasan-batasan kepada Direksi, antara lain:

1. Direksi harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris apabila melakukan tindakan-tindakan:

⁶⁸ R Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 300.

- a Meminjam uang atas nama perseroan atau meminjamkan uang kepada pihak lain dalam jumlah tertentu.
 - b Mengikat perseroan sebagai penjamain utang.
 - c Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau mengalihkan barang-barang tetap milik perseroan atau membebani barang-barang milik perseroan tersebut dengan hutang.
 - d Menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan bernilai tinggi.
2. Pengangkatan dan pemberhentian seorang kuasa untuk mewakili perseroan harus dilakukan oleh dua orang anggota Direksi atau apabila anggota Direksi hanya terdiri dari satu Direktur, maka harus dilakukan bersama-sama dengan Komisaris.
 3. Direksi harus bekerja sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham.
 4. Tiap anggota Direksi wajib meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada anggota Direksi lainnya apabila akan melakukan tindakan yang menurut kebiasaan dalam dunia usaha dianggap sebagai hal yang penting bagi perseroan.
 5. Pembagian pekerjaan Direksi dalam lingkungan perseroan antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan sendiri oleh para anggota Direksi itu.

Dari uraian mengenai tugas dan wewenang Direksi sebagaimana diuraikan di atas, tugas dan wewenang Direksi pada umumnya telah ditentukan dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

yang antara lain ditentukan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, dan apabila ada kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Direksi timbul apabila yang bersangkutan memiliki wewenang atau menerima kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan mengurus perseroan mulai menggunakan wewenangnya. Untuk mencapai prestasi yang besar dalam mengurus perseroan, Direksi harus diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu yang telah diberikan kepadanya.

Selain mempunyai kewajiban, Direksi juga mempunyai tanggung jawab berupa tanggung jawab ke luar, terutama terhadap pihak ketiga dan tanggung jawab ke dalam perusahaan.

Tanggung jawab ke luar atas nama Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Direksi sepanjang tidak melampaui batas-batas kewenangannya dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas tersebut, Direksi secara pribadi tidak terikat atas perbuatannya, melainkan menjadi tanggung jawab yang diwakilinya yaitu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, tetapi bila tindakan-tindakan ke luar dari Direksi melampaui batas kewenangannya dan bertentangan dengan anggaran dasar perseroan, maka Direksi secara pribadi terikat oleh

tindakannya dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga.

Tanggung jawab Direksi ke dalam ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang setiap tahun harus dipertanggungjawabkan di muka Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi berkewajiban melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kewajiban dan tanggung jawab Direksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 84, sedangkan kewajiban dan tanggung jawab dalam penggabungan Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 102 ayat (2), Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 108 ayat (1), dan dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, baik di dalam dan di luar perusahaan, Direksi mendapat pengawasan dari Komisaris. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Tugas dan tanggung jawab Komisaris secara rinci diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang antara lain;

1. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengolahan perseroan yang dilakukan oleh Direksi,
2. Memeriksa buku-buku, dokumen serta kekayaan perseroan,
3. Memberikan teguran, petunjuk-petunjuk, nasehat-nasehat kepada direksi,

Secara umum tugas dan wewenang Komisaris ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan. Komisaris sebagai pengawas atau kontrol mempunyai hak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sewaktu-waktu dapat memasuki gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipergunakan oleh perseroan, memeriksa segala buku-buku dan surat-surat milik perseroan, memeriksa persediaan barang, uang kas dan sebagainya. Dan pada umumnya diperkenankan bertindak leluasa untuk dapat melakukan pengawasan dengan baik. Dalam melakukan pemeriksaan tersebut, Direksi diwajibkan memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya yang diminta oleh Komisaris. Dalam menjalankan tugas, Komisaris tidak berhak mewakili Perseroan Terbatas ke luar, khususnya kepada pihak ketiga, kecuali yang ditentukan lain oleh anggaran dasar.

Selain mempunyai tugas kewajiban, Komisaris mempunyai tanggung jawab dalam perseroan, yaitu tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga dan tanggung jawab ke dalam perseroan.

Tanggung jawab Komisaris, keluar perseroan tidak sebesar tanggung jawab Direksi karena Komisaris berhubungan dengan pihak ketiga apabila dalam keadaan yang sangat istimewa yaitu dalam hal Komisaris dibutuhkan Direksi sebagai saksi atau pemberi ijin dalam hal Direksi menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Komisaris dalam perbuatan penguasaan. Berbeda dengan Direksi yang dalam menjalankan penguasaan perusahaan setiap harinya berhubungan dengan pihak ketiga.

Tanggung jawab ke dalam dari Komisaris sama dengan tanggung jawab dari Direksi yaitu bertanggung jawab secara keseluruhan secara pribadi. Dalam hal perseroan terdapat lebih dari satu komisaris maka tanggung jawab bisa bersifat kolektif dan jika Komisaris ikut dalam pengurusan perusahaan maka Komisaris bersangkutan bertanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham bersama-sama dengan Direksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 94 ayat (1) keberadaan Komisaris dalam perseroan adalah merupakan keharusan, terlebih lagi dalam perseroan yang bergerak dalam pengerahan dana masyarakat, harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Komisaris. Dengan tugas sebagai pengawasan kebijaksanaan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi mengenai pelaksanaan tugas kepengurusan, maka terjadi interaksi antara tugas Direksi dan Komisaris pada saat dan sebelum menjalankan aktifitas perusahaan. Direksi tidak

dapat menjalankan tugasnya sekehendak hatinya atau dengan sewenang-wenang karena dalam menjalankan pengurusan mendapat pengawasan dari Komisaris.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris dapat mengawasi pekerjaan Direksi tidak saja bersifat preventif tetapi juga represif dan dalam memberikan nasehat yang harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perusahaan. Tugas mengawasi dan memberikan nasehat tersebut masih ditambah lagi dengan suatu kewenangan yang diberikan kepada Komisaris sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu:

1. Wewenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Wewenang melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu

Kewenangan yang dimiliki oleh Komisaris sebagaimana tersebut diatas, harus dituangkan dalam anggaran dasar dan apabila ditentukan dalam anggaran dasar maka kewenangan itu tidak ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 101, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai tugas, wewenang maupun hak dan kewajiban Komisaris, sedangkan kewajiban dan tanggung jawab Komisaris dalam penggabungan Perseroan Terbatas adalah memberikan persetujuan terhadap usulan

rencana penggabungan. Sebagai pengawas perusahaan, Komisaris dituntut untuk mengawasi pelaksanaan penggabungan perseroan, sehingga dalam penggabungan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak. Dengan demikian dalam menyusun rencana penggabungan Komisaris harus memberi pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dalam pelaksanaan penggabungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas secara tersurat tidak memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Direksi dan Komisaris dalam hal memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas, namun dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas Direksi bertindak sebagai penyusun rencana penggabungan Perseroan Terbatas. Dalam menyusun usulan rancangan penggabungan tersebut Direksi harus memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, dimana pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas secara tersirat Direksi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Demikian juga dengan Komisaris sebagai pengawas dalam perseroan, dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas mempunyai tugas untuk

memberikan persetujuan usulan rencana penggabungan yang telah disusun oleh Direksi. Dalam memberikan persetujuan usulan rencana penggabungan, Komisaris harus memantau apakah kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang lemah telah terakomodasi dalam rencana penggabungan tersebut. Dalam hal usulan rencana penggabungan belum atau tidak memuat perlindungan hukum bagi pihak-pihak tertentu, maka Komisaris dapat menolak rencana penggabungan dengan tidak menyetujui usulan penggabungan tersebut.

Melihat dari uraian kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris, khususnya dalam penggabungan Perseroan Terbatas yang telah diuraikan dalam hasil penelitian, Direksi dan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting, sentral dan strategis dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas.

Kewajiban dan tanggung jawab Direksi dalam rangka memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan dimulai pada saat penyusunan rencana penggabungan, karena dalam penyusunan rencana penggabungan perusahaan terjadi negoisasi mengenai status pemegang saham minoritas, karyawan dan kreditur, baik terhadap perusahaan yang menggabungkan maupun terhadap perusahaan yang menerima penggabungan, serta mencari jalan ke luar dengan menentukan langkah-langkah penyelesaian terhadap kerugian yang akan timbul. Dalam membuat rencana penggabungan, Direksi harus benar-benar memperhatikan pihak-pihak tertentu, khususnya pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan

masyarakat, sehingga risiko yang dapat menimbulkan kerugian atas pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas diminimalkan.

Dalam menyusun rencana penggabungan Perseroan Terbatas, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dicerminkan adanya negosiasi Direksi dalam memperjuangkan kebebasan pemegang saham minoritas untuk menentukan setuju atau menolak penggabungan Perseroan Terbatas, dan apabila menolak yang bersangkutan memperoleh harga yang wajar atas saham yang dimilikinya.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi karyawan dapat dilakukan oleh Direksi dengan cara negosiasi untuk meminimalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, maka Direksi harus memperjuangkan hak-hak yang harus diperoleh karyawan apabila diputuskan hubungannya.

Sedangkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, Direksi harus mengusulkan adanya perjanjian pengalihan utang dari perusahaan yang menggabungkan diri kepada perusahaan hasil penggabungan, serta pembayaran utang-utang perusahaan yang menggabungkan diri dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dalam menyusun rencana penggabungan yang di dalamnya memuat prospektus perusahaan hasil penggabungan. Dalam menyusun prospektus perusahaan, Direksi harus memperhatikan etika bisnis dan prinsip-prinsip usaha yang sehat sehingga nantinya perusahaan hasil penggabungan tidak mengarah pada

praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang nantinya dapat merugikan masyarakat dan persaingan usaha.

Kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris berakhir setelah Perseroan Terbatas hasil penggabungan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, misalnya memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi kepada karyawan, pemenuhan utang kepada kreditur, terjualnya saham dari pemegang saham minoritas dengan harga wajar dan untuk jangka panjang mengusahakan agar perusahaan hasil penggabungan tidak melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan cara-cara atau tindakan-tindakan tersebut di atas, Direksi dan Komisaris dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggabungan Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk menyehatkan Perseroan Terbatas telah memasuki era kepastian hukum dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dimana penggabungan mendapat pengaturan yang lebih komprehensif. Pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas selain didasarkan kedua peraturan perundangan tersebut diatas, juga berlaku ketentuan khusus "*lex specialis*". Penggabungan merupakan suatu alternatif bagi pengembangan perusahaan agar diperoleh peningkatan efisiensi, memperoleh pangsa pasar yang lebih luas dan memperluas jalur distribusi, tetapi pada sisi lain penggabungan Perseroan Terbatas juga dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak-pihak tertentu.
2. Dalam penggabungan Perseroan Terbatas pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan masyarakat mempunyai kedudukan yang lemah, maka pihak-pihak tersebut sering dirugikan. Untuk mengantisipasi akibat negatif penggabungan

Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 telah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat pula beberapa ketentuan lainnya yang juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas.

3. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam penggabungan Perseroan Terbatas, Direksi dan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting, sentral dan strategis. Kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dimulai sejak penyusunan usulan rencana penggabungan Perseroan Terbatas sampai dipenuhinya segala hak dari pihak-pihak yang dirugikan yang timbul dari pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas.

B. Saran

Sukses atau tidaknya pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas, tidak hanya dilihat dari meningkatnya sinergi yang ditandai dengan meningkatnya efisiensi, memperoleh pangsa pasar yang lebih luas dan memperluas jalur distribusi, tetapi juga diukur dari minimnya akibat yang merugikan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang sangat lemah dalam perusahaan serta cara penyelesaian kewajiban-kewajiban bagi pihak yang dirugikan. Untuk meminimalkan resiko yang merugikan pihak-pihak tertentu serta memberikan perlindungan hukumnya, maka Direksi dan Komisaris harus benar-benar memperjuangkan

kepentingan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah. Oleh karena itu penulis menyarankan bahwa di dalam pelaksanaan penggabungan Perseroan Terbatas selain harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, memakai etika bisnis yang benar dan yang tak kalah pentingnya adalah Direksi dan Komisaris dalam menyusun rencana penggabungan harus mempunyai misi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah secara struktural, finansial dan lokalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Anderson, Ronald et all, *Business Law*, South Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio, 1984.
- Adiningsih, Sri, *Ekonomi Mikro*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, Edisi Pertama, 1999.
- Ahaditomo, *Posisi Industri Kefarmasian kaitannya Dengan UU No. 5 Tahun 1999*, Makalah Seminar Merjer, Konsolidasi, Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies On Investment And Competition, Jakarta, Agustus 1999.
- A Howel, Rate, et all, *Business Law, Tex and Cases*, Fourth Edition, The Dry den Press, Orlando, Florida, 1988.
- Allen and Overy, (et all) *Merger And Acquisitions Yearbook 1998: A Special Supplement To International Financial Law*, International Financial law Published, 1998.
- A. Pantler and Robert P.O. Quinn, *Recent Empirical Evidence on Mergers and Acquisitions*, The Antitrust Bulletin, Winter, 1993.
- A Samuelson, Paul, *Economics An Introductory Analysis*, USA., Mac Graw-Hill Book Company Inc, 1948.
- A. Zen Umar Purba, *Merger dan Akuisisi : Praktek dan Kebutuhan Akan Pengaturan*, Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXII, Jakarta, Februari 1992.
- _____, *Merjer dan Akuisisi dan Kebutuhan Akan Pengaturan*, Makalah Seminar Merjer dan Akuisisi, Grand Hyatt Hotel, Jakarta, 14 Desember 1991.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, 1999.
- Bako, Ronny, *Makna Hukum Dari Ketentuan Pasal 28 Dan 29 UU No. 5 Tahun 1999*, Makalah Seminar Merjer, Konsolidasi, Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies On Investment And Competition, Agustus 1999.

- Bank Dunia dan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), *Kerangka Rancangan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Dan Kebijakan Persaingan*.
- Bubchuck, Lucian Arye, *Corporate Law and Economic Analysis*, Havard Law School, Cambridge University Press, 1990.
- Bengtsson, Mc Donagh Ann, *Manajemen Merger dan Akuisisi*, Seri Manajemen No.150, PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1994.
- Black's, Herry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., SA. Paul Minn, 1979.
- Boediono, *Ekonomi Mikro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1*, BPEF-Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Brietzke, Paul H, *America's Experience with Merger: Is it Relevant Under Indonesia's New Competition Law?*, Makalah Seminar Merjer, Konsolidasi, Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies On Investment And Competition, Jakarta, Agustus 1999.
- Browning, Edgar K dan Jacqueline M. Rowning, *Micro Economic Theory and Applications*, Toronto, Little Brown And Company, Boston, 1993.
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Butterworths Guides, *Legal Terms*, Butterworths Australia, 1998.
- Buxbaum, Hertig, Hirsch, Hopt (Eds), *European Business Law, Legal And Economic Analysis Integration And Harmonization*, Edited by Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1991.
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- C Howard, Marshall, *Competition is the Heart Of Free Enterprise Economy, Anti trust Law And trade Regulation, Selected Issues And Case Studies*, Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 1983.
- _____, *Legal Aspect On Marketing*, Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1967.

- David, S. Silver, *Strategy Partnering; Creating The Borders Organization*, Butterworth Heinemann, 1993.
- David, Wheeler & Silalanpa, *The Stakeholder Corporation*, Mc Graw Hill, 1997
- Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Djalil, Sofyan A, *Merjer, Konsolidasi Dan Akuisisi Dari Sudut Kepentingan BUMN Di Indonesia Dan Tanggapannya Tentang Pengaturan MKA Dalam UU No. 5 Tahun 1999*, Makalah Seminar Merjer, Konsolidasi, Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies On Investment And Competition, Jakarta, Agustus 1999.
- Douglas Whitman and John William Gergerz, *The Legal Environment of Business*, Second Edition, Random House, Business Division, New York, 1988.
- Dorresteijn, Andriaan, Ina Kuiper dan Geoffrey Morse, *European Corporate Law*, Kluwer Law And Taxation Publishers, Netherlands, 1994.
- Elips, *Kamus Hukum Ekonomi*, Edisi Pertama, Jakarata. 1997.
- E. Williamson Oliver, *Merger Acquisitions, And Leveraged Buyouts: An Efficiency Assessment, Corporate law and Economic Analysis*, Edited by Lucian Arye Bebchuk, Harvard Law School, Cambridge University Press, 1990.
- Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y.A.3. Malang, 1990.
- F. Alkhafaji, Abbas, *Restructuring American Corporation, Causes, Effects And Implications*, Quorum Books, New York, 1990.
- F. McCarty, William dan John W. Babgy, *The Legal Environment of Business*, Irwin, Boston.
- F. Myers Henry F, "Will Mergers Help Or Hurt In The Long Run?", Wall Street Journal (May 2, 1988).
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1995
- _____, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.

- _____, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gaughan, A. Patrick, *Merger Acquisition And Corporate Restructuring*, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1996.
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Undang-Undang PT (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1995.
- Gilarso T, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Bagian Mikro Jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Go, Marcel, *Akuisisi Bisnis, Analisis dan Pengelolaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- H Hoffman Jr, William dan William A. Raabe (editor), *West's Federal Taxation Corporations, Partnerships, Estate And Trust, Annual Edition*, 1989.
- Hadi, Sutrisno, *Statistik 2*, Andi Offset, Yogyakarta, 1988.
- Harmanto Edy Djatmiko dan Gde Suardhika, *Kasus Merger : Yang Membesar dan Makin Kokoh*, Swasembada VII, Jakarta, Agustus 1991.
- Hartono, CFG Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Abad Kedua Puluh*, Alumni Bandung, 1994.
- Hartono, Sri Rejeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- _____, *Penggabungan Perusahaan*, Masalah-Masalah Hukum, majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Nomor 4 – 1986.
- _____, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga* Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 1985.
- Heermann, Peter, *German Experience in Conducting Merger, Consolidation And Acquisition In The Context Of Antimonopoly And Comment On The Law No. 5 Of 1999*, Makalah Seminar Merjer, Konsolidasi, Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies On Investment And Competition, Jakarta, Agustus 1999.
- Hian Tack, Hoon, (et al) *Economic Theory And Applications*, Mac Grow Hill Book Co, Singapore, 1998.

- Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (tanpa tahun) Serta Ubahannya Tertanggal 28 Januari 1998: A. Format Thesis (Halaman 18 Lampiran), B. Format Proposal (Halaman 21 Lampiran), 1998.*
- Hutabarat, Pos M, *Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Persaingan*, Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1999.
- Ichsan Ahmad, *Dunia Usaha Untuk Indonesia: Segi Hukum Segi Manajemen Struktur/Bentuk Hukum Kebijakan Pemerintah*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- I.G. Rai Widjaya, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Mega Poin, Jakarta, 2000.
- Iksan, Muhammad, *Bank Pemerintah*, Gatra, 10 Januari 1998, Jakarta.
- James, Chimy & Nitin Nohira, *Fast Forward: The Ideas On Managing Business Change*, Harvard Business review Book, 1996.
- J. Fred Weston, Kwang S. Chung and Susan E. Hong, *Mergers, Restructuring, and Corporate Control*, Englewood Cliffs, NJ : Practice Hall Inc, 1990.
- Juwana Hikmahanto, *Merjer, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Hukum Prespektif Persaingan Dan UU No. 5 Tahun 1999*, Makalah Seminar Merjer, Konsolidasi, Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies On Investment And Competition, Jakarta, Agustus 1999.
- Kantz, Michael and Harveey S Rosen, *Micro Economic*, Richard D Iwin Inc, USA, 1994.
- Keraf, Gorys, *Diksi Dan Gaya Bahasa, Sari Retoretika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Kein, Ward, *Corporate Financial Strategy*, Butter worth, Heinemann, 1993.
- Kian Gie, Kwik, *Analisa Ekonomi Politik Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 1995.
- , *Sinergis Dan Kemungkinan Penyalahgunaan Merger & Akuisisi Pada Unit-Unit Dalam Suatu Group Bisnis*, 1992.

Kian Wie, Thee, *Pandangan Ekonomi Terhadap Pengaturan Merjer, Konsolidasi, Dan Akuisisi dalam UU No. 5 Tahun 1999*, Makalah Seminar Merjer, Konsolidasi, Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies On Investment And Competition, Jakarta, Agustus 1999.

_____, *Competition Policy in Indonesia A Critical Look At Indonesia,s New Antimonopoly And Unfair Competition Law*, Makalah Seminar Merjer, Konsolidasi, Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies On Investment And Competition, Jakarta, Agustus 1999.

Keith R. Abbot, *Company Law*, 4th Edition, DP Publication Ltd, London, 1970.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Kunio, Yushihara, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1990.

Lee, Marks, Mitchell, *From Turmoil To Triumph*, Lexington Books, 1996.

Loekman Soesanto, *Pengalaman Konsultan Pajak Dan Akuntan Dalam Mempersiapkan Merjer, Konsolidasi dan Akuisisi Dan Komentar Sekitar MKA Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*, Makalah Seminar Merjer, Konsolidasi, Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies On Investment And Competition, Jakarta, Agustus 1999.

Lubis, T. Mulya, *Hukum Dan Ekonomi*, Sinar Harapan, Jakarta, 1992.

Machfoedz Mas'ud, *Undang-Undang Perseroan 1995 Dan Perlindungan Minoritas Dari Praktek Bisnis, (Pasar Modal) Yang Tidak Sehat*, 1996.

Majalah Info Bank, Nomor 212, Jakarta, Juli 1997.

Manurung, Ronald, *Mekanisme Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Di Perusahaan*, Makalah Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 –11 September 1997.

- McCarty, F. William dan John W. Babgy, *The Legal Environment of Business*, Irwin, Boston.
- Moena, I Nyoman, *Manfaat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bagi Perusahaan*, Makalah Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 –11 September 1997.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995.
- Muhaimin, Yahya A, *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950 – 1980*, LP3ES, Jakarta, Cetakan I, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perseroan Terbatas Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Muhammad, Mar'ie, *Tergantung Mata Memandang*, Info Bank No. 125, Volume XIII, 1990.
- Mulyadi, Kartini, *Problema Pokok Dalam Merger Dan Akuisisi*, 1992.
- Nasution, S. dan M. Thomas, *Buku Penuntun Pembuat Thesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Muchtar, *Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham Sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*, Makalah Seminar Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies On Investment And Competition, Jakarta, Agustus 1999.
- N. Dirjarkara, SJ, *Filsafat Manusia*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1984.
- Nohria, Nitin & Ghoshal, Sumantra, *The Differentiated Network Organizing Multinational Corporations for Value Creation*, Jossey –Bass Publishers, San Francisco, 1997.
- Nusantara, Abdul Hakim G. dan Benny K. Harman, *Analisa Dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 1999.
- Oliver, MC and A. Marshall Emid, *Company Law, Eleventh Edition*, The M & E Handbook Series, 1991.

- Pamungkas, Hanan, *Persaingan Bisnis Dan Masalah Masyarakat*, Bisnis Indonesia, 22 Juli 1995.
- Partnership For Business Competition, *Pengantar Menuju Pelaksanaan Persaingan Usaha*, Position Paper, Seminar sehari Partnership For Business Competition, Jakarta, 25 Juli 2000.
- Pangaribuan, Emmy Simanjutak, *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas, Yogyakarta, 1994.
- Posner, Richard A, *Antitrust Law (An Economic Perspective)*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1993.
- Pramono, Nindyo, *Sertifikasi Saham PT. Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), *Mergers & Acquisitions in Indonesia*, PDBI, Jakarta, 1986.
- Raharjo, Satjipto, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Alumni Bandung, 1977.
- _____, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Rajagukguk, Erman, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perjanjian Yang Dilarang*, Makalah.
- _____, *Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi*, Makalah Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta 10 –11 September 1997.
- Rawlinson, William an Malactly P. Cornwell – Kelly, *European Community Law*, Water Low publisher, 1990.
- Reksodiprodjo, Sukanto, *Pengelolaan Merger dan Akuisisi, Aspek Target*, Makalah seminar IKANED – IBII, Jakarta 5 Pebruari 1992.
- Research On Business Actors' Awareness On The Enforcement Of The Competition Law And Awareness On The New Commotion, *Reaksi pelaku Usaha Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keberadaan Komisi*

- Pengawas Persaingan Usaha*, Makalah Seminar sehari Partnership For Business Competition, Jakarta, 1992.
- Rido, R. Ali, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 1986.
- Ritzer, George, Penyadur Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Robert, Massoudi & dkk, *Rightsizing For Corporate Survival*, Prestige Hall, 1995.
- Sadler, Philip, *Managing Change*, 1995.
- Savage, M. Charles, *Fifth Generation Management: Co Creating Through Virtual Enterprising, Dynamic Teaming and Knowledge Network*, Butter-worth-Heinemann, 1996.
- Schitzer, Martin C, *Contemporary Government and Business Relation*, Houghton Mifflin, Boston, 1987.
- Schuit, Steven R dan Jan-Erik Janssen, *Acquisition, Takeovers And Joint Ventures Legal And Taxation*, Kluwer Law International, Netherlands, 1996.
- Schuit, Steven R et. al, *Dutch Business Law*, The Nederland : Kluwer Law and Taxation Publishers, 1983.
- Silalahi, M. Udin, *Undang-Undang Antimonopoli Indonesia: Peranan Dan Fungsinya Di Dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume Sepuluh, 2000.
- Silalahi, Pande Radja, *Merjer, Konsolidasi dan Akuisisi Dari Sudut perbankan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*, Makalah Seminar Merjer, Konsolidasi, Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies On Investment And Competition, Jakarta, Agustus 1999.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok (Group Company Concern)*, Seksi Hukum Dagang, FH UGM Yogyakarta, 1994.
- Simmons, Michael et. al., *Successful Mergers, Planning Strategy and Excecution*, Waterlaw Publishers, London, 1990.

- Sloman, John, *Essential of Economic*, Prentice Hall Europe, Greet Britain, 1998
- Soekanto, Soeryono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarata, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Stanley, Foster, Reed & Lajouse Reed Alexandra, *The Art Of Merger & Acquisition*, Irwin Publishing, 1996.
- Sudarsanam, P.S, *The Essence of Mergers And Acquisitions*, Terjemahan Rahmad Herutomo, Andi, Yogyakarta, 1999.
- Sudibyo Placidius A dan NindyoPramono, *Merger Akuisisi*, Jakarta, 1997.
- Sudibyo Placidius, *Restrukturisasi Perusahaan*, Seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dalam Rangka Dies Natalis Ke-41 Universitas Diponegoro, 23 September 1988
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Perdasa, Jakarta, 1994.
- Sutarto, *Ensiklopedia Ekonomi*.
- Sutamtio, Retnowulan, *Kapita Selektu Hukum Ekonomi*, Ikatan Hukum Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1995.
- Syahdaeni, Remi Sutan, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Makalah Diskusi Panel tentang Antimonopoli diselenggarakan oleh Kelompok Kajian Ilmu Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 4 September 1999.
- _____, *Aspek Hukum Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi Dalam Upaya Penyehatan Perusahaan*, Makalah Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta 10 –11 September 1997.
- _____, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarata, Institut Bankir Indonesia, 1993.

- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit Pustaka Gramedia, Jakarta, 1996.
- Suyatno, Thomas, *Aspek Hukum Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi Dalam Upaya Penyehatan Perusahaan*, Makalah Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta 10 –11 September 1997.
- S Pinddycle and Daniel L. Rubinfeld, *Micro Economic*, Prentice Hall International Inc, USA, 1998.
- Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Perundang-Undangan Persaingan Usaha di Bidang Industri*, BPHN, Jakarta, 1984.
- Tjager, I Nyoman, *Aspek Hukum Di Bidang Pasar Modal Terhadap Praktek Merjer, Konsolidasi Dan Akuisisi Di Indonesia Dan Tanggapannya Atas Pengaturan MKA Dalam UU No. 5 Tahun 1999*, Makalah Seminar Merjer, Konsolidasi, Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) diselenggarakan oleh Institute for Policy Studies On Investment And Competition, Jakarta, Agustus 1999.
- Tumbuan, Fred B.G, *Merger Antara Perusahaan Nasional Dengan Perusahaan Asing (Cross-Border Mergers)*, Makalah Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta 10–11 September 1997.
- Warren J. Keegen, *Global Marketing Management*, Prentice Hall International, New York, 1989.
- Wibisono, Christianto, *Masalah Merger dan Akuisisi di Indonesia*, Bisnis Indonesia, Jakarta, 19 Desember 1991,
- Widjaja, Gunawan, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, Seri Hukum Bisnis, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Widjaya, Rai I.G., *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Mega Poin, Jakarta, 2000.
- Whitman Douglas dan John William Gergecz, *The Legal Environment Of Business*, Second Edition, Random House, Business Division, New York, 1988.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Seri Hukum Bisnis, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.

Yara, Muchyar, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Nahdhilah Ceria Indonesia, Jakarta, 1995.

Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, *Akuisisi Perusahaan (Corporate Acquisition)*, Jakarta, 1992.

Yunus Husein, *Pengaruh dan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Makalah Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 10-11 September 1997.